

MONOGRAF
PERJALANAN PENDIDIKAN ISLAM
DI ACEH MASA ORDE BARU

Dr. Basri, M.A

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Dr. Basri, M.A

MONOGRAF PERJALANAN PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH MASA ORDE BARU

Maret 2023

Hak penerbitan pada Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, Langsa

Editor	: Rita Sari, M.Pd
Setter	: Muhammad Yunus Nasution
Desain Cover	: Aulia @rt

Dicetak di ZAHIR PUBLISHING, Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

ZAWIYAH Serambi Ilmu Pengetahuan

Anggota IKAPI (No. 028/Anggota Luar Biasa/DIA/2022)

Alamat:

Jl. Meurandeh, Gampong Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh

Telp 0641-22619/23129, Fax. 0641 - 425139

E-mail: zawiyah@iainlangsa.ac.id

ISBN : 978-602-6956-10-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku monograf yang diberi judul Perjalanan Pendidikan Islam di Aceh Masa Orde Baru. Penulisan buku monograf ini didasarkan dari telaah mendalam dan panjang yang telah dilakukan penulis selama lima tahun.

Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Islam khususnya di Aceh selama masa orde baru, agar generasi Aceh memahami salah satu histori yang merupakan bagian penting yang menggambarkan eksistensi pendidikan Islam selama masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada kepada segenap jajaran pimpinan dan sivitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, serta para informan, editor, dan penerbit khususnya.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan buku monograf ini masih banyak banyak kekurangan dan masih jauh lebih dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan untuk buku monograf yang selanjutnya diterima dengan lapang. Terakhir, semoga buku monograf ini memberikan manfaat bagi semua. Aamiin.

Langsa, Februari 2023



Dr. Basri, MA

SEKAPUR SIRIH
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, sebagai pemilik dan sumber ilmu yang dengan kasih sayang-Nya telah menganugerahkan dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Selawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang dengan kehadirannya telah memurnikan dan menyempurnakan ajaran ketauhidan (*tauhidullah*) dalam bingkai Dinul Islam, sehingga telah membawa pencerahan peradaban manusia dalam naungan wahyu dan ilmu pengetahuan. Kehadiran buku **Monograf Perjalanan Pendidikan Islam di Aceh Masa Orde Baru**, tidak terlepas dari hidayah dan karunia Allah SWT berikan kepada saudara Dr. Basri, M.A, sehingga karya ini sukses dihadirkan ke hadapan para pembaca, sebagai bentuk kepedulian dan jihad akademik dalam konteks revolusi kognitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan transformasi pendidikan Islam.

Buku mengenai transformasi pendidikan Islam di Aceh lahir dari Analisa mendalam seorang ilmuan dalam bidang pendidikan Islam. Oleh karena itu, saya bergembira mendapat kesempatan mengantar buku ini, sebuah karya fenomenal Dr. Basri, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa. Buku yang ada di tangan anda, para pembaca, merupakan maha

karya seseorang yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan; Dr. Basri, MA, bukan hanya seorang ilmuwan, beliau juga merupakan praktisi pendidikan, yang mengawali karir dari bawah sampai ke puncak, sebagai seorang Rektor IAIN Langsa; tentu pengalaman beliau sebagai ilmuwan dan praktisi pendidikan menjadikan buku ini sebagai rujukan utama dalam kajian pendidikan Islam baik dalam konteks lokal di Aceh maupun dalam percaturan nasional di Indonesia.

Kehadiran buku ini patut dicatat bahwa sejarah menyediakan ruang bagi siapa saja untuk mengisinya. Para ilmuwan terdahulu tidak menyia-nyiaikan waktu dan kesempatan dimaksud sehingga nama dan pemikiran mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan tertoreh pada lembar-lembar sejarah. Agaknya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saudara Dr. Basri, MA sedang berupaya mengisi ruang sejarah perbendaharaan intelektual dengan menyodorkan buah karyanya ke tengah-tengah percaturan khazanah keilmuan dewasa ini. Buku yang berada di tangan anda ini merupakan sebuah rujukan yang berharga, dimana pembaca disuguhkan dengan sebuah bacaan yang penuh pengetahuan dan ditulis dengan sangat apik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Referensi yang digunakan oleh penulis buku ini sebagai sumber bacaan penulisan buku ini, berasal dari sumber terpercaya, sehingga informasi yang disuguhkan dapat dijadikan sumber bacaan dan sumber ilmu pengetahuan oleh berbagai kalangan.

Mencermati konstruksi dan substansi isi buku ini, mengantarkan kita pada pemahaman bahwa Penulis mampu memadukan skill dan seni dalam memaparkan isi mendalam

melalui sentuhan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Pada sisi lain, pernik-pernik pemikiran transformasi pendidikan yang diuraikan oleh penulis juga menggambarkan ke dalam pola berpikir penulis dalam menjelaskan perjalanan pendidikan Islam di Indonesia dari waktu ke waktu. Untuk menghasilkan sebuah bacaan yang padat pengetahuan, tentu membutuhkan kejelian dan ketajaman analisa penulis, dan hal ini menunjukkan kepiawaian penulis, Dr. Basri, MA di dalam menampilkan pengetahuan yang bermanfaat tentang Pendidikan Islam di Aceh, terutama pada saat orde baru.

Buku ini tersusun dengan sangat apik, terdiri dari 5 BAB, dimana penulis menggunakan *retrospective analysis*, yaitu menganalisa keadaan pendidikan Islam sekarang ini melalui kajian peristiwa-peristiwa masa lampau, maka tidak heran ketika penulis memulai buku ini dengan sebuah analisa mendalam mengenai Pendidikan Islam secara umum dan diakhiri dengan aktualisasi transformasi pendidikan Islam, yang menjadi isi utama dari buku ini. Pada bagian awal (BAB I) dari buku ini menyajikan definisi Pendidikan Islam, kemudian memaparkan karakteristik Pendidikan Islam di Indonesia, Aceh dan transformasi pendidikan Islam. Dalam BAB II, penulis dengan sangat piawai mendiskusikan diskursus sejarah Aceh dari berbagai aspek dimulai dari sejarah kerajaan Aceh, aspek perekonomian sampai kepada aspek politik. Kemudian, BAB III dari buku ini menyuguhkan organisasi politik di Aceh yang mempengaruhi taransformasi pendidikan Islam. BAB IV dan BAB V merupakan inti dari buku ini, dimana penulis dengan sangat cerdas menjelaskan proses transformasi Pendidikan

Islam dari berbagai aspek, sehingga pembaca memperoleh informasi komprehensif dari keberadaan buku ini.

Atas nama pribadi, dan civitas akademika UIN Ar-Raniry, saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Dr. Basri, MA yang sudah melahirkan buku yang sangat komprehensif ini, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia, dan terutama di Aceh, dan menjadi konsumsi para pencari ilmu, serta buku ini akan menghiasi rak-rak perpustakaan tidak hanya di perguruan tinggi di Aceh, namun juga perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Konsekuensi logis memposisikan buku ini sebagai sumbangan pemikiran yang layak diapresiasi secara positif dan akademis. Namun, pada proses penulisan dan penerbitan buku ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tetapi *“Ketidakmampuan untuk mencapai kesempurnaan itulah kesempurnaan”* demikian ungkapan bijak dari Sayyidan Abu Bakar al-Shiddiq RA.

Wallahu ‘alam bishawab

Banda Aceh, Februari 2023
Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SEKAPUR SIRIH	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1. Pendidikan Islam	1
2. Pendidikan Islam di Indonesia	8
3. Pendidikan Islam di Aceh	15
4. Transformasi Pendidikan Islam	18
BAB II	
KILAS SEJARAH ACEH	29
1. Asal Usul Kerajaan Aceh	29
2. Aspek Perekonomian	32
3. Struktur Sosial Masyarakat	33
4. Aspek Adat-Istiadat	35
5. Aspek Seni dan Budaya	37
6. Aspek Agama	38
7. Aspek Politik	45
BAB III	
ORGANISASI POLITIK ISLAM DI ACEH	49
1. Syarikat Islam (SI)	49
2. Serikat Pemuda Islam	50
3. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)	50
4. Aspek Intelektual	63
5. Peranan Ulama Dalam Masyarakat	64
6. Peran Ulama Dalam Pendidikan	66
7. Peran Ulama Dalam Pemerintah	67
BAB IV	
TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI ACEH TAHUN 1966-1998	69
1. Transformasi Sistem Pendidikan Islam	69

2. Tujuan Pendidikan Islam.....	69
3. Tujuan Pendidikan Nasional.....	70
4. Tujuan Institusional.....	71
• Tujuan Institusional Dayah	71
• Tujuan Institusional Madrasah	72
• Tujuan Institusional Perguruan Tinggi Agama Islam....	73
5. Transformasi Sistem Pendidikan Islam	75
6. Transformasi Tujuan Pendidikan.....	76
7. Transformasi Tujuan Pendidikan Islam.....	77
8. Transformasi Tujuan Institusional Setelah Tahun 1966.....	79
• Transformasi Tujuan Institusional <i>Dayah</i>	79
• Tujuan Institusional Madrasah	80
• Tujuan Institusional Perguruan Tinggi Agama Islam ...	82
9. Transformasi Pendidik.....	84
• Pendidik Dayah	85
• Pendidik Madrasah	86
• Pendidik Perguruan Tinggi Agama Islam.....	87
10. Transformasi Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Islam di Aceh Era 1966-1998.....	88
11. Transformasi Pendidik Pada Dayah.....	89
12. Transformasi Pendidik Pada Madrasah	90
13. Transformasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Agama Islam.....	90
14. Transformasi Peserta Didik.....	92
15. Transformasi Santri <i>Dayah</i>	95
16. Transformasi Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah	96
17. Transformasi Mahasiswa Perguruan Agama Islam	99
18. Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam	101
19. Transformasi Kurikulum Dayah.....	103
20. Transformasi Kurikulum Madrasah	110
21. Transformasi Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam....	118
22. Transformasi Metode Pendidikan.....	122
23. Transformasi Metode Pendidikan <i>Dayah</i>	124

24. Transformasi Metode Pendidikan Madrasah	127
25. Transformasi Metode Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam	128
26. Transformasi Sarana dan Prasarana.....	130
27. Sarana dan Prasarana Dayah.....	131
28. Transformasi Sarana dan Prasarana Madrasah	133
29. Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam	135
30. Transformasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam di Aceh Tahun 1966-1998.....	136
31. Transformasi Sarana dan Prasarana <i>Dayah</i>	136
32. Transformasi Sarana dan Prasarana Madrasah	137
33. Transformasi Sarana dan Prasarana perguruan Tinggi Agama Islam.....	138
 BAB V	
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	139
1. Pendidikan Agama Islam di Sekolah	139
2. Eksistensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah	142
3. Transformasi Pendidikan Agama Islam pada sekolah di Aceh Tahun 1966-1998.....	145
• Pendidikan Agama Islam di Sekolah.....	147
• Muatan Lokal	147
4. Aktualisasi Transformasi Pendidikan Islam	149
• Transformasi <i>Dayah</i>	150
• Transformasi Madrasah.....	151
• Transformasi Perguruan Tinggi Agama Islam.....	151
• Transformasi Sistem Pendidikan.....	152
• Transformasi Pendidik.....	155
• Transformasi Peserta Didik.....	157
• Transformasi Kurikulum	158
• Transformasi Metode Pembelajaran	159
• Transformasi Sarana dan Prasarana	161
 DAFTAR PUSTAKA	 163
INDEKS	167

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendidikan Islam

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Namun anehnya, tidak semua orang bisa menempatkan pendidikan pada posisi yang tepat. Oleh karena itu, kita harus mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam kehidupan manusia. Penempatan pendidikan Islam yang tepat dapat memandu kehidupan kita hari ini dan di masa depan. Istilah pendidikan Islam menjadi sangat populer dikalangan umat Islam, terutama dikalangan mereka yang telah mengabdikan diri pada pengajaran Islam, baik sebagai guru, dosen, maupun tenaga pengajar lainnya. Untuk itu, pertama-tama harus dijelaskan konsep pendidikan Islam, khususnya makna kata per kata, yang kemudian dirangkum menjadi istilah khusus yang juga memiliki arti khusus.

Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari kata didik yang diberi awalan "pen" dan akhiran "an", yang diartikan sebagai proses, tindakan, dan cara pendidikan (Poerwadarminto, 1993, p. 232). Dari kata didik ini pulalah terbentuk berbagai turunan kata, seperti pendidik, terdidik, didikan, dan kependidikan. Dalam bahasa Inggris, kata yang sering disepadankan dengan pendidikan adalah *education* (Echols & Shadily, 1990, p. 207). Bukan *teaching* yang disepadankan dengan pengajaran saja dan dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah *ta'lim*.

Penentuan kata yang sepadan dalam bahasa Arab dengan pendidikan telah diperdebatkan oleh para ahli. Di antaranya ada yang konsisten dengan term *tarbiyah*, tetapi yang lainnya justru konsisten dengan term lain, seperti *ta'dib* atau *ta'lim*. Hal ini terjadi agaknya karena bahasa Arab memiliki kekayaan kosa kata yang bila ditelusuri kedalaman maknanya ternyata bisa juga disepadankan

dengan pengertian pendidikan, apalagi berbagai istilah tersebut-dalam kenyataannya-digunakan dan dipopulerkan oleh mereka yang memiliki otoritas di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Atiyah al-Abrasyi, misalnya, menyepadankan kata *tarbiyah* (تربية) dengan pendidikan, tetapi Syed Muhammad Naquib al-Attas menyepadankan kata pendidikan dengan istilah *ta'dib* yang berarti pembentukan tindakan atau tata krama yang sasarannya hanya manusia (Al-Attas, 1979, p. 54).

Dalam memberikan arti *at-tarbiyah* para ahli pendidikan memiliki cara yang beragam oleh para pakar pendidikan, di antaranya:

- a. Menurut Al-Ghalayani (1949, p. 185), *at-Tarbiyah* mengandung akhlak mulia dalam diri seorang anak yang sedang tumbuh, memberi arahan dan nasihat sehingga memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang stabil yang mampu menghasilkan sifat-sifat yang bijaksana, serta cinta terhadap ciptaan dan berguna bagi umat manusia;
- b. Menurut Jalal (1977, p. 17), *at-Tarbiyah* adalah proses persiapan dan pemberian makanan pada tahap pertama pertumbuhan manusia, atau istilah yang digunakan saat ini, tahap bayi dan kanak-kanak;
- c. Menurut Ridha (1973, p. 262) *at-ta'lim* dapat diartikan sebagai proses penambahan berbagai ilmu ke dalam jiwa seorang individu tanpa batasan dan syarat tertentu;
- d. Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasy (Nasir, 2005, p. 50), *at-ta'lim* lebih spesifik dari pada *al-Ta'lim* karena *at-ta'lim* hanya upaya mempersiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu, sedangkan *at-tarbiyah* mencakup seluruh pendidikan.

Menurut pengertian di atas, *at-tarbiyah* atau pendidikan diartikan sebagai proses memberi petunjuk kepada orang yang belum mengetahui jalan, membimbing orang hingga mencapai kedewasaan, dan membimbing orang yang telah menjalani seumur hidup dan belum pernah dialami oleh pendidikan manusia. Pada

saat yang sama, kata pendidikan juga disamakan dengan ungkapan *ta'lim*, yang muncul dalam judul buku *Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum* karya Burhan al-Din al-Zarnuji. Nata (1997, p. 24) mengomentari karya Az-Zarnuji sebagai kitab yang banyak dipelajari di beberapa pesantren di Indonesia dan sangat mempengaruhi sikap dan cara berpikir santri dalam pengamalan dan penguasaan ilmu.

Sementara itu, Langgulung (1980, p. 94) merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses yang mempersiapkan generasi muda untuk memenuhi suatu peran, mentransmisikan ilmu dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan melalui aktivitas manusia untuk berbuat baik di dunia dan mencapai hasil di akhirat. Dalam hal ini, pendidikan Islam adalah proses mendidik individu berdasarkan ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berlatih untuk mencapai derajat yang tinggi untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan kemakmuran di akhirat.

Tafsir (1994, p. 24) mendefinisikan pendidikan Islam dengan kata "Islam". Menurutnya, kata "Islam" dalam "Pendidikan Islam" berarti suatu pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang bernuansa Islami. Jadi, pendidikan Islam berarti pendidikan yang berlandaskan Islam. Dalam pasal ini, Beliau mengartikan pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, Beliau berkeyakinan bahwa pendidikan Islam tidak lain adalah suatu tuntunan yang diberikan kepada seseorang agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam berarti membimbing seseorang untuk menjadi seorang Muslim sebanyak-banyaknya. Maka jelaslah bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik pada perkembangan yang maksimal sesuai dengan ajaran Islam atau peserta didik menjadi umat Islam yang sebesar-besarnya.

Pendidikan Islam, baik sebagai konsep maupun sebagai kegiatan pengembangan kepribadian yang utuh memerlukan landasan yang kokoh. Kajian pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari landasan

menurut sumber fundamental ajaran Islam (Rosyidi, 2004, p. 153). Menurut (Daradjat, 1994, p. 35) konsep pendidikan Islam merangkul kehidupan manusia secara utuh dan tidak hanya memerhatikan aspek akidah, ibadah dan tidak hanya akhlak, tetapi jauh lebih luas. dan lebih dalam dari itu. Berdasarkan perbedaan persepsi tentang pendidikan Islam di dunia profesional, menurut penulis dapat diuraikan konsep pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Pendidikan Islam mencakup semua dimensi kehidupan manusia sebagaimana yang didefinisikan oleh Islam.
- b. Pendidikan Islam meliputi kegiatan kehidupan di dunia dan di akhirat sesuai dengan kebutuhan agama.
- c. Dalam pendidikan Islam, perhatian diberikan kepada orang-orang dalam semua tindakan dan kegiatan yang memengaruhi mereka, dan hubungan dengan lingkungan lain dikembangkan.
- d. Pendidikan Islam berlangsung sepanjang hidup seseorang, dimulai sejak janin dalam kandungan dan berlanjut sampai akhir hayat.
- e. Lembaga dan sistem pendidikan Islam menghasilkan manusia yang baik dan mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Muhaimin (2006, p. 5) memberikan konsep pendidikan Islam yang terbagi menjadi tiga dimensi, pertama pendidikan Islam, yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta tersusun dari ajaran dan nilai-nilai inti yang terkandung dalam sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dapat berupa gagasan dan teori doktrinal yang didasarkan, dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber al-Qur'an dan Hadits. Kedua, pendidikan Islam, yaitu pendidikan dan nilai-nilai agama Islam, sehingga menjadi sikap dan gaya hidup seseorang. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam adalah segala jenis kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu individu atau sekelompok siswa untuk mentransmisikan atau mengembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya sebagai cara hidup yang memanasifestasikan dirinya dalam sikap. dan kecakapan hidup. Ketiga, pendidikan Islam adalah

proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dan pengikutnya, dan Islam sebagai agama, doktrin dan sistem budaya dan peradaban.

Pendidikan Islam adalah bagian dari semua ajaran Islam. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu membentuk pribadi hamba Allah SWT. yang selalu bertakwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam konteks sosial masyarakat, bangsa dan negara, orang yang bertakwa tersebut dapat menjadi *rahmatan lil-'alamin* baik secara kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam ini juga dapat disebut sebagai tujuan tertinggi pendidikan Islam (Azra, 2012, p. 8).

Landasan dasar pendidikan Islam utamanya terdiri atas dua macam (Daradjat, 1992, p. 35):

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab hukum, dalil dan petunjuk sudah selayaknya jika di dalamnya banyak memuat hal-hal yang menyangkut seluruh kehidupan manusia termasuk Pendidikan, sebagaimana dalam Al-Qur'an Q.S. an-nahlu/16:89 itu:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.

Kemudian dalam Q.S. al-Baqarah/2: 31 yaitu :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!"

b. As-Sunnah

as-Sunnah adalah setiap perkataan atau perbuatan Rasulullah. atau persetujuannya atas perkataan atau tindakan temannya karena dianggap baik. as-Sunnah dijadikan dasar pendidikan Islam lainnya karena Rasulullah SAW menempatkan pendidikan Islam karena Beliau mengajar membaca dan menghafal kitab suci Al-Qur'an dengan amalannya. Dalam pelaksanaan pendidikan Islam sebenarnya seseorang dapat memahami, menganalisis dan mengembangkan konsep-konsep dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep kerja dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan perkembangan lembaga dan sistem pendidikan. Meskipun konsep praktis untuk mendukung siswa disemua tingkatan lembaga pendidikan Islam dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan.

Masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan ada dan berkembang bersama-sama dengan proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia, meskipun pada hakekatnya keduanya merupakan proses yang sama (Zuhairini, 1991, p. 10). Tholhah & Barizi (2004, p.4) menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya harus mendukung nilai-nilai, tetapi pada saat yang sama menjadi ajakan untuk menghasilkan secara produktif dan menjawab kebutuhan zaman. Pendidikan Islam diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelayan spiritual, yang merupakan tugas yang sangat sempit, tetapi juga berpartisipasi dalam penyatuan global.

Pendidikan adalah kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan bertujuan untuk pengembangan penuh individu. Islam memberikan standar objektif bagi semua profesional Pendidikan (Ashraf, 1991, p. 23). Jadi pendidikan adalah pembinaan guru atau pembinaan

secara sadar perkembangan jasmani dan rohani anak didik ke arah pembentukan kepribadian yang utama (Tafsir, 1992, p. 24).

Jika pendidikan diartikan sebagai pembinaan intelektual, moral (spiritual) dan jasmani (psikis) yang menghasilkan manusia berperadaban tinggi yang memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat sebagai hamba Tuhan, maka pendidikan berarti pertumbuhan kepribadian (*personality*) dan dorongan perasaan, serta tanggung jawab masyarakat (*knowledge society*) (Ashraf, 1996, p. 23). Jadi pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk perkembangan seutuhnya dari seorang individu. Oleh karena itu, Islam memberikan standar objektif bagi semua profesional Pendidikan.

Achmadi (1984, p.14) menegaskan bahwa usaha Pendidikan bagi manusia seperti makanan yang menyediakan vitamin untuk pertumbuhan manusia. Pendidikan adalah suatu proses di mana kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat dengan mudah dipengaruhi dengan cara-cara yang baik, dengan alat-alat yang disiapkan dan dikendalikan oleh seseorang untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, Arifin mendefinisikan pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan yang dapat memberikan seseorang kemampuan untuk hidup sesuai dengan cita-cita Islam karena nilai-nilai Islam telah merasuk dan membentuk gaya hidupnya (Arifin, 1994, p. 10). Pendidikan Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT.

Islam telah menjadikan tujuan hidup yang paling seimbang dan inklusif, sehingga ulasan pada buku ini mengungkapkan bagaimana pandangan Islam dapat diterapkan pada masalah pendidikan melalui proses yang sesuai dengan metode umum ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam dalam teori-teorinya memuat kesepahaman pandangan (koherensi) dengan teori-teori ilmu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga dan sistem pendidikan. Maka jelaslah bahwa teori pendidikan Islam

mengandung nilai-nilai keilmuan pedagogik yang benar dalam dunia pendidikan.

2. Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sesuai dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW (Mukti 2007:1;). Perkembangan pendidikan Islam merupakan isu yang menarik (Nata 2001:6). Pada awal perkembangan Islam, belum ada lembaga pendidikan formal yang sistematis, dan pendidikan yang diberikan pada umumnya bersifat informal, yang meletakkan dasar-dasar keimanan Islam dan ibadah (Azra 2012:5). Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah pendidikan Islam nonformal dan formal (Subhan 2012:4). Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dari segi institusi maupun sistem pendidikan, karena pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaharuan perkembangan Islam.

Tahun 450 H, di kota Bagdad dibuka sekolah yang pertama dalam rangkaian sekumpulan besar sekolah yang didirikan oleh Nizamul Muluk seorang menteri kenamaan dari Dinasti Nizam Al Mulk. Sekolah tersebut telah merantai dunia Islam sampai ke pelosok negeri hingga ke dusun-dusun kecil. Kemudian usaha Nizamul Mulk dalam mendirikan sekolah-sekolah ini dicontohkan dan diikuti oleh raja-raja dan pembesar-pembesar (Syalabi n.d.:32).

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai bersamaan dengan kedatangan agama Islam, sekitar abad ke-7 M melalui jalur perdagangan di India Gujarat), Arab dan Persia (Wathani 2013:12). Mereka berdagang di Indonesia dengan mengembangkan rempah-rempah dan emas. Saat itu, Selat Malaka merupakan tempat terpadat di Nusantara (Amiruddin 2011:29; Daulay 2014:11). Pengaruh Islam yang awalnya hanya terjadi di daerah pesisir, lambat laun menyebar ke pedalaman (Mahmud Yunus 1990:7). Pada awalnya perkembangan pendidikan Islam di Indonesia bersifat tradisional,

tidak memiliki lembaga formal dan tidak sistematis seperti sekarang ini (Wathani 2013:18).

Pada hakikatnya, pendidikan Islam adalah pembentukan manusia ke arah yang dituju oleh Islam. Tujuannya agar manusia dapat mempertahankan kedudukannya yang luhur dan bentuk pribadinya yang baik, Tuhan telah menganugerahkan kepada mereka akal dan perasaan yang memungkinkan mereka untuk menerima dan mengembangkan pengetahuan serta untuk mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki. Artinya kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia disebabkan oleh (1) akal dan emosi, (2) ilmu pengetahuan, dan (3) budaya, yang kesemuanya itu berkaitan dengan ketakwaannya kepada Allah SWT (Daradjat 1992:4).

Perkembangan pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan lembaga pendidikan umum berbeda dengan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang beranekaragam menjadi lambang kemajuan perkembangan pendidikan Islam, baik secara kelembagaan maupun sistem pendidikan (Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Agama n.d.:46; Rahardjo 1985:156).

Sebelum abad ke-13 merupakan tahapan proses Islamisasi, abad ini dianggap sebagai masa tumbuhnya kerajaan Islam pertama di Indonesia (Tjandrasasmita 2000:118–38). Berkaitan dengan ini, (Daulay 2014:4), menyebutkan fase awal dimulai munculnya pendidikan informal dari anggapan bahwa pendidikan Islam pertama-tama melibatkan tahap pengenalan nilai-nilai Islam, diikuti dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam informal yang diawali dengan munculnya masjid, *dayah* dan surau. Ciri lain dari periode ini adalah kurikulum yang digunakan berorientasi pada pengembangan dan pendalaman agama serta pelaksanaan pembelajaran menurut sistem *halaqah*. Dengan demikian, reformasi pendidikan sedang dilakukan ke arah perkembangan global yang memecahkan masalah yang ada di dunia pendidikan dan memberikan harapan lebih untuk kemajuan masa depan dalam mencapai tujuan pendidikan (Sanaky and Lukman 2003:125).

Pendidikan Islam terus mengalami perubahan ketika Indonesia berada di bawah penjajahan. Perubahan yang sangat penting terjadi saat tokoh masyarakat kembali dari menyelesaikan kunjungan penelitian ke Timur Tengah (Daulay 2014:6). Bentuk perubahan mengubah sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di *Meunasah* (surau) dan kemudian menjadi Madrasah.

Menurut Karel A. Steenbrink, ada empat alasan yang melatarbelakangi perubahan implementasi pendidikan Islam. Pertama, upaya memurnikan ide-ide Islam dari Al-Qur'an dan hadits serta menolak berbagai bentuk Taqlid yang mengganggu umat Islam. Kedua, bentuk perlawanan masyarakat terhadap penguasa kolonial Belanda. Ketiga, upaya umat Islam untuk memperkuat organisasi dibidang sosial ekonomi. Keempat, ketidakpuasan mereka terhadap metode tradisional dalam mempelajari Al-Qur'an dan Hadits (Daulay 2014:32).

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan nasional (Rahim 2001:9). Sebagai warisan, pendidikan Islam merupakan misi sejarah yang harus didukung dan dikembangkan oleh umat Islam. Di sisi lain, sebagai keuntungan, pendidikan Islam yang tersebar diberbagai daerah membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menata dan mengelolanya sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Dari kedua perspektif tersebut, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi tempat ibadah umat Islam dan sekaligus bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, lembaga pendidikan agama termasuk dalam bagian dari sistem pendidikan nasional ini (Rahim 2001:10).

Perkembangan awal pendidikan Islam di Indonesia memberi gambaran yang penuh kesulitan karena masih dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda, sehingga usaha penyelenggaraan pendidikan Islam mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, baik negeri maupun swasta, usaha-usaha ini dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebagai sarana transformasi dan penyelamatan hidup manusia

sangat membutuhkan landasan yang kuat, arah yang jelas dan tujuan yang lengkap agar menjadi orang atau golongan yang berkualitas (berilmu), beriman dan bertaqwa (Mujtahid 2011:21–22).

Seirama dengan perkembangan tersebut, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Umat Islam ingin melestarikan gagasan formalism pendidikan, baik dari kalangan tradisional maupun dari kalangan kontemporer (Putra 2008:189). Setidaknya ada dua peran yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi pendidikan. Pertama, pendidikan mempengaruhi perubahan sosial, dan kedua, pendidikan harus memberikan kontribusi yang optimal dalam proses transformasi menuju terwujudnya masyarakat madani (Sanaky and Lukman 2003:125).

Kebijakan pemerintah dari masa kolonial, pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan hingga orde baru tampak mengabaikan pendidikan Islam karena "Indonesia bukanlah negara Islam". Namun pada akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan yang ideal, yaitu menciptakan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dengan demikian, jelas bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, antara lain faktor politik, sosial budaya, agama, intelektual, kelembagaan, dan sistem pendidikan Islam. Lembaga pendidikan sebenarnya memiliki fungsi strategis membentuk manusia yang bermoral dan bermartabat (Indra 2005:8).

Perubahan bentuk kelembagaan di atas mempengaruhi perubahan bentuk kurikulum, yaitu integrasi kurikulum umum ke dalam lembaga pendidikan Islam. Ia kemudian mendesak tokoh-tokoh Islam pribumi untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga pendidikan. Contoh: Shake M. Taibu Umaru. Pada tahun 1910, ia mendirikan Madrasah di Batusangkar. Tiga tahun kemudian, madrasah ditutup dan dibuka kembali oleh Mahmus Yunus pada tahun 1918. Tahun 1923 madrasah berubah nama menjadi Madrasah Diniyah

Pada tahun yang sama, Rangkayo Rahmah El Yunusiyah mendirikan Madrasah Puteri Diniyah di Padang Panjang. Sebelumnya tahun 1915, Zainudin Labai al-Yunusi mendirikan Madrasah Diniyah di Padang Panjang. Madrasah ini dikembangkan di Indonesia, sebagai bagian dari Pesantren atau Surau (Daulay 2014:96).

Setelah kemerdekaan, Indonesia menjadi negara berdaulat dengan pemerintahannya sendiri. Dilihat dari era politik Indonesia, era ini disebut orde lama, yaitu era Presiden Soekarno. Tentu sebagai negara yang baru bangkit dari keterpurukan penjajah, banyak aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah implementasi sistem pendidikan Islam dan pengembangan lebih lanjut. Ketertarikan pemerintah orde lama terhadap pendidikan Islam dirasakan melalui lahirnya berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur pendidikan Islam, baik dari segi kelembagaan, kurikulum, maupun nilai-nilai pendidikan Islam. Bentuk pertama dari fokus Orde lama pada pendidikan Islam adalah memberikan dukungan keuangan, seperti yang direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP). Secara umum, mereka yang telah membangun pijakan dalam masyarakat Indonesia harus mendapat perhatian dan dukungan sejati serta dukungan fisik dari pemerintah (Nizar 2009:345).

Tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama didirikan sebagai lembaga yang fokus pada perjuangan politik atas pendidikan Islam di Indonesia. Pendirian lembaga ini sebagai tanda dimulainya regulasi pendidikan Islam oleh pemerintah. Pada bulan Desember 1946, dua keputusan menteri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, mengatur tentang pelajaran agama di sekolah rakyat/sekolah dasar (SR/SD) dari kelas 4 sampai 6. Ketika kedaulatan Indonesia dipulihkan di seluruh Indonesia, lebih khusus pada tahun 1950, pendidikan Islam di seluruh Indonesia didirikan oleh komisi bersama yang dipimpin oleh Profesor Mahmud Yunus dari Kementerian Agama dan Bapak Hadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upaya tersebut sebagai ikhtiar untuk untuk membuat kemajuan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) pada Januari

1951 (I and Danasuparta 1976:121). Kemudian tahun 1952 dibentuk kepanitiaan yang bertugas menyempurnakan kurikulum, dipimpin oleh K. H. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama (Timur and Rakhman 1982:16).

Perkembangan selanjutnya adalah perubahan sistem pemerintahan (1966) yang memunculkan semangat “perbaikan sempurna” yang dipandang sebagai penyimpangan dari akar rumput (orde lama). Dalam upaya menciptakan aparatur pemerintahan yang kompeten dan bermoral (Orde Baru), para pemimpin nasional akhirnya menyadari bahwa kelangsungan hidup bangsa telah gagal di pusat pemerintahan negara. Yang lainnya adalah sebuah paradigma yang lahir dari keyakinan bahwa bangsa ini harus mempertahankan eksistensi visioner dengan membangun kekuatan persatuan melalui keragaman (Surakhmad 2009:16).

Bidang pendidikan di bawah rezim Orde Baru didefinisikan sebagai “ketuhanan Yang Maha Esa, ketaqwaan, akhlak, kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, teknologi, penguatan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan tanggung jawab. Namun dalam praktiknya, tujuan pendidikan yang dirumuskan, ditetapkan, dan diamanatkan oleh MPR tampaknya tidak terwujud di era Orde Baru. Penyebabnya adalah selain dipengaruhi oleh faktor intern (Republik Indonesia 1974), juga dipengaruhi oleh faktor ekstern (Surakhmad 2009:4).

Kebijakan politik tersebut berdampak besar terhadap arah sistem pendidikan nasional yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Orde Baru. Pendidikan yang maju selalu disertai dengan perubahan dan perkembangan yang mempengaruhi lingkungannya, terutama aspek sosial, politik dan agama. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Anggapan ini sangat orisinal karena didasarkan pada teori bahwa pendidikan dan bidang kehidupan lain di luar sistem pendidikan saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain sosial kependudukan, politik, dan sosial budaya agama (Suryadi and Tilaar 1994:3).

Kebijakan politik pendidikan Islam masa Orde Baru, terutama pada awal pemerintahannya, kurang memperhatikan perkembangan pendidikan Islam bahkan Kementerian Agama cenderung menunda pengembangan pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam harus mencerminkan peran pemerintah dalam pendidikan, baik dalam hal penentuan standardisasi mutu pendidikan yang diinginkan pemerintah untuk kebutuhan pembangunan, maupun dalam hal pengaturan dan pengawasan pendirian lembaga pendidikan negeri dan swasta. Nata (2010: 20–21) menjelaskan bahwa politik pendidikan Pemerintah Orde Baru tidak berbeda dengan kebijakan politiknya. Kebijakan politik ini sangat melemahkan umat Islam. Dengan demikian, bahwa kebijakan politik suatu negara akan sangat mempengaruhi pendidikannya.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam merupakan salah satu bentuk hegemoni pemerintah di bidang pendidikan, baik dari sisi pengaturan standardisasi kualitas pendidikan, maupun pengaturan dan pengawasan tentang pendirian lembaga pendidikan negeri dan swasta. Bahkan, dengan kebijakan ini pemerintah berkeinginan untuk menjadikan pendidikan satu atap dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan bidang pendidikan tampaknya menjadi kewenangan otoritatif Pemerintah Orde Baru (Republik Indonesia 1974).

Kebijakan tersebut membuktikan bahwa masyarakat belum dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diberikan tanggung jawab dan kewenangan sepenuhnya untuk mengawasi, menetapkan kebijakan dibidang pendidikan sebagai bentuk kontrol negara terhadap pendidikan. Kebijakan ini berimplikasi bagi pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, karena adanya keinginan pemerintah untuk mengalihkan penyelenggaraan pendidikan Islam dari Kementerian Agama ke Kementerian Pendidikan Nasional.

3. Pendidikan Islam di Aceh

Sikap akomodatif ini menjadi dasar munculnya berbagai kebijakan yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional, termasuk Aceh khususnya sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, adalah disahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan. Lahirnya kebijakan tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadikan pendidikan Islam mengalami perubahan yang signifikan dalam melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikannya yang berimplikasi pada pendidikan Islam terintegrasi secara kuat dalam sistem pendidikan nasional.

Aceh merupakan wilayah yang terkenal di dunia (Lombard 2007:61), dan merupakan wilayah puncak kerajaan Islam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637), yang mengkhususkan diri dalam bidang agama. Oleh karena itu, Aceh, di masa lalu diberikan kekhususan (Hasjmy 1995:65) dengan nama "Daerah Istimewa Aceh" (Idris and dkk 2002:3).

Keistimewaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, dari segi sejarah, banyak sejarawan Islam yang tidak secara implisit menyebutkan bahwa Seminar Medan yang diadakan pada tahun 1963 di Aceh, bahwa Aceh mengklaim sebagai daerah masuknya Islam pertama kali di Nusantara. Hasjmy (1993) menyatakan bahwa kerajaan Islam tertua di Nusantara adalah Kerajaan Peureulak, yang berdiri pada 1 Muharram 225 H. atau 840 M. Kedua, secara sosiologis, Aceh dikenal sebagai "Serambi Mekah". Ketiga, dari perspektif penerapan hukum Islam.

Dalam lintasan sejarah Aceh, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak awal berdirinya hingga abad 21 merupakan proses yang panjang dan sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena lembaga-lembaga Islam awal dan sistemnya tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang cukup dinamis dan dilatarbelakangi oleh kehidupan sosial, politik dan keagamaan. Namun, keberadaan pendidikan Islam di Aceh telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan

pendidikan Islam. Tumbuhnya berbagai lembaga Islam di Aceh telah melahirkan banyak ulama, pejuang dan tokoh bangsa (Steenbrink 1984:32). Bahkan keberadaannya telah ikut membakar semangat perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Berbagai lembaga pendidikan Islam melahirkan alumni yang telah memainkan peranan strategis dalam kemajuan pendidikan bangsa.

Pemberian status istimewa kepada Aceh, yaitu otonomi luas, mencakup nilai desentralisasi, termasuk desentralisasi pendidikan. Hal ini karena dalam keistimewaan memberikan kesempatan kepada Aceh untuk mengembangkan pendidikannya sesuai dengan Keunikannya. Keunikan ini tercermin dalam aspek kelembagaan dan sistem pendidikan. Pertanyaan yang muncul adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan Islam, bagaimana perkembangannya, dan perubahan apa saja yang berkembang di Aceh sebagai bentuk keistimewaan? Sebagai hasil dari penelitian sejarah pendidikan Daerah Istimewa Aceh, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang dijalankan oleh pemerintah Aceh sejak diberikan keistimewaan adalah *dayah*, madrasah dan perguruan tinggi Islam, ketiga lembaga pendidikan tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian Agama (Zakaria Ahmad 1984:80).

Terlepas dari persoalan tersebut, secara kelembagaan, pendidikan Islam di Aceh siap bersaing dengan pendidikan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan bermunculannya lembaga *dayah* dan madrasah yang bercorak modern dengan mengintegrasikan berbagai keilmuan dalam pembelajarannya. Selain itu, pemberian peluang pada *dayah* tradisional (*salafi*) untuk melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam. Di samping itu, terdapat *dayah* yang membuka diri dengan menerapkan kurikulum umum di samping kurikulum *dayah* (Amiruddin 2013:49).

Kekhasan pada kurikulum pendidikan Islam di Aceh dilakukan secara integral melalui sistem pendidikan yang memberi peluang seluas-luasnya untuk internalisasi nilai-nilai Islam dalam keseluruhan proses pendidikan pada semua jenis dan jenjangnya. Di samping

itu, penentuan Aceh sebagai daerah Istimewa yang memuat nilai-nilai desentralisasi telah menghantarkan pendidikan Islam di Aceh mempunyai karakteristik ke-Aceh-annya. Karakteristik tersebut lebih dinampakkan lagi implementasi kurikulum muatan lokal pada tiap tingkatan sekolah dan madrasah yang ada di Aceh.

Fenomena perkembangan lembaga pendidikan Islam dari tahun ke tahun menghendaki perubahan yang komprehensif karena dinamika perkembangan masyarakat membutuhkan sistem yang memiliki keseimbangan antara kebijakan, perkembangan lembaga pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya sistem pendidikan Islam beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu lembaga pendidikan Islam harus dapat berbenah diri dengan melakukan transformasi diberbagai aspek. Pada masa orde baru yang menjalankan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah melahirkan peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus tentang pendidikan Islam, baik yang berkaitan dengan kelembagaan maupun sistem pendidikan, sehingga pendidikan Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Dengan dasar yang kuat dan diatur oleh pemerintah, maka pendidikan Islam memiliki ruang gerak dan posisi yang strategis dalam perkembangannya. Aceh merupakan wilayah yang mempunyai wewenang pelaksanaan pendidikan Islam baik secara desentralisasi maupun kebijakan-kebijakan yang bersifat otonomi. Dengan demikian, Aceh mempunyai peluang untuk menyelenggarakan pendidikan Islam dengan karakteristik kedaerahan.

Peluang tersebut menarik yang harus direspons oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam, dan sebagai upaya perubahan yang merupakan langkah *transformatif* bagi pendidikan Islam (Rembangy 2010:191). Tentunya ini akan memberi dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam baik dari aspek kelembagaan dan sistem pendidikan. Adanya perubahan

dalam kedua aspek tersebut, tentu terdapat kemajuan yang dicapai pendidikan Islam di Aceh (1966-1998).

4. Transformasi Pendidikan Islam

Pendidikan merupakan proses fundamental yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Transformasi pendidikan sangat urgen menyangkut proses peningkatan mutu dan pemberdayaan pendidikan, penguatan eksistensi lembaga dan sistem pendidikan, pemenuhan regulasi pendidikan nasional yang selama ini lebih banyak ditentukan oleh figur dan ketokohan, bukan sistemnya (Rembangy, 2010, p. 18).

Sehubungan dengan kajian tersebut, Rembangy juga menjelaskan bahwa pendidikan transformatif adalah pendidikan yang dapat berubah dan berpijak pada nilai-nilai inti pendidikan dasar yang menjadi pedoman hakikat kehidupan seseorang. Dengan kata lain, pendidikan transformatif adalah pendidikan yang menitikberatkan pada kemandirian siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya baik di kelas maupun di lingkungannya, cara siswa belajar dalam kelompok, cara mandiri, proaktif, kreatif dan produktif. dan mereka memiliki rencana masa depan dalam hidup mereka. Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas bangsa. Oleh karena itu, kemajuan suatu bangsa dapat ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Kemajuan pada banyak negara di dunia tidak terlepas dari kemajuan yang mereka mulai dan capai dalam pendidikan (Maksum & Ruhendi, 2004, p. 227).

Memimpin suatu lembaga pendidikan bukanlah tugas yang mudah, apalagi mengelola tidak berarti hanya melestarikan yang telah ada, mengelola Pendidikan berarti melaksanakan pengembangan lebih lanjut yang sistematis dan sesuai dengan pandangan ideologis (visi dan misi) lembaga dan pendidikannya. sistem dan mencerminkan pertumbuhan (*growth*), perubahan (*change*) dan pembaharuan (*reform*) (Fadjar, 1998, p. 91).

Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab atas pendidikan dituntut untuk memiliki kedalaman normatif dan ketajaman visi. Pertama, diperlukan agar manajemen pendidikan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam tentang manusia yang ingin dihasilkannya. Diperlukan perhatian yang jeli agar pendidikan selalu berkesinambungan seiring dengan perubahan yang terjadi. Kedua, pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi terkait dengan kegiatan sosial budaya yang lebih luas, sehingga pelatihan selalu dikaitkan sebagai sistem terbuka, sehingga pimpinan pelatihan harus terbuka dalam pengembangan pelatihan.

Selain itu, menurut Rembangy, perubahan pendidikan memiliki arah dan tujuan yang jauh dari krisis pendidikan dan permasalahan internal dan eksternal. Namun, transformasi pendidikan yang kompleks tidak berarti akhir dari segalanya. Karena hidup itu dinamis, ia juga terus berubah. Perubahan pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas (Rembangy, 2010, p. 90).

Proses pendidikan adalah proses pembebasan dan sekaligus proses pengenalan batas-batas manusia. Jadi orang dipandu oleh norma-norma untuk menjalani keberadaannya yang terbatas. *Education for Change* menekankan pentingnya partisipasi sesama manusia. Banyak yang mengatakan bahwa pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Sulit untuk melakukan perubahan tanpa diawali dengan pendidikan, dan pendidikan untuk perubahan tidak akan terjadi jika tidak didahului dengan perubahan. Secara umum mutu pendidikan dicirikan oleh empat kriteria, yaitu Pertama, kualitas siswa. Kedua, penggunaan dan pemilihan sumber daya pendidikan yang berkualitas. Ketiga, proses belajar mengajar. dan keempat, hasil pendidikan.

Zainuddin (2008, p. 3) menjelaskan ada empat aspek tujuan pembangunan pendidikan, yaitu Pertama, pembangunan pendidikan harus dapat menjamin kesempatan belajar bagi seluruh

masyarakat. Kedua, pembangunan pendidikan harus menjadi hal yang penting, yaitu proses pendidikan yang akan dilaksanakan dan lulusannya harus mampu memenuhi kebutuhan industri. Ketiga, pembangunan pendidikan harus fokus pada kualitas pengajaran dan lulusan. Keempat, pengembangan pendidikan harus mengarah pada terciptanya manajemen pelatihan yang efektif, dan hal ini tercapai ketika tujuan pelatihan tercapai.

Transformasi pendidikan Islam merupakan proses mengakses perubahan dengan prinsip-prinsip dasar dan potensi manusia terhadap kebebasan yang sejalan dengan Al-Qur'an Q.S. ar-Ra'du/13: 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ عَمَّا لَهُم مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ
وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Selanjutnya Q.S. al-Kahfi/18: 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah.

(Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.

Strategi perubahan pendidikan pada dasarnya mempunyai satu tujuan, agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan setidaknya memiliki dua peran dalam proses perubahan pedagogik yang harus diperhatikan, yaitu Pertama, pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sosial (Sanaky, 2003, p. 125). Kedua, pendidikan harus secara optimal mendorong proses perubahan menuju terwujudnya masyarakat madani.

Perubahan pendidikan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Reformasi yang menekankan pentingnya reformasi untuk perubahan yang memperhatikan kebutuhan masa depan. Sejak awal abad ke-20, umat Islam di Indonesia telah melakukan reformasi dalam bentuk lembaga pendidikan, sistem pendidikan, dan organisasi keagamaan, dan perubahan ini memiliki motivasi yang sangat pragmatis, yaitu mengimbangi perkembangan yang pesat, berorientasi eksklusif. Pendidikan umum. dengan kebutuhan kolonialisme (Ma'arif & dkk, 1991, p. 131).

Proses pendidikan dalam konteks perubahan pendidikan Islam adalah perubahan pendekatan untuk kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan melalui proses pendidikan dan dalam konteks kelembagaan dan dalam sistem pendidikan Islam itu sendiri. Terwujud dalam pola perilaku ibadah merupakan hasil pendidikan Islam untuk meramalkan masa depan umat Islam yang harus menghadapi berbagai perubahan dan tantangan sosial. Nilai inti dari pendidikan itu sendiri.

Pendidikan Islam di Aceh (1966-1998) merupakan produk sejarah Aceh yang sarat dengan kekacauan. Pendidikan Islam yang ditawarkan di *dayah*, madrasah dari tingkat rendah hingga tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam dengan dinamika kehidupan, dan aspek sosial, politik dan keagamaan yang berbeda menyebabkan lembaga-lembaga ini mengalami perubahan yang agak mendasar

untuk memantapkan diri sebagai lembaga pendidikan Islam. modern dan mampu menjawab berbagai kemajuan, sehingga keberadaan lembaga ini strategis bagi perkembangan pendidikan masyarakat.

Secara umum, perubahan dipahami sebagai perubahan dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Perubahan pendidikan Islam dapat terjadi pada lembaga dan sistem pendidikan. Dalam kajian teoritis, perubahan masyarakat dianggap sebagai perubahan budaya atau sosial terkait dengan perkembangan perubahan status bentuk dan eksistensi pesantren dalam dinamika kehidupan masyarakat. Pertama, mengacu pada perubahan sistem pendidikan yang terkait dengan kesamaan gagasan dan nilai-nilai kelompok masyarakat. Kedua perubahan ini saling terkait.

Menurut Furchan (2004, p. 9), pendidikan Islam tampaknya masih harus melakukan perubahan ke depan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang dihadapinya. Tantangan yang paling nyata adalah globalisasi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya kemajuan sektor telekomunikasi. Oleh karena itu, jika pendidikan Islam terus mengalami stagnasi dan tidak mengikuti dinamika perkembangan manusia, maka tidak menutup kemungkinan citra pendidikan Islam tertinggal, tidak mampu meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Melihat pentingnya perubahan dari sudut pandang perubahan yang membawa arti penting (*meaning*) bagi siswa dalam pembelajaran.

Perubahan pendidikan memiliki arah dan tujuan dari krisis internal dan eksternal dan masalah pendidikan. Perubahan pendidikan Islam baik yang bersifat institusional maupun sistemik memiliki visi yang jelas, memberikan trend yang dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik, visi pendidikan Islam yang efektif dan transformasi, dapat dikembangkan dari aspek fundamental filosofi, visi dan misi, tujuan, kurikulum, metodologi, manajemen pendidikan dan paradigma pendidikan Islam (LAL, 2010, p. 27).

Menurut Tholkhah & Barizi (2004, p. 12), ada tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memajukan pendidikan Islam, yaitu Pertama, sistem pendidikan Islam masih bertumpu pada otoritas lama dan bersifat konservatif. Kedua, institusi pendidikan penuh dengan peneliti non-profesional. Ketiga, keberadaan lembaga pendidikan Islam yang masih belum mampu merespon perkembangan global dan kebutuhan peserta didik di masa depan.

Azra (1999, p. 33) menguraikan tentang variable-variabel yang terlibat dalam perubahan sistem pendidikan adalah:

- a. Modernisasi administrasi. Modernisasi adalah perubahan bentuk diferensiasi sistem pendidikan untuk mengantisipasi dan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, teknis, dan administratif yang berbeda.
- b. Diferensiasi struktural. Distribusi dan diversifikasi lembaga pendidikan sesuai dengan tugasnya. Dalam masyarakat modern, institusi pendidikan umum tidak lagi cukup. Secara lebih spesifik, sistem pendidikan Islam harus memberikan peluang bahkan mensyaratkan dibentuknya lembaga pendidikan khusus yang bertujuan untuk menggantikan diferensiasi sosial ekonomi yang terjadi.
- c. Ekspansi Kapasitas. Memperluas sistem pendidikan untuk menyediakan sebanyak mungkin siswa dengan pendidikan yang memenuhi kebutuhan berbagai sektor masyarakat

Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar dapat diajukan, apa yang akan berubah? Di mana dan kemana arah pedagogi transformatif ini? Dalam konteks ini ditelaah perubahan menuju kemajuan berupa lembaga pendidikan dan sistem pendidikan Islam. Perubahan yang terjadi tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan yang menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan Islam, faktor politik, faktor sosial, faktor religi dan faktor spiritual yang berkembang dalam kehidupan masyarakat agar mampu menghadapi krisis yang dihadapinya, baik yang dihadapi maupun yang dihadapi di dalam dan di luar, sehingga pendidikan berperan sebagai fasilitator perubahan.

Menurut Fadjar (1998, p. 4) bahwa lembaga dan sistem pendidikan Islam memperoleh kepercayaan masyarakat untuk membimbing peserta didik pada posisi ideal tertentu berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut, Pertama, sistem dan lembaga pendidikan cenderung mencerminkan keadaan masyarakat yang berlapis-lapis dan mencerminkan realitas sekolah dan pendidikan tinggi. Kedua, sekolah dan perguruan tinggi dengan kemampuan yang baik dalam mengalokasikan lulusan sesuai harapan masyarakat semakin diberdayakan dalam posisi yang lebih kuat sebagai mekanisme distribusi yang proporsional.

Subhan (2012, p. 47) menyatakan bahwa pendidikan di negara-negara Islam memiliki dua tipologi modernisasi, Pertama, transformasi lembaga pendidikan tradisional seperti madrasah menjadi modern terutama melalui perpaduan kajian umum modern dengan perubahan kelembagaan. Kedua, pendirian lembaga pendidikan baru sebagai sarana percepatan modernisasi. Mesir, misalnya, mendirikan lembaga pendidikan pada masa Muhammad Ali dan Ismail dengan tujuan memperkuat sistem militer, sekaligus berusaha mereformasi lembaga pendidikan tradisional melalui inkorporasi teknologi.

Pendidikan Islam telah mengalami perubahan besar sejak awal perkembangannya, selain itu, perbedaannya terutama didasarkan pada konten pendidikan (kurikulum), tenaga pengajar dan fase pertumbuhan (Nakosteen, 1994, p. 62). Kuttab mengalami perluasan fungsi, bukan hanya untuk belajar tulis baca, tetapi juga untuk belajar Al-Qur'an. Pada masa awal kuttab masih bersifat sederhana, kemudian, muncul ide pembaharuan kuttab (Mahmud Yunus, 1990, p. 40). Pada mulanya, pendidikan kuttab berlangsung di rumah para guru (mu'allim, mu'addib) atau dikalangan sekitar Masjid (Asari, 2007, p. 25). Kuttab jenis pertama adalah kuttab mengajarkan tulis-baca dengan teks dasar puisi-puisi Arab, dan dengan sebagian besar gurunya adalah nonmuslim (setidaknya pada masa yang paling awal). Kuttab kedua berfungsi sebagai tempat pengajaran Al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam.

Transformasi Kuttab, sebuah sekolah dasar tradisional di Mesir, diprakarsai oleh Khadave Ismail. Baru di era Khadave Isma'il, kuttab mendapat sentuhan modernisasi. Berbeda dengan Muhammad 'Ali, Khadave Ismail (1863-1879 M) menjadikan Kuttab sebagai dasar pengembangan pendidikan dasar. Ia menjadikan dana wakaf sebagai sumber pendanaan untuk pengembangan kuttab. Yang terpenting, ia juga membawa pendidikan ke Mesir untuk benar-benar publik, bukan hanya untuk keperluan militer dan birokrasi. Untuk melaksanakan program pendidikan tersebut, Ismail memperkuat Diwan al-Madaris dengan mengubahnya menjadi Nazarat al-Ma'arif al-Umumiyyah (Departemen Pendidikan) dengan 'Ali Mubarak sebagai Menteri Pendidikan (Subhan, 2012, p. 53).

Pada saat yang sama, sekolah Masjid dapat disebut sebagai tempat pendidikan tinggi dan pendidikan tinggi untuk studi ilmu agama. Awalnya Masjid juga digunakan sebagai pendidikan dasar, namun perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Masjid juga menawarkan bidang studi yang sangat berbeda setidaknya selama beberapa abad, sebagai tempat ibadah dan sebagai universitas yang berfungsi secara harmonis. Umumnya Masjid dibangun sebagai tempat ibadah dengan fungsi akademik (Asari, 2007, p. 45).

Kebutuhan akan pendidikan mendorong umat Islam Indonesia untuk mengambil alih lembaga-lembaga keagamaan dan sosial yang ada (lembaga sosial keagamaan adat) dan mengalihkannya ke lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa, umat Islam memindahkan lembaga agama Hindu-Buddha ke pesantren, umat Islam Minangkabau mengadopsi Surau sebagai warisan budaya masyarakat setempat sebagai lembaga pendidikan Islam, dan demikian pula masyarakat Aceh memindahkan lembaga komunal ke Meunasah sebagai lembaga pendidikan Islam (Asrobah, 1999, p. 144).

Oleh karena itu, wajar jika Ziemek (1983, p. 17) menyatakan bahwa para petani berasal dari pra-Islam dan memiliki kesamaan dengan agama Buddha sebagai hipotek. Jauh lebih awal dari yang diharapkan, yaitu dipertengahan abad ke-9, Islam merambah ke

kawasan Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa pendidikan agama yang dilembagakan selama berabad-abad berkembang paralel dengan ini. Pendidikan formal dan informal merupakan salah satu kekuatan yang berpengaruh dan faktor strategis sosial budaya, khususnya budaya yang mampu mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan dan globalisasi.

Pendidikan formal dan informal merupakan salah satu kekuatan yang berpengaruh dan faktor strategis budaya masyarakat, khususnya budaya yang dapat mempersiapkan masyarakat terhadap perubahan dan globalisasi. Pendidikan Islam menunjukkan berbagai perkembangan yang signifikan dalam berbagai bentuk kelembagaan, menurut Muhaimin (2004, p. 80) ada dua ciri dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam yang paling awal yaitu:

- a. *Isolatif-Tradisional* dalam artian tidak mau menerima apapun yang berbau Barat (jajahan) dan mencegah masuknya pengaruh ide-ide modern ke dalam Islam, terbukti dalam pendidikan petani tradisional yang hanya terdapat dalam Islam membedakan ilmu agama dan ilmu. Pendidikan umum tidak diberikan sama sekali. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk menyiapkan calon kiyai atau ulama yang hanya menguasai urusan agama;
- b. Sintesis, yaitu menemukan antara formula lama (pesantren) dan gaya baru (model pendidikan kolonial atau barat) berupa sekolah atau madrasah. Dalam pelaksanaannya gaya ini mencakup beberapa variasi model pendidikan Islam, yaitu Pertama, model pendidikan madrasah mengikuti bentuk pendidikan barat, terutama dalam sistem pendidikan klasikalnya, namun isi pendidikan menjadi semakin penting dalam studi agama Islam. Kedua, model pendidikan madrasah mengutamakan mata pelajaran agama, namun mata pelajaran umum terbatas juga diajarkan. Ketiga, model pedagogik madrasah memadukan muatan keagamaan dan non-keagamaan secara lebih seimbang. Keempat, model pendidikan sekolah mengikuti gubernur dan

diperluas dengan memasukkan beberapa mata pelajaran agama.

Muhaimin (2004, p. 82) menjelaskan dua sistem pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan dalam masyarakat Islam, yaitu Pertama, sistem pendidikan dan pelatihan sekolah negeri yang sekuler tidak mengenal ajaran agama yang dianut oleh pemerintah kolonial Belanda, dan kedua, sistem pendidikan dan pelatihan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat muslim. model terisolasi-tradisional dan sintesis dengan beberapa model Pendidikan.

Mengingat pentingnya lembaga dan sistem pendidikan dalam pendidikan Islam, dalam hal ini Mukti (2007a, p. 27) menyatakan, Pertama, lembaga adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, keagamaan dan lain-lain, lembaga merupakan unsur penting dalam masyarakat yang berusaha untuk mencapai tujuan individu. Contoh institusi dalam pengertian ini adalah transmisi karakteristik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lembaga pendidikan dengan demikian adalah lembaga pendidikan agama (lembaga keagamaan) dan lembaga ilmu (institusi ilmiah), yang memenuhi tugas pendidikan lembaga keagamaan. Kedua, suatu sistem terdiri dari beberapa elemen atau komponen yang bekerja sama sebagai satu kesatuan.

Istilah sistem memiliki dua arti; Pertama, sistem terdiri dari entitas-entitas yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan, dan kedua, sistem adalah sekumpulan ide yang saling terkait satu sama lain. Dijelaskan juga bahwa sistem terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan saling terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai kebutuhan. Jadi sistem pelatihan yang dimaksud paling tidak memiliki enam faktor pendidikan, yaitu (1) Tujuan, (2) Pelatih, (3) Materi, (4) Kurikulum, (5) Metode Pengajaran, dan (6) Alat dan Perlengkapan Pendidikan.

BAB II KILAS SEJARAH ACEH

1. Asal Usul Kerajaan Aceh

Posisi geografis Aceh sangat strategis, terletak di ujung utara bagian barat pada 2°-6° dan 95°-98° bujur timur dengan luas wilayah 57.365.57 km² (Sofyan & Ismail, 2002a, p. 1). Daerah ini merupakan wilayah lalu lintas Internasional dan menjadi pintu gerbang ke barat kepulauan Indonesia. Aceh juga merupakan salah satu daerah yang memiliki historis yang kompleks, hal ini terekam melalui perannya dalam lembaran perjuangan kemerdekaan.

Kebesaran tersebut dapat dilihat dari (1) eksistensi dan pengaruh kerajaan Islam Aceh di nusantara serta dunia (2) tradisi keilmuan juga kekayaan khazanah keislaman yang telah menjadi barometer perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara. Aceh pernah menjadi salah satu kerajaan besar Islam di dunia pada masa Sultan Iskandar Muda (Thala & dkk, 2010, p. 3).

Sejak zaman neolitik, Selat Malaka adalah jalur penghubung utama antara dua pusat budaya, yaitu Cina serta India juga menjadi jalur penting bagi migrasi orang-orang Asia, penyebaran budaya asli Amerika, sekaligus sebagai jalur perdagangan dunia. Maka Aceh sudah dikenal sebagai lalu lintas internasional sekitar abad ke-1 Masehi (Burger & Prayudi, 1962, p. 14). Aceh disebut *Lamuri* oleh orang-orang Arab dan *Lambri* oleh Marcopolo (Yamin, 1953, p. 50).

Sementara Lombard menjelaskan bahwa sejak abad ke-6, Dinasti *Liang* sudah banyak membicarakan tentang kerajaan *Poli* (Ibrahim & dkk, 1991, p. 35). Menurut sebagian ahli, kerajaan *Poli* berada di sebelah utara Sumatera (Lombard, 2007, p. 56). Lebih lanjut, (Yamin 1953:50) menjelaskan bahwa nama kerajaan *Poli* sangat penting bahkan disandingkan dengan Bali, Brunai (Kalimantan Utara) dan Sumatera Utara.

Pada abad ke-13, teks-teks Cina memuat nama tempat *Lan-wu-li* atau *Lam-li*, yang mengingatkan akan *Lamuri* (Lombard, 2007, p. 57). Ketika Marcopolo tiba di Jawa *Minor* (Sumatera) pada tahun 1292, ia menemukan delapan kerajaan di antaranya adalah *Lamiri*. Kerajaan *Lamiri* tunduk pada Kaisar Cina dan mereka diwajibkan membayar upeti (Ibrahim & dkk, 1991, p. 37).

Asal nama Aceh juga terdapat dalam cerita suku bangsa *Pegu* (Hindia belakang), yang menceritakan perjalanan Budha ke Indochina dan Kepulauan Melayu (Amiruddin, 2008, p. 6). Mereka melihat pancaran cahaya di atas gunung pulau Sumatera sehingga mereka berseru "*Acchera bata*" (*Atjaram bata bho* = alangkah indahnyanya). Jadi dari istilah *Acchera bata* itulah kemudian menjadi sebutan untuk Aceh (Amiruddin, 2008, p. 7).

Pendapat lain mengemukakan bahwa nama Aceh sudah tua sekali, sejak abad ke-13 M. Mayoritas masyarakat Aceh adalah muslim. Hal ini diberitakan oleh Marcopolo pada saat singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera Utara. Terdapat enam pelabuhan dagang yaitu *Perlec* (Perlak), *Basman*, *Sumatra*, *Dagroian*, *Lambri*, dan *Fansur* (Sofyan & Ismail, 2002a, p. 11).

Rashiduddin seorang penulis Parsi ternama tahun 1310 M, menyebutkan bahwa tempat-tempat penting di pulau *Lamiri* yang besar itu, selain Perlak dan Samudera adalah Aru dan Tamiang (Ibrahim & dkk, 1991, p. 37). Pada akhir abad ke-15, pusat kerajaan *Lamiri* dipindahkan ke *Meukota Alam* (Sekarang Kota Alam) yang terletak pada sisi utara *krueng* Aceh. Pemindahan ini disebabkan serangan dari Pidie dan pendangkalan muara sungai yang mengalir melalui pusat kerajaan *Lamiri* sehingga tidak baik untuk pelayaran. Sejak itu *Lamiri* lebih dikenal dengan nama *Kerajaan Kota Alam* (Ibrahim & dkk, 1991, p. 42). Namun sebelum 1500 M, Aceh belum dikenal oleh orang asing, hal ini dikarenakan letaknya lebih dari satu mil ke pedalaman. Sehingga tidak banyak disinggahi oleh orang-orang asing yang melakukan pelayaran antara India dan Cina.

Walaupun kerajaan Aceh lebih muda dari kerajaan *Lamiri*, namun kerajaan Aceh telah tumbuh dan berkembang dengan Raja pertamanya Sultan Mahmud Syah yang berkedudukan di Kandang (tidak begitu jauh dari kota Banda Aceh sekarang). Dalam hikayat Aceh disebutkan bahwa Sultan Mahmud Syah memindahkan istananya ke *Daruddunia*, sesudah 43 tahun memerintah di Kandang. Sebuah catatan Aceh yang dipelajari oleh Hoesein Djajadiningrat menyebutkan bahwa Sultan Johan Syah, yang memerintah pada tahun 1205 M (601 H) dan berkedudukan di Kandang, merupakan Sultan Aceh pertama yang beragama Islam bergelar *Gazi Djohansyah*. Dengan demikian, Aceh telah tumbuh dan berkembang sampai penghujung abad ke 15 M, menjadi pusat Tamaddun Islam Asia (Yamin, 1953, p. 48).

Menjelang abad ke 15 dan awal abad ke 16, Portugis datang untuk menjajah kerajaan Aru (Pulau Kampai), Pase, Pidie dan Daya. Portugis juga mendirikan kantor-kantor dagang untuk menempatkan pasukan mereka (Hasjmy, 1977, p. 14). Sejalan dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan di Aceh dan meningkatnya lalu lintas perhubungan dan perdagangan internasional, maka tumbuh pulalah kota-kota di sepanjang pantai utara Aceh, seperti kota *Perlak*, kota *Samudera Pasei*, kota *Pidie*, kota *Lamuri* dan kota *Bandar Aceh Darussalam* (Sartono, 1977, p. 148).

Dalam penelusuran sejarah, belum ditemukan secara kongkrit data yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan tentang latar belakang masyarakat Aceh. Namun demikian kita dapat menduga berdasarkan data yang telah terhimpun, bahwa latar belakang masyarakat Aceh sangat diwarnai oleh percampuran genetik dari berbagai wilayah. Percampuran tersebut karena hubungan perdagangan antara Arab, Parsi, Eropa dan lain-lain dengan nusantara telah berjalan sejak lama. Hal ini diperkuat oleh pernyataan (Jacob 1984:90) bahwa latar belakang penduduk Aceh merupakan perpaduan atau percampuran daerah dan darah dari berbagai etnis, ada yang berasal dari Arab, Habsyi, Bugis, India, Batak, Nias, dan Minangkabau.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Aceh telah bersinggungan dengan *Hinduism* dalam waktu yang cukup lama, sehingga dalam ritual adat istiadat, bekas-bekas pengaruh Hindu masih ada, misalnya dalam acara *Peusijek*. Fakta lain yang menunjukkan hubungan antara Aceh dan India adalah keberagaman penduduk di Kerajaan Aceh. Sebagian penduduk asli berasal dari masyarakat Hindu *Keeling*, *Madras*, dan *Malabar* yang kemudian menjadi *Mualaf* di Aceh. Selain itu, penduduk Aceh juga berasal dari Arab, Persia, Turki, Mantea dan Batak (Sofyan & Ismail, 2002a, p. 3).

Semua Saudagar yang datang ke Aceh belum beragama Islam, namun secara berangsur-angsur berbaur dan hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh dengan ikatan pernikahan antara satu dengan lainnya, dan akhirnya masuk Islam (Hasjmy, 1993, p. 20). Jadi jelaslah, bahwa Aceh dikenal oleh dunia luar sejalan dengan berkembangnya agama Islam (Amiruddin 2008:12).

Aceh pada zaman kerajaan sudah sangat ramai dikunjungi para nelayan lebih-lebih lagi pada masa kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (Ibrahim & dkk, 1991, p. 74) dan pengganti-penggantinya sampai ratusan tahun lamanya (M. Isa Sulaiman, 1977, p. 60).

2. Aspek Perekonomian

Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membangun kehidupan ekonomi masyarakat Aceh berasal dari Cina, India dan Arab, sebagai pusat kebudayaan Asia saat itu. Pada masa itu, Asia memiliki dua jalur perdagangan internasional yaitu darat dan laut (Burger & Prayudi, 1962, p. 14). Saudagar yang datang ke Aceh disambut dengan hormat dan penuh rasa persaudaraan, sikap hormat terhadap tamu tidak sebatas untuk perniagaan dan menjadi rakyat Aceh, namun juga diterima dengan baik untuk menjadi pemimpin di Aceh (Ruslan & Matsyah, 2013, p. 16). Sehingga keadaan ini sangat mendukung pertumbuhan dan kehidupan ekonomi masyarakat (Ibrahim & dkk, 1991, p. 56).

Penghasilan utama masyarakat Aceh adalah berdagang, bercocok tanam, pertukangan, seperti tukang mas, tukang periuk, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang tenun. Ditambah lagi, Kerajaan Aceh (Perlak) dikenal sebagai wilayah sumber hasil pertanian berupa lada, rotan, kapur barus, kemenyan, daging dan sutera (Ruslan & Matsyah, 2013, p. 110). Hasil pertanian ini juga diekspor ke Turki, Arab, Persia, Malaya, Jawa dan Siam (Tjandrasasmita, 2000, p. 7). Demikian pula, Aceh mengimpor rempah-rempah dan pakaian dari India, serta porselen dari Cina (Ibrahim & dkk, 1991, p. 84). Kapal asing yang memasukkan barang ke pelabuhan Aceh dikenakan pajak pemasukan sebesar 5% dari harga barang tersebut (Veth, 1873, p. 55).

Semua kegiatan perdagangan di kerajaan Aceh dipusatkan di Ibukota Kerajaan, sehingga kota Banda Aceh *Dar-as-Salam* menjadi ramai melebihi kota pelabuhan lainnya di pantai bagian Timur dan Barat pulau Sumatera. Ibnu Batutah dan Marcopolo pernah memberitakan kesibukan suasana pelabuhan Pasai dengan banyaknya kapal dagang dari berbagai negara yang singgah dan bertransaksi di Pasai (Ruslan & Matsyah, 2013, p. 111). Bukti lain yang dapat ditelusuri bahwa di Kerajaan *Pasai* pernah beredar berbagai mata uang asing sebagai alat tukar pada pasar perdagangan dalam negeri, selain mata uang resmi kerajaan (Zainuddin, 1971, p. 71).

3. Struktur Sosial Masyarakat

Bentuk wilayah dalam susunan struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah *Gampong* (kampong). *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Pemerintah Aceh, 2003, p. 3). *Keuchik* dibantu oleh Perangkat *Gampong* dan *Teungku Meunasah*. Setiap *Gampong* memiliki *meunasah* sebagai tempat dimana *Keuchik* dan *Teungku Imeum*

mengendalikan pemerintah *gampong* (Soelaiman & dkk, 2010, p. 69).

Imeum Meunasah memiliki tugas dan fungsi sebagai pemimpin kegiatan keagamaan, ibadah, peningkatan pendidikan agama bagi anak/remaja dan masyarakat, penyuluhan terkait kesejahteraan *Meunasah*/Mushalla dan kegiatan terkait lainnya penerapan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Wilayah yang lebih luas dari *Gampong* disebut dengan *mukim* (Sofyan & Ismail, 2002b, p. 15), biasanya kemukiman terdiri dari 4-5 *gampong*, dan dikepalai oleh seorang *Imuem mukim* (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penataan Mukim Di Aceh, 2019, p. 3). Untuk wilayah yang lebih luas dari *mukim* disebut *nangroe* dikepalai oleh seorang *Uleebalang*. *Uleebalang* menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh. Dan pemerintahan *Uleebalang* memangku jabatan secara turun-temurun di daerahnya (Said, 2007, p. 209), yang disahkan dengan bukti stempel kerajaan Aceh (*Cap Sikureng*) (Ibrahim & dkk, 1991, p. 78). Sultan dibantu oleh lima orang yang terdiri dari seorang bendahara/sekretaris dan empat orang syahbandar (Ibrahim & dkk, 1991, p. 79).

Kerajaan Aceh juga memiliki beberapa lembaga atau badan yang turut mendampingi Sultan Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Di antara lembaga-lembaga itu adalah yaitu: (1) *Balai Rung Sari*, yaitu tempat bermufakat empat orang *Uleebalang* (hulubalang empat) dan tujuh orang ulama, serta menteri-menteri kerajaan Aceh. (2) *Balai Gading*, yaitu tempat mufakat dari delapan orang *Uleebalang* dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri kerajaan Aceh. (3) *Balai Majelis Mahkamah Rakyat*, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak tujuh puluh tiga orang yang datang dari tujuh puluh tiga *mukim*, tiap-tiap *mukim* diwakili satu orang.

Pengaruh nilai-nilai Islam sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah kesultanan Aceh, sejak agama Islam masuk ke daratan Aceh, bahkan mempengaruhi wilayah nusantara. Struktur kerajaan Aceh dalam konteks sistem pemerintahan berdasarkan *Qanun Meukuta Alam*, berakar pada susunan *gampong-*

gampong dan *mukim* (federasi *gampong-gampong*), *nanggroe* (kecamatan), *sagoe* (federasi beberapa *nanggroe*) dan langsung ke kerajaan/negara. Struktur Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga menjadi suatu kultur pemerintah.

4. Aspek Adat-Istiadat

Perkembangan adat-istiadat dalam masyarakat Aceh, sejak dahulunya unik dan menarik untuk dikaji, karena masyarakat Aceh merupakan percampuran dari berbagai suku dan *etnis*, telah melahirkan suatu sistem kehidupan budaya dan adat-istiadat yang berbeda-beda, namun tetap dalam bingkai yang penuh dengan nilai-nilai Islami. Menurut, Hoesein Djajadiningrat, dalam T. Alamsyah, dkk, (ed), Adat-Istiadat dalam "Peraturan di dalam Negeri Aceh *Bandar Dar As-Salam*, lebih dikenal dengan nama "*Adat Meukuta Alam*" atau "*Adat Pomeureuhom*", mengandung susunan Pemerintah, hukum dan adat memperlakukan hukum Islam (T, 1990, p. 9).

Adat-istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku antar generasi dalam suatu masyarakat, di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut (Soelaiman & dkk, 2010, p. 69). Adat-istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi suatu kultur yang hidup dan berkembang keberadaan dan fungsinya sebagai landasan berpikir dan bertindak.

Bagi masyarakat Aceh, adat-istiadat tidak bisa terlepas dari ajaran Islam, pernyataan ini sesuai dengan pribahasa Aceh yang mengatakan, "*Hukom ngen adat hanjeut cree bue lagei zat ngon sipheut*" (hukum agama dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti benda dengan sifatnya). Karena itu telah dibakukan dalam *Narit Maja* "*Adat bak Poeteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lamkseumana*" (Sofyan & Ismail, 2002a, p. 4).

Penuturan Darwis Soelaiman, bahwa kepercayaan dan keyakinan hidup masyarakat Aceh yang disimbolkan pada *Meunasah* dan Masjid, menjadi tolok ukur dalam mencari identitas keberadaan komunitas Aceh, di manapun mereka berada. Lantas secara otomatis, Islam menjadi pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan. Masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat kepada ajaran Islam.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh, dibangun berdasarkan ajaran Islam, maka kerajaan Aceh *Darussalam* dinyatakan sebagai negara yang berbudaya hukum, yang dalam *Qanun al-Asyi*, disebut juga dengan *Adat Meukuta Alam* yang bersumber dari Al-Quran, al-Hadis, Ijma' ulama dan Qias menetapkan ada empat sumber hukum, bagi kerajaan Aceh, yaitu (Sofyan & Ismail, 2002a, p. 13):

- a. Kekuasaan Hukum (*Yudikatif*) yang dipegang oleh *Kadhi Malikul Adil*.
- b. Kekuasaan Adat (*Eksekutif*) yang dipegang oleh *Sultan Malikul Adil*.
- c. Kekuasaan Qanun (*Legislatif*) yang dipegang oleh *Majlis Mahkamah Rakyat* (Dewan Perwakilan Rakyat).
- d. Kekuasaan Reusam (*Hukum Darurat*) yang dipegang oleh *Penguasa Tunggal*, yaitu Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu Negara dalam keadaan perang.

Maka dalam menjalankan empat jenis hukum tersebut, Sultan dan Ulama harus menjadi *Dwi Tunggal* artinya Sultan dan Ulama tidak terpisah, maka semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan pada hukum Allah SWT. Demikian pula adat-istiadat tidak boleh ditinggalkan. Untuk kemajuan masyarakat dan pelaksanaan hukum adat, kerajaan membuat peraturan dan mengangkat pejabat yang ahli dalam bidangnya, antara lain, *Hukom Adat Blang* (peraturan mengenai persawahan), *Hukom Adat Seuneubok* (peraturan mengenai perkebunan), *Hukom Adat Laut* (Peraturan mengenai penangkapan ikan), *Hukom Adat Glee* (Peraturan mengenai kehutanan), dan *Hukom Adat Geumeubeu*

(Peraturan mengenai perternakan) (Hasjmy, 1993, p. 113). Berbagai peraturan tersebut dalam rangka pengaturan dan pelaksanaan adat-istiadat bersendikan pada ajaran Islam.

5. Aspek Seni dan Budaya

Saat kerajaan Aceh telah menggantikan posisi kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan maupun pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan Aceh menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan terkemuka di Timur Tengah, yaitu kerajaan Turki.

Pada masa itu pula banyak ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam datang ke Aceh. Di antara ulama tersebut adalah *Muhammad Azhari* yang mengajar ilmu *metafisika*, *Syeikh Abdul Khair Ibnu Hajar* ahli *pogmatic* dan *mistik*, *Muhammad Yamami* ahli dalam *ilmu usul*, *Syeikh Muhammad Jailani Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Hamid* dari *Gujarat*, yang mengajar *logika* (T. , I. Alfian, 1972, p. 496).

Seni budaya Aceh dilandasi oleh ajaran Islam. Seni budaya Barat tidak begitu nampak dalam budaya Aceh, sebab ada unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selama abad ke-19, seni budaya di Aceh, meliputi sistem pendidikan, *seni sastra*, *seni tari* dan sebagainya masih mengikuti pola-pola yang sudah ada dan berkembang pada masa kejayaan Islam kerajaan Aceh Darussalam. Di samping terdapat pengaruh yang diterima dari negeri-negeri Islam, seperti dari Parsi, Turki, dan sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur seni yang berlandaskan Islam dalam perkembangannya (Amiruddin, 2008, p. 11).

Pada abad ke-19 di Aceh, seni sastra lebih menonjol dibandingkan dengan cabang seni lainnya. *Syair-syair* perang (hikayat perang) diciptakan untuk menumbuhkan semangat berjuang. Hikayat yang sangat dikenal dalam masyarakat Aceh adalah *Hikayat Prang Sabi*, *Hikayat Prang Gomeuni* dan *Syair prang Aceh*. *Hikayat Prang Sabi* dikarang oleh *Teungku Chiek Pante kulu* (Teungku Muhammad) sekitar tahun 1808 M (Said, 2007, p. 548).

Kerajaan Aceh Darussalam menggunakan tiga bahasa resmi, yaitu bahasa Aceh (bahasa nasional), Bahasa Melayu (bahasa perhubungan antar bangsa kepulauan nusantara dan Asia Tenggara), dan bahasa Arab (bahasa agama/ilmu pengetahuan (Hasjmy, 1993, p. 251). Sedangkan kesustraan Aceh berbentuk prosa berkembang pesat dalam bahasa Melayu. Surat menyurat resmi dan tata bahasa negara ditulis dalam bahasa Melayu. Undang-Undang, peraturan-peraturan pemerintah, *Qanun* dan *Reusam* semua ditulis dalam bahasa Melayu, termasuk buku-buku ilmu pengetahuan sebahagian besar dikarang dalam bahasa Melayu hanya sebagian kecil ditulis dalam bahasa arab (Hasjmy, 1993, p. 252). Jelaslah bahwa budaya Aceh bersumber kepada nilai-nilai syariat Islam (Sofyan & Ismail, 2002a, p. 81).

Tujuan dari pengembangan seni dan budaya ini adalah untuk mengembangkan potensi diri, melakukan proses *internalisasi*, dan penghayatan nilai-nilai yang menjadi pembentukan kepribadian yang baik di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Semua seni budaya Aceh mencerminkan pesan moral dan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga akan membentuk sebuah peradaban masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan keislaman (Hasjmy, 1993, p. 253).

6. Aspek Agama

Masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan yang terjadi pada beberapa negara Timur Tengah, seperti Irak, Mesir, Persia, dan beberapa negara lain yang terjadi melalui peperangan atau penaklukan wilayah (Daulay, 2009, p. 11). Sehingga dengan alasan inilah para *mubaligh* berperan ganda dalam melaksanakan penyebaran Islam di Indonesia, yakni sebagai pedagang sekaligus da'i (pendakwah).

Islamisasi di Indonesia berkembang dengan tiga metode, pertama, penyebaran Islam dilakukan dalam suasana damai, kedua, disebar oleh pendakwah dari India dan Arab, dan ketiga, penyebaran dilakukan dengan berperang melawan pemerintahan

kafir, *Ketiga*, disebarkan dengan kekuatan untuk berperang melawan pemerintahan kafir. Proses tersebut tidak mungkin berjalan menurut pola yang seragam untuk seluruh nusantara (Martin, 2005, p. 187).

Tradisi pendidikan Islam telah lama terbangun. Hal ini dapat dilihat dari mata rantai intelektual muslim yang tumbuh bersinergi dengan ulama Timur Tengah. Hubungan tersebut disokong oleh tiga pilar gerakan sosialisme religius. Pertama, gerakan sosial untuk perjuangan tatanan struktural yang berkeadilan. Kedua, gerakan humanistik atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar primordial agama, suku, ras, dan kelompok. Gerakan humanistik ini muncul atas kritik terhadap kecenderungan tirani rasionalitas dan fatalism pada gerakan *ritualistic-skriptural*. Ketiga, gerakan religiusitas untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi oleh semangat pembebasan dan humanistik (Muhidin M. Dahlan, 2001, p. 21).

Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga kekuatan yang harus diperhitungkan. Islam adalah kekuatan destruktif yang pengikutnya menghancurkan tatanan sosial yang timpang. Islam juga merupakan kekuatan yang membebaskan suatu negara dari penjajahan. Sejak awal kelahirannya, Islam telah menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang mampu mengubah tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan martabat deklarasi universal (Ali & Effendy, 1986, p. 32).

Islam menjadi agama dominan di Indonesia dan telah memperoleh peradaban dengan warna dan gayanya sendiri, yang berakar kuat dalam tradisi panjang sejak zaman Nabi. Proses Islamisasi ini tidak terlepas dari peran Ulama Timur Tengah khususnya Haramain dan Ulama Nusantara (Azra, 2013, p. 1). Jadi, Islam adalah kekuatan yang membebaskan bangsa dari penjajahan dan fakta ini terbukti menjadi kekuatan yang dapat mengubah umat manusia dan segala bentuk tatanan kehidupan yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Abad ke-20 disebut sebagai abad nasionalisme (Suhartono,

1994, p. 5). Ditandai oleh kebangkitan perubahan kesadaran politik negara yang penuh gairah dan semangat (Alfian, 1983, p. 97).

Pada abad ke-19, gerakan perjuangan kemerdekaan dilakukan secara bersama-sama dengan Ulama, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Chik Di Tiro, Teuku Umar, dan pahlawan lainnya di seluruh nusantara (Sitorus, 1947, p. 6). Berdirinya beberapa negara Islam di kepulauan Melayu Indonesia merupakan bukti kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Islam telah mempersatukan suku bangsa di nusantara. Oleh karenanya Islam telah menjadi kekuatan politik yang berkelanjutan di mana kesatuan budaya dapat dicapai (Bakti, n.d., p. 18).

Beberapa faktor yang mendorong lahirnya organisasi-organisasi Islam yang sejalan dengan kebangkitan nasional Indonesia, dilatarbelakangi oleh (Mukti, 2007, p. 19):

- a. Kacaunya kehidupan beragama Islam yang murni di Indonesia;
- b. Lembaga pendidikan agama tidak efisien;
- c. Gencarnya gerakan misionaris Katolik dan Protestan;
- d. Sikap acuh tak acuh kaum intelektual dan cenderung merendahkan Islam;
- e. Situasi Politik, Ekonomi dan Sosial di Indonesia sebagai akibat penjajahan.

Faktor lain adalah karena sistem pendidikan Islam di Indonesia selama berabad-abad mengisolasi diri, tidak produktif dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satunya adalah *Dayah*. *Dayah* merupakan tempat pendidikan tradisional di Aceh. Masyarakat berbondong-bondong mengkaji Islam di *dayah*. Namun setelah peperangan Diponegoro, Belanda mulai mengawasi dengan ketat pendidikan di *dayah*. Akibat tekanan dan halangan dari Pemerintah Belanda, maka *dayah* bersikap nonkooperasi terhadap semua hal yang berbau kolonialisme, seperti politis dan kultural. Akibatnya penolakan apriori ini, maka sistem pendidikan di *dayah* ketinggalan zaman. Oleh karenanya, *dayah* dilekatkan dengan stigma kaku, picik,

fanatik, dalam arti yang kurang baik. Hal ini berlangsung sampai awal abad ke-20 (Wiryosukarto & Hamzah, 1962, p. 32).

Kemunculan Madrasah berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan Islam. Karena dapat mengatasi kelemahan-kelemahan pada lembaga pendidikan tinggi sebelumnya, seperti masjid, *Bayt al-Hikmat*, Khanaqah atau Ribath, Bimaristan, dan Observatorium. Nizamiyah tidak hanya merupakan salah satu organisasi nasional resmi untuk menghasilkan pekerja, tetapi juga memiliki pedoman resmi dan beroperasi di bawah undang-undang dan peraturan yang serupa dengan yang kita kenal sekarang (Mukti, 2007, p. 260).

Belanda kemudian memperkenalkan sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat. Pada perkembangan berikutnya, sistem pendidikan Belanda ini turut mempengaruhi sistem pendidikan di *dayah* (Moh.Kasim et al., 1997, p. 46). Bentuk sistem pendidikan Belanda terdiri dari dua pola, yaitu sistem pendidikan sekuler artinya tidak memasukkan mata pelajaran agama di dalam kurikulum sekolah. *Kedua*, sistem pendidikan agama yang hanya diberikan pada pendidikan di *dayah* saja (Muhaimin, 1999, p. 78).

Tahun 1931 M, Gubernur Jenderal Belanda, *Van De Boss* mengeluarkan kebijakan tentang pendirian sekolah-sekolah Gereja di setiap daerah karesidenan (Hasbullah, 1995, p. 51). Kebijakan Belanda ini didasari oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap rakyat Aceh yang terkenal sangat mengedepankan agama dalam semua sisi kehidupan masyarakatnya (Hasbullah, 1995, p. 52).

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, pada tahun 1882, Pemerintah Belanda mendirikan badan khusus untuk mengawasi kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam, yang disebut *Ordo Imam*. Atas saran lembaga ini, Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang mengatur bahwa siapapun yang menyebarkan ajaran atau bacaan agama Islam harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari para Pemerintah Belanda. Berikutnya tahun 1925 M, Pendidikan agama Islam tunduk pada aturan yang lebih ketat.

Artinya, tidak semua orang bisa mengajarkan ajaran Al-Qur'an kecuali mereka mendapat semacam rekomendasi atau sertifikat dari Pemerintah Belanda. Tahun 1932 M, dikeluarkan ordonansi sekolah liar (*wilde school ordonantie*) yang berisi tentang kekuasaan untuk membasmi dan menutup madrasah yang tidak sah dan madrasah yang mengajarkan untuk membenci Pemerintah Belanda. Penekanan Belanda terhadap pendidikan Islam tidak hanya berhenti di kebijakan tersebut, namun berbagai upaya lain juga mereka tempuh, seperti mematikan dan menghalang-halangi kegiatan-kegiatan Islam (Sulaiman, 1997, p. 36).

Pada tatanan kerajaan Aceh, Sultan memberikan jabatan/posisi tinggi kepada Ulama sebagai ahli hukum, cendikiawan, menteri, dan *Uleebalang* (Amiruddin, 2003, p. 7). Dalam sejarah Aceh, dari proses awal Islamisasi hingga saat ini, Ulama telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Karena pusat Islam berada di daerah pesisir Aceh, misalnya, dapat diamati di kota-kota pesisir Pasai, Perlak, dan Banda Aceh. Dari Kerajaan Pasai hingga Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan selalu didampingi oleh para ulama besar (Shabri A., 2003, p. 3).

Ulama berfungsi mencerdaskan masyarakat tentang berbagai isu keagamaan yang berkembang terkait dengan masalah akidah, hukum dan pendidikan Islam. Selain itu, ulama juga berperan sebagai hakim wali, menikahkan orang yang tidak diasuh, dan menyelesaikan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hukum (agama) (Shabri A., 2003, p. 4).

Pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam tidak ada memisahkan antara agama dan negara. Ulama terlibat langsung dalam pemerintahan sesuai dengan tugas yang diembannya. Selain tugas formal dalam pemerintahan, ulama kebanyakan tersebar di setiap desa (*gampong*) untuk mendidik masyarakat yang diselenggarakan pada *meunasah* dan *dayah*.

Pada saat itu, hubungan Ulama dan masyarakat belum ditandai dengan kepemimpinan vertikal struktural. Posisi kepemimpinan

dalam hubungan dengan masyarakat tidak didominasi oleh Ulama, dan pemimpin dominan pada saat itu berada di tangan Sultan atau *Uleebalang*.

Ulama mempunyai pengaruh spiritual yang besar di tengah masyarakat muslim. Hal ini, karena Ulama adalah ahli agama yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, menjaga diri dari kelakuan yang tercela dan sikap yang menurunkan marwah diri, sekaligus pembimbing masyarakat. Maka setiap Raja pasti didampingi oleh ulama sebagai *Qadhi Malik al-Adil* (Amiruddin, 2003, p. 9). Peran Ulama pada tingkat *sagoe* dan daerah *Uleebalang* adalah mendampingi Panglima *sagoe* dan Panglima *Uleebalang* dalam bidang tertentu sesuai wewenang pemerintahan negeri (Shabri A., 2003, p. 2).

Menurut penuturan Sulaiman pada tanggal 12 Februari 2016, Ulama Aceh yang tercatat sangat gigih memerangi Pemerintah Belanda adalah *Teungku Chik Di Tiro*, *Teungku Chik Tanoh Abee*, *Teungku Chik Tanoh Mirah*, *Teungku Chik Aneuk Galong*, *Teungku Chik Samalanga* dan *Teungku Chik Matang*.

Bersama para pejuang, mereka melawan penjajah Belanda berpuluh tahun lamanya, dengan korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak. Dan secara frontal perang berangsur mengendur di tahun 1904 M. namun demikian, perang gerilya secara perorangan dan berkelompok secara sporadik tetap berlangsung sampai Jepang masuk ke daratan Aceh (Veer, 1985, p. 367).

Pengaruh reformasi diperkenalkan oleh para pemuka agama di Jawa seperti HOS. Cokroaminoto, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Zamzam, A. Hassan, Sheikh Ahmad Surkarti, Ulama Sumatera Barat seperti Abdullah Ahmad dan Abdul Karim Amrullah, dan Ulama Aceh seperti Sheikh Abdul Hamid, Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, Tengku Muhammad Daud Beureueh.

Reformasi yang mereka sampaikan disalurkan melalui organisasi atau perserikatan. Misalnya, Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al Ir-syad, Sumatera Thawalib dan

PUSA. Organisasi tersebut merupakan wadah penampungan dan penyebaran pembaharuan pemikiran Islam di Aceh (Sulaiman, 1997, p. 42).

Sarekat Islam dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam kontemporer yang berpengaruh besar dalam dakwah masyarakat Indonesia. Selain kegiatan pendidikan dan keagamaannya, Sarekat Islam juga dikenal sebagai gerakan politik berbasis Islam. Bahkan bisa dikatakan sebagai pelopor gerakan massa di Indonesia. Memang benar Budi Utomo sudah ada sebelumnya, tetapi keanggotaannya terbatas pada pejabat pemerintah. Liga Muslim memiliki anggota di seluruh Indonesia dan di semua tingkatan (Meuraxa, 1976, p. 4).

Karya Muhammadiyah berfokus pada tiga bidang, yaitu pendidikan, dakwah dan aksi sosial. Dalam bidang keagamaan, khususnya dalam pemanfaatan *ijtidad* untuk penegakan hukum dan pemberantasan *taqlid*. Dalam hal ini, peran Majelis Tarjih adalah memberikan bimbingan dan penelitian filantropi untuk menentukan hukum perilaku berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Majelis Tarjih kemudian menetapkan hukum-hukum perilaku yang mereka yakini lebih kuat menurut Al-Qur'an dan Hadist. Warna dan kemajuan pendidikan dapat dilihat dalam kegiatan penelitian Majelis Tarjih tentang pembaruan agama dan pengembangan pedagogi.

Perubahan yang dilakukan oleh Sarekat Islam dan Muhammadiyah sangat signifikan dan tercatat dalam sejarah pergerakan dan kemajuan di Aceh. Karya dan pelayanannya telah menarik perhatian masyarakat umum dan semangat Jihad dan Ijtihadnya telah menginspirasi orang untuk bergerak maju. Lebih penting lagi, pemahaman dan cita-cita perubahan dan kemajuan organisasi ini, terutama dibidang agama dan pendidikan, tersebar luas di kalangan masyarakat Aceh, menciptakan masyarakat Islam dalam negara Islam (Adan, 2005, p. 60).

Kemajuan pemikiran di Aceh merupakan kegiatan pembaharuan di bidang agama. Ada banyak sarjana yang nama dan prestasinya terkenal, dan mereka menjadi bahan penelitian akademis yang

tiada habisnya di Aceh. Aceh telah menjadi pemimpin dalam studi Islam karena banyak ide-ide Ulama telah diterima dengan baik terutama untuk membangun lembaga pendidikan dan membangun masyarakat religius yang pada akhirnya menghasilkan generasi dengan jiwa dan semangat memajukan pendidikan di masa depan.

7. Aspek Politik

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, institusi politik Islam telah tumbuh dan tangguh mengakar di nusantara. Pada masa itu, umat Islam memiliki kemerdekaan dalam menentukan kebijakan politik. Namun kebebasan politik ini mulai terganggu ketika intervensi bangsa Eropa terhadap institusi-institusi Islam setempat. Mudah-mudahan umat Islam diintervensi karena terjadi persaingan politis dan ekonomis di antara kerajaan-kerajaan Islam.

Selain itu, penguasa kolonial juga menggunakan kesempatan dalam hal perbedaan pemahaman agama antara Santri dan Abangan. Jatuhnya sistem politik Islam ke tangan Belanda, sangat mempengaruhi situasi sosial umat Islam yang hidup dalam bayang-bayang politik pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk mengatur kembali hubungan dengan Aceh, tanpa kehilangan kemerdekaan, dengan memberikan jaminan keamanan kepada awak kapal dan para pedagang (Reid, 2008, p. 13).

Abad ke-19 merupakan masa kurang baik bagi perjuangan politik Islam di seluruh dunia, pasalnya beberapa negara yang telah dikuasai oleh Islam saat itu mulai melemah. Mesir dikuasai oleh imperalisme Perancis dan Inggris. Dan karena kondisi inilah, Belanda menyerang Aceh (Djamil, 2009, p. 394). Nasib yang sama juga dirasakan oleh kerajaan-kerajaan Pantai Timur yang terlibat dalam perjanjian Anderson tahun 1823. Pemerintah Inggris membatalkan sepihak perjanjian tersebut. Meskipun mereka tidak melakukan apapun untuk memberi tahu penguasa Melayu, pada tahun 1824 M dihidupkan kembali di *Straits Settlements* sebagai senjata untuk

melawan Belanda yang terus mengembangkan sayap kekuasaannya (Reid, 2008, p. 14).

Situasi ini sesuai dengan rencana besar Portugis untuk menaklukkan Aceh, yang didorong oleh faktor geopolitik, perdagangan dan agama, dan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka memiliki semangat fanatisme Islam (Dan Batu et al., 2014, p. 96). Kendala terbesar yang dirasakan kolonial Belanda pada wilayah jajahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah sikap fanatisme Islam yang luar biasa. Ulama menggunakan *dayah* atau tempat pengajian lainnya sebagai wadah untuk memperkokoh pengikutnya menghimpun kekuatan dalam menghadapi Belanda. *Teungku Chik Di Tiro* menginsafkan dengan lisan dan tulisan semangat berperang dengan ideologi Islam (I. Alfian, 1987, p. 151)

Setelah peperangan selama 18 hari, pada tanggal 23 April 1873, semua pasukan Belanda dapat dimusnahkan dari bumi Aceh. Terlebih dengan meninggalnya Jenderal Kohler semakin melemahkan semangat prajurit Belanda. Sementara itu, pembakaran Masjid Raya Baiturrahman, menyulut semangat juang rakyat Aceh semakin membara. Rakyat Aceh menganggap bahwa Belanda tidak sekadar penjajah negara tapi lebih dari itu sebagai imperialisme agama. Sehingga Gubernur Jenderal Belanda, yakni Raffles menyebut Aceh sebagai "*umpung geumeutoe*" (sarang tawon) (Said, 2007, p. 378). Belanda tidak pernah gagal untuk menyerang wilayah lain dari Indonesia dengan kekuatan yang sama saat mereka menyerang Aceh. Namun Ternyata Belanda menderita kekalahan pahit, sehingga Gubernur Jenderal membuat sayembara hadiah kepada rakyat Aceh yang mampu menyerahkan pemimpin Aceh (I. Alfian, 1987, p. 152).

Menurut Snouck Hugronje, politik Islam harus ditumpas habis-habisan sehingga pemerintah Belanda bekerjasama dengan *Uleebalang* karena dianggap lebih tradisional dan sekuler. Maka kepada *Uleebalang* yang mendukung imperialisme diberikan status yang setara dengan Bupati Kepulauan Jawa atau Penghulu di Minangkabau (Misri A. Muchsin, 2007, p. 82). Snouck Hurgronje seorang orientalis yang ahli dalam Islam. Ia merancang "Teori Islam

Politik” yang dibedakannya menjadi tiga kategori, yaitu (1) bidang agama murni atau ibadah; (2) bidang sosial kemasyarakatan, dan (3) bidang politik dengan tuntutan alternatif pemecahan yang berbeda. Pertama, kolonial memberikan kebebasan kepada umat Islam sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Hindia Belanda. Kedua, Pemerintah Indonesia harus menggunakan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat agar lebih kolonial lebih mudah mendekati rakyat. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus mencegah segala upaya yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Islamisme (Suminto, 1985, p. 12).

Islam politik ini melahirkan dua wilayah yang berbeda secara geografis tetapi berhubungan secara spiritual, yakni salah satunya di Eropa Barat Laut dan yang lainnya di Asia Tenggara. Hurgronje menjelaskan bahwa Islam yang dianut mayoritas Hindia Belanda begitu kaku (*rigid*) sehingga tidak *up to date* dengan zaman baru. Oleh karena itu, tanpa sistem pendidikan universal berskala besar dan landasan keagamaan yang netral, pemerintah tidak dapat membebaskan umat Islam dari agamanya.

Snouck Hugronje berada di Aceh dan mendapatkan kepercayaan dari tokoh Aceh, ulama dan lainnya. Dia secara bertahap belajar Aceh saat dia belajar bahasa Melayu, Jawa dan Sunda dasar selama satu setengah tahun di Jawa. Kepiawaian Snouck dalam bidang Islam dan bahasa berhasil menemukan rekonsiliasi dengan para pemimpin Aceh, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa *uleebalang* yang melakukan kompromi dengan Belanda. musuh ulama. Belanda tanpa kompromi. Sikap ini berujung pada kompromi oleh elit sosial, yang kemudian berujung pada Perang Cumbok sebagai revolusi sosial melawan elit bangsawan birokrasi oleh Ulama. Isu perpecahan ulama dibaca oleh para ulama pada saat itu, sehingga para ulama mulai menyerukan untuk membentuk suatu organisasi dan mempersatukan masyarakat (Veer, 1985, p. 152).

Snouck memiliki kemampuan komunikasi dan keahlian dibidang agama Islam sehingga sukses membuat pendekatan dengan Pemuka-Pemuka Aceh. Hal ini ditandai dengan sebahagian

Uleebalang mau berkompromi dengan kolonial Belanda. Sikap tersebut telah melahirkan kompromis elit sosial. Inilah penyebab terjadinya perang *Cumbok*. Perang *Cumbok* dikenal sebagai *revolusi* sosial Ulama yang menentang elit bangsawan/birokrat.

BAB III

ORGANISASI POLITIK ISLAM DI ACEH

Akibat dari pergolakan berkepanjangan yang terjadi, maka sebagai upaya mempertahankan ketauhidan, maka Ulama dan Tokoh-tokoh pergerakan Islam di Aceh mendirikan beberapa organisasi politik Islam, tujuannya tidak lain adalah menyelamatkan agama dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari imperialisme. Beberapa organisasi politik Islam yang didirikan di Aceh adalah:

1. Syarikat Islam (SI)

Partai Syarikat Islam (SI) adalah organisasi politik berdasarkan Islam. Yang bertujuan mensejahterakan rakyat dalam bidang ekonomi. Tidak sebagai partai politik. SI didirikan pada tahun 1911 M oleh Haji Samanhudi di Solo (Kepartaian Di Indonesia, 1952, p. 24). Kehidupan politik dan penindasan terhadap rakyat oleh penjajah Belanda menjadi alasan utama pendirian SI. Beranggotakan 50 orang, H.O.S. Cokroaminoto berdedikasi memastikan bahwa anggota mampu menciptakan kerukunan antar umat Islam dan saling membantu (Kepartaian Di Indonesia, 1952, p. 26).

SI sebenarnya memasukkan tujuan politik dalam gerakannya, namun Undang-Undangnya tidak pernah diperbolehkan untuk menyebutkan karakter politik. SI berkembang sangat pesat diseluruh wilayah nusantara, dan hal ini mengganggu kepentingan Belanda, sehingga pergerakan SI diberbagai wilayah dibatasi dan dipecah sesuai dengan karakteristik wilayah. Inilah salah satu kebijakan *Divide et Impera* yang diusung oleh G. G. Idenburg saat itu (Sitorus, 1947, p. 15).

Tahun 1914 M, SI baru masuk ke Aceh, yang digawangi oleh Abdul Manaf dan Marah Husein. SI tentu berkembang pesat di Aceh hingga pulau terluar Aceh. Ulama dan *Uleebalang* yang memiliki

pemikiran progresif bergabung dalam SI ini. Seperti Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga, Teungku Meunasah Kumbang Aceh Utara, Teungku Hasballah Indrapuri, Teungku Syekh Ibrahim dan Teungku Abdul Wahab Seulimeum di Aceh Besar, mereka menerima SI dengan sangat terbuka, karena SI berlandaskan Islam (Hasjmy, 1980, p. 30). Menurut perspektif masyarakat Aceh pada waktu itu, SI adalah organisasi Islam yang berimplikasi pada kemajuan Islam, sehingga tidak ada kendala bagi siapapun untuk menjadi anggota perkumpulan SI.

2. Serikat Pemuda Islam

Pada tahun 1935 M, A. Hasjmy menghadiri konferensi besar yang bertujuan untuk mendirikan organisasi pemuda di Aceh, yang akhirnya berubah nama menjadi Pergerakan Pemuda Islam Indonesia (PERAMINDO) dan terakhir menjadi Serikat Pemuda Islam Aceh (SPIA). Sekitar 50 pemuda ikut serta, baik yang baru pulang dari Sumatera Barat maupun yang berada di Aceh. Rapat akbar diadakan di Madrasah Diniyah Lamjampok Montasiek. Akhirnya disepakati dalam rapat untuk membentuk organisasi SPIA dan administrasinya (Hasjmy, 1985, p. 77).

3. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)

Karena beberapa organisasi dan gerakan Islam baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh belum berhasil merealisasikan tujuan gerakan Islam, maka berikutnya lahirlah Persatuan Ulama (PUSA). PUSA didirikan pada awal tahun 1939 dan bubar diakhir tahun 1953. Pendiriannya adalah *Teungku* Abdurrahman Meunasah Meutter dan *Teungku* Ismail Yacob. Mereka mengadakan pertemuan masif pada bulan Mei 1938. Selama 14 tahun keberadaan PUSA di Aceh, organisasi ini fokus pada isu-isu politik dalam dan luar negeri. Terkhusus pada masa transisi kolonialisme Belanda ke Jepang (Amiruddin, 2003, p. 32). Susunan kepengurusan PUSA dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Kepengurusan PUSA (Hasjmy, 1997, p. 87)

Untuk mengusir penjajah Belanda, maka PUSA mengutus tiga Ulama Aceh yakni Teungku Abdul Hamid Samalanga, H. Ahmad Batee, dan Teungku Al-Samad Seuneubok Rambong ke Penang, Malaya dengan tujuan bekerjasama dengan lima kelompok Jepang *Fujiwarakikan* (Amiruddin, 2003, p. 33).

Tokoh muda PUSA mengadakan revolusi sosial mulai dari Pantai Timur, Selatan menuju Utara dan sepanjang perjalanan mereka membersihkan segala unsur feodalisme. Aksi ini dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh (Harry, 2008, p. 148). Revolusi sosial ini dilakukan akibat dari penderitaan yang dirasakan oleh

rakyat akibat eksploitasi kekayaan alam, tekanan politik, dan perusakan kehidupan beragama di masyarakat.

Tidak sampai disitu, Belanda juga mengelabui dan memutarbalikkan sejarah dengan bersikap seolah-olah menjadi pahlawan kemanusiaan di kancah Internasional. Dan hal ini membuat rakyat Aceh, terutama Ulama Aceh tidak mau berkompromi dengan kolonial, meskipun Pemerintah Aceh terikat dengan *Korte Verklaring* (perjanjian pendek) (Veer, 1985, p. 180). Isi ringkas dari *Korte Verklaring* ini adalah Aceh harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Belanda.

Ulama Aceh mengubah siasat perjuangan dari bentuk perlawanan fisik kepada pembinaan kader perjuangan melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ulama secara kontinu mendoktrin para kader untuk menjadi pahlawan *Syahid* di medan perang (Team Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, p. 4).

Dari tahun 1939-1945, para ulama memegang kekuasaan politik dan pemerintahan di Aceh. Pada saat Soekarno datang ke Aceh atas nama rakyat Indonesia di tahun 1945, beliau disambut oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, selaku pemegang kekuasaan politik pemerintah di Aceh (M, 2001, p. 77). Dengan berderai air mata, Soekarno meminta kepada rakyat Aceh agar dapat membantu Indonesia menggapai kemerdekaannya. Pimpinan Aceh saat itu menyetujui dengan syarat bahwa Indonesia akan dijadikan Negara Islam apabila mencapai kemerdekaannya. Rakyat Aceh dengan penuh semangat berperang membantu Indonesia, serta menghadahi dua unit pesawat terbang, yaitu *Seulawah 001* dan *Seulawah 002*. Pesawat ini merupakan pesawat pertama Republik Indonesia. Namun setelah itu, Indonesia mengingkari janjinya. Sehingga pada tanggal 21 September 1953, meletuslah pemberontakan Aceh pertama terhadap Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan Aceh sebagai sebuah negara (M, 2001, p. 1). Akibat proses politik tersebut, Aceh menjadi salah satu daerah yang tertinggal dalam sistem pendidikan dibandingkan dengan daerah lain di Nusantara. Sistem pendidikan Hindia Belanda baru diperkenalkan kepada masyarakat Aceh pada

awal abad 20, setelah perlawanan Aceh terhadap penjajah Belanda mereda.

Faktor utama yang mendorong pemerintah Hindia Belanda memasukkan sistem pendidikannya ke Aceh adalah (1) visi politik etika yang dijalankan, yakni mendapatkan pegawai-pegawai administrasi yang terampil sesuai standar mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi Hindia Belanda. Maka pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem pendidikan kepada kalangan bumi putra, yang pada secara terbatas; (2) munculnya kelompok baru yang dipelopori oleh orientalis terkemuka yaitu C. Snouck Hurgronje yang terkenal dengan konsep politik asosiasi (Veer, 1985, p. 151).

Pasca proklamasi, Belanda melancarkan 2 (dua) *Agresi Militer* terhadap Republik Indonesia. *Agresi Militer* I dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947, diiringi dengan pembentukan negara boneka oleh *Van Mook* di wilayah Indonesia Timur. *Agresi Militer* Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, diiringi pembentukan negara *boneka* oleh *Van Mook* di kawasan pulau Jawa dan Sumatera sebagai basis terakhir Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia (Veer, 1985, p. 246).

Diawali dengan serangkaian peristiwa sejarah dan diakhiri dengan terjadinya Invasi Belanda I dan II, hal ini meletakkan dasar bagi hubungan antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia. Rakyat Aceh bertekad mempertahankan kemerdekaannya dengan mengorbankan nyawa dan harta bendanya untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar rencana Belanda untuk menduduki kembali Aceh tidak terlaksana (Chaidar, 2000, p. 108).

Pada rapat di Blang Padang tanggal 16 Juni 1948, Soekarno menyatakan bahwa (Jacob, 1984, p. 217):

"...Rakyat Aceh dalam sejarah dikenal sebagai pejuang yang paling gigih menentang penjajahan Belanda. Berpuluh-puluh tahun rakyat Aceh menentang kolonialisme Belanda. Sekarang saatnya mengusir penjajahan Belanda dari bumi persada tercinta ini. Di mana-mana Belanda sudah mendirikan negara *boneka* untuk mengepung Republik Indonesia. Sudah waktunya sekarang pemuda-pemuda Aceh yang berdarah pahlawan siap melakukan perang sabil untuk mengusir kaum penjajah dari persada ibu pertiwi tercinta. Aceh adalah modal. Modal dalam meneruskan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan modal dalam perjuangan mengusir kaum penjajah dari halaman rumah kita..."

Pada hari yang sama Soekarno menuju Sigli, tepatnya di lapangan Kota Asan Sigli, Soekarno juga mengatakan bahwa:

"...biar Republik Indonesia selebar payung, tetap harus berjuang terus dengan Aceh sebagai daerah modal. Dalam meneruskan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan meneruskan perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara..."

Rentang waktu Agresi Militer II Belanda, Belanda terus melakukan manuver politik adu domba, tepatnya tiga bulan pasca pendudukan Yogyakarta, sejumlah pihak mencoba menggunting dalam lipatan, untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Pada tanggal 17 Maret 1949, Wali Negara Sumatera Timur (Tengku Dr. Mansyur) berkirim surat kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang intinya agar bersedia menghadiri Mukhtar Sumatera yang diadakan di Medan pada tanggal 28 Maret 1949. Mukhtar tersebut bertujuan membentuk Negara Sumatera Merdeka, yang terpisah dari Republik Indonesia. Khusus untuk Aceh diberi tiga pilihan, yaitu: (1) Aceh dapat meninggalkan Republik Indonesia dan bergabung dengan Negara Sumatera Merdeka yang akan dibentuk; (2) Aceh berpeluang menyatakan diri sebagai negara yang merdeka; dan (3) Aceh tetap berada dalam pangkuan Republik Indonesia.

Namun, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dengan tegas menolak ajakan Tengku Dr. Mansyur. Penolakan ini membuat

semangat *Tengku* Dr. Mansyur untuk mendirikan Negara Sumatera Merdeka menjadi runtuh. Mukhtar Sumatera pun menjadi tidak populer lagi. Sikap tegas *Teungku* Muhammad Daud Beureueh ini membuat Soekarno kagum (Adan, 2005, p. 81). Sementara itu, aksi militer Belanda memperkuat pengaruh Daud Beureueh di wilayah tersebut. Jatuhnya Medan ke tangan Belanda mendorong pemerintah pusat membentuk dua wilayah militer di Sumatera Utara, dan mengangkat Daud Beureueh sebagai Gubernur militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat mayor jenderal (Adan, 2005, p. 29).

Hal ini mengindikasikan hubungan yang harmonis antara Aceh dan pemerintah Republik Indonesia khususnya di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi hubungan tersebut berubah disharmonis, salah satunya disebabkan karena inkonsistensinya Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan kebijakan untuk Aceh (Arbas, n.d., p. 100).

Dalam pergerakan politik, pada tanggal 21 September 1953 di Aceh terjadi protes keras dengan cara mengangkat senjata terhadap pemerintah Pusat (Jakarta) yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Hal ini dipicu karena pemerintah pusat tidak memenuhi janjinya. Sedangkan Aceh sudah berjasa dalam mempertahankan dan membela berdirinya Negara Republik Indonesia.

Seandainya Aceh pada waktu itu dapat diduduki kembali oleh Belanda, maka Negara Republik Indonesia sudah takluk di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat Aceh merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Republik Indonesia, Aceh yang disebut-sebut daerah modal, tetapi dilupakan. Semua janji tidak pernah ditepati oleh Pemerintah Pusat, bahkan Propinsi Aceh dilebur dan disatukan dengan Propinsi Sumatera Utara beribukota Medan. Kemudian karena janji tersebut diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan semangat yang kuat mendorong Beureueh, untuk merealisasikan sebuah impian yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Aceh yaitu mendirikan Darul Islam. Dengan Darul Islam ini,

hukum Allah akan terlaksana dan jauh dari pengaruh sekulerisme dalam kehidupan rakyat Aceh.

Oleh karena itu, pada tahun 1953 Teungku Muhammad Daud Beureueh, salah seorang ulama yang sangat fenomenal membuat maklumat dalam bentuk meminta hak-hak terhadap pemerintah Indonesia. Dan dalam sikap politiknya beliau menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), NII dipimpin oleh Karto Suwiryo dengan nama Darul Islam (DI), yang menegakkan hukum Syariah Islam. Pasukan keamanan, dijuluki Tentara Islam Indonesia (TII), dan mengumumkan bahwa Aceh adalah ibu kota yang mengabadikan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Gerakan gerilya jangka panjang melibatkan semua orang untuk memulai perang.

Peristiwa Darul Islam (DI) merupakan sebagai sikap protes keras dari masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Cita-cita Teungku Muhammad Daud Beureueh untuk mewujudkan sebuah Negara Islam cukup besar. Hal ini pernah disampaikan beliau kepada seorang wartawan asing, Boyd R. Compton, Menurutnya:

“Kebebasan beragama tetap terjamin di Negara Islam. Beureueh memberi contoh mengenai toleransi terhadap penganut Kristen di negara-negara Islam Timur Tengah, kaum Kristiani diberi kebebasan dan dilindungi di Negara Islam Indonesia. Umat Islam tidak akan dapat merasakan kemerdekaan sejati kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang diasaskan kepada ajaran Al-Quran”.

Menyikapi situasi Indonesia yang carut marut akibat tentang pernyataan Presiden Soekarno “Aceh sebagai daerah modal”, dan permintaan Teungku Daud beureueh, Indonesia menjadi negara Islam tidak terealisasi. Maka diadakan perundingan yang disebut dengan Misi *Hardi*. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan setelah melalui proses yang melelahkan dengan Hasan Saleh, dan kawan-kawan, antara lain:

- a. Teungku Muhammad Daud Beureueh bersedia meletakkan senjata dan turun gunung

- b. Semua Tentara Islam Indonesia (TII) digabungkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat Darul Islam (DI) kembali diberi pekerjaan sebagaimana semula (26 Mei 1959).
- d. Untuk Daerah Propinsi Aceh diberi hak Istimewa yang mencakup tiga keistimewaan oleh Misi Hardi, tetapi tidak pernah ada Undang-Undanganya, yaitu keistimewaan dibidang beragama, yaitu Islam. Keistimewaan dibidang pendidikan. Dan Ketiga, keistimewaan dibidang adat-istiadat.

Akhir tahun 1959, sesuai dengan kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan di Genewa, Swiss. Dalam pertemuan itu hadir Hasan Ali Perdana Menteri Negara Islam Indonesia (NII) dan Hasan Muhammad Tiro. Maka diputuskan untuk mendirikan suatu negara yang berbentuk federal yang dinamakan Republik Persatuan Indonesia (RPI), guna mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari daerah-daerah dan untuk lebih mengefektifkan perjuangan menghancurkan rezim Soekarno yang diktator.

Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia (RPI) antara lain menyebutkan bahwa negara RPI adalah suatu bentuk federasi yang menjiwai ketatanegaraan Islam yang mempunyai landasan pijakan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau golongan untuk memeluk agamanya atau kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah serta hidup bermasyarakat sesuai dengan syariat agamanya atau kepercayaannya.

Disisi lain, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan politik untuk umat Islam yaitu mendirikan Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut segera menimbulkan kontroversi, baik dari kalangan nonmuslim, kelompok nasionalis sekuler maupun kalangan Islam sendiri. Terlepas dari sikap pro-kontra ini, pembentukan Kementerian Agama lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada urgensi peran yang diperlukan dari sebuah sistem tata pemerintahan yang baru.

Kementerian Agama secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia, baik secara ideologi, politik, kelembagaan maupun sistem pendidikan, sehingga cita-cita umat Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Usaha dalam bidang pendidikan Islam ini sesuai aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan pendidikan Islam dari pendidikan dasar, sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam.

Sejak masa itu, Kementerian Agama mengelola sepenuhnya Pendidikan Islam. Namun, perhatian yang diberikan di masa awal kemerdekaan mendapat tantangan dari kekuatan nasionalis sekuler terutama di lembaga Badan Pekerja Nasional Indonesia (BPNI-KNIP). Saat sidang perumusan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pendidikan Islam terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu penyebabnya adalah selain masih kuatnya pengaruh zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang dibidang pendidikan, juga masih kuatnya pengaruh kelompok nasionalis sekuler dalam pengambilan kebijakan negara dibidang pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan agama adalah implementasi dari landasan filosofis bangsa yang tertera dalam sila pertama pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menjelaskan tentang kedudukan agama di Indonesia, dan landasan religius masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama. Dalam kondisi politik negara yang belum stabil dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhinya. Berbagai aliran politik dapat dengan bebas membentuk partai-partai politik di Indonesia sebagai sarana demokrasi seperti yang dinyatakan oleh pasal 28 UUD 1945.

Umat Islam juga berpartisipasi dalam kesempatan ini pada tanggal 7-8 Nopember 1945, melalui sebuah Kongres Umat Islam, di Yogyakarta, lahirlah dua keputusan, yaitu (1) pembentukan sebuah Partai Politik yang diberi nama Masyumi, dan (2) umat Islam tidak mempunyai partai lain kecuali Masyumi. Berdiri Masyumi

tersebut juga merupakan jawaban positif terhadap manifesto politik Wakil Presiden Mohammad Hatta, tertanggal 1 Nopember 1945 yang mendorong pembentukan partai-partai. Partai Masyumi ini merupakan Partai persatuan umat Islam, dengan tujuan agar terlaksana ajaran dan hukum Islam di Indonesia dalam segala aspek kehidupan umat Islam.

Kementerian Agama merupakan koalisi Muslim dan beberapa Partai Nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdlatul Ulama, PNI dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuatan PNI yang bercorak nasionalis sekuler.

Dari sinilah akar terjadinya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada saat itu lembaga-lembaga pendidikan warisan Belanda selanjutnya diambil-alih dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, sedangkan Pendidikan Agama Islam pada sekolah-sekolah, madrasah dan pesantren dibina oleh Kementerian Agama.

Perbedaan antara keduanya dipertajam dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pada saat itu) yang lebih cenderung mementingkan pendidikan umum dari pada pendidikan agama. Pada umumnya praktik penyelenggaraan pendidikan Islam dalam masyarakat dilatarbelakangi adanya pertimbangan subyektif masyarakat berupa filosofi, nilai-nilai, serta suatu prinsip yang dipilih.

Usaha umat Islam untuk menegakkan Islam sebagai dasar ideologi negara dalam konstitusi mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam pada waktu itu dipandang sebagai milik kaum "anti-Islam" dan waktu itu tidak ada kata sepakat, sehingga Presiden mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi, membubarkan Konstituante dan UUD 1945 diberlakukan kembali. Dalam dekrit itu disebutkan, bahwa piagam Jakarta menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945.

Dengan dikeluarkan dekrit Presiden, maka bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi Terpimpin. Soekarno kembali mengeluarkan idenya Nasional-Agama-Komunis (Nasakom). Nasakom adalah suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasional, Agama dan Komunis, akan tetapi ide ini dilaksanakan dengan caranya sendiri. Peranan partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memainkan peranan penting, sedangkan partai-partai Islam secara keseluruhan mengalami kemerosotan, berubahnya sikap NU dari organisasi keagamaan menjadi organisasi politik mempunyai dampak besar atas pola kepemimpinan politik umat Islam Indonesia yang dikuasai oleh kelompok modernis.

Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukung utama. Kegiatan politik pada demokrasi terpimpin didominasi oleh PKI, dengan landasan politik Manipol (*Manifesto Politik*). Sebagai gerakan politik, PKI menyatakan "revolusi belum selesai". Dengan dalih ini, PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan tahapan-tahapan revolusi, yakni dari tahap nasional demokrasi menjadi sosialis.

Masa Demokrasi terpimpin ini berakhir dengan gagalnya Gerakan 30 September Tahun 1965. Umat Islam bersama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu, sistem politik (tahun 1966) mengalami pembaharuan, penataan kehidupan perpolitikan dengan menetapkan asas tunggal Pancasila untuk semua parpol, tidak ada ciri khusus, tidak ada ideologi Islam, dan tidak ada lagi partai Islam. Dalam periode ini umat Islam merasa kecewa, sebab meskipun PKI sebagai ideologi komunis telah ditumpas dan perkembangannya tidak seperti yang diharapkan, namun rehabilitasi Masyumi-Partai Islam berpengaruh dibubarkan oleh Soekarno, serta tidak diperkenankan untuk kembali hidup. Bahkan tokoh-tokoh juga tidak diizinkan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia (PMI).

Memasuki tahun 1966 (Era Orde Baru) Aceh kembali lahir gerakan-gerakan yang menentang pemerintah. Hal ini merupakan dampak negatif dari lambannya perwujudan syariat dan peningkatan

kesejahteraan telah memberikan lahan bagi munculnya gerakan politik baru.

Pada awal tahun 1970, Hasan Tiro mantan duta Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pulang untuk berziarah ke Aceh dan berhasil melakukan kontak dengan rekan perjuangan dulu baik dari Medan maupun Aceh seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh, Hasballah Haji, Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Abdul Wahab Ibrahim untuk bangkit berjuang kembali.

Setelah terjadinya komunikasi dengan pihak yang terlibat DI/TII, selanjutnya Hasan Tiro mengambil sikap, yakni pada tanggal 4 Desember 1976 memproklamkan Aceh Merdeka (AM). Beberapa rekan lama masih mempunyai semangat berjuang, seperti Ilyas Leube, Daud Paneuk, dan Pawang Rasyid yang secara nyata ikut memanggul senjata.

Muhammad Hasan Tiro berjuang keras di New York untuk memasukkan persoalan DI/TII ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan supaya kepada rakyat Aceh terutama diberi hak menentukan nasib sendiri (*selfdetermination*), akan tetapi usaha mulia ini menemukan kegagalan.

Atjeh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang oleh rakyat Aceh dikenal dengan sebutan Atjeh Meurdeuka (AM), kemudian dicap oleh pemerintah Indonesia sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) atau Gerakan pengacau Keamanan (GPK). Adapun dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan adagium "Gerakan Aceh Merdeka" (GAM).

Pergulatan masyarakat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan selalu identik dengan pergulatan-pergulatan yang dilakukan kaum cendekia Islam. Perubahan dalam rangka membentuk dan menghasilkan suasana baru untuk kemajuan Aceh. Lahirnya GAM mendapat pro dan kontra dalam kelompok senior DI/TII, karena ada perbedaan konsep terkait dengan perjuangan. Hasan Tiro selaku deklarator GAM merumuskan gagasan dan memikirkannya tentang

bentuk kenegaraan yang ideal bagi kepulauan Indonesia terutama di Aceh.

Dikarenakan iklim politik di Aceh, kemunculan lembaga pendidikan Islam tentunya menawarkan nuansa akademik yang menarik untuk digali dan dijelaskan dalam sesi-sesi akademik. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memiliki corak yang cukup intensif, dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam Timur Tengah. Dalam konteks ini, Pemerintah melahirkan sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada kultural dan politis.

Kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia sebagai akibat terpapar gagasan-gagasan pembaruan Islam. Kedua, fenomena kebijakan pendidikan pemerintah kolonial yang di respon masyarakat.

Tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak mencirikan budaya Indonesia secara khas. Universalitas tradisi pendidikan Islam klasik turut mempengaruhi eksistensi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Berbagai lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren di Jawa, Meunasah di Aceh, Surau di Minangkabau, Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah bertransformasi dalam keilmuan dan kelembagaan. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya.

Lembaga pendidikan Islam telah mengalami modernisasi sejak awal abad ke-20. Selama periode ini, dunia Islam mengalami perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, yang memberikan berbagai pengaruh. Salah satu kuncinya adalah proses *cultural encounter* (perjumpaan budaya) di mana Islam dan modernitas menjadi wacana yang dominan.

Peran Ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat menentukan, karena melalui fatwa dan bimbingan Ulama, maka rakyat rela berjuang dan berkorban untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Beberapa generasi muda Aceh (lulusan

madrasah) menjadi guru madrasah. Seperti, A. Hasjmy dan Sayid Abu Bakar, yang mengajar di Universitas Islam Seulimeum, dan M. Noor El Ibrahimy, yang mengajar di MADNI (Madrasah Nahdatul Islam transformasi dari Madrasah Ahlussunnah wal Jama'ah). Sementara yang lain membangun dan mengorganisir madrasah baru di Gampong dan di tempat lain sehingga pada akhir masa penjajahan, madrasah di Aceh berjumlah lebih dari 100 madrasah (Sulaiman, 1997, p. 42).

4. Aspek Intelektual

Sejak Islam sampai ke Aceh, Ulama Haramain telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh. Kehadiran mereka saat itu, diharapkan untuk mengajarkan masyarakat tentang ajaran-ajaran Islam. Di samping juga mereka menjadi penasihat para raja. Dengan begitu, segala keputusan mereka akhirnya menjadi kebijakan kerajaan (Amiruddin, 2003, p. 11).

Para Intelektual muslim mempunyai pengaruh yang signifikan dan sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ulama di Aceh merupakan kelompok yang istimewa, mereka lulusan Dayah, dan oleh karena itu lebih terhormat di antara orang yang menuntut ilmu di tempat lain (Amiruddin, 2003, p. 3). Hasbi Amiruddin pernah mengatakan bahwa tradisi keilmuan di Aceh dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang mengacu kepada proses Islamisasi nilai-nilai keagamaan dalam tradisi keilmuan.

Perkembangan intelektual di Aceh telah memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat untuk terjun menuntut ilmu pengetahuan ke seluruh nusantara tidak terkecuali ke Timur Tengah. Kondisi keilmuan tersebut telah mengakar pada Ulama-Ulama yang singgah dan berhasil mengembangkan ajaran Islam di Aceh (Azra, 2002, p. 15).

5. Peranan Ulama Dalam Masyarakat

Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat di Aceh (Amiruddin, 2003, p. 9), karena gagasan dan pemeliharaan wacana intelektual. Erawadi (2011, p. 2) menyatakan bahwa seorang Ulama tidak hanya menguasai dan memahami ajaran Islam, tetapi juga berperan sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat bagi pembangunan umat. Kontak ulama dengan ulama lain merangsang semangat pembaruan untuk merevitalisasi Islam dalam kehidupan pribadi dan komunal.

Kedatangan Ulama Timur Tengah ke Aceh dalam rangka memperkenalkan lembaga pendidikan Islam, atas dasar itulah dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa institusi pendidikan berupa *Meunasah*, *Rangkang* dan *Dayah* telah dikenal sejak kesultanan Samudera Pase berkuasa (Mukti, 2007, p. 16). Hasbi Amiruddin (2016) pernah mengatakan bahwa Perilaku Ulama selalu menjadi panutan dan teladan. Kata-kata ulama selalu menjadi pedoman dan pegangan. Ulama adalah pelita umat yang memiliki kharisma di masyarakat. Penerimaan dan penolakan publik terhadap suatu ide, konsep, atau program sangat dipengaruhi oleh Ulama.

Dalam sejarah Kerajaan Aceh, Ulama adalah penggerak ilmu pengetahuan. Tidak hanya pada ruang lingkup ajaran Islam saja, namun juga aspek ibadah Mahdah seperti memberikan fatwa dan shalat, namun juga meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, masyarakat, dan pendidikan budaya. Mengajarkan sains dalam sistem pendidikan yang tepat. Penguasaan Syekh Nur al-Din al-Raniry atas bahasa Arab, Persia, Urdu, Melayu dan Aceh sangat membantu dalam membangun reputasi keilmiahan dan keilmuan di Aceh pada masa hidupnya (Azra, 2013, p. 232).

Perkembangan intelektual masyarakat Aceh pasca kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh kembalinya santri dari Persia dan Arab, namun kebanyakan saudagar yang datang ke Nusantara berasal dari India dan melakukan perjalanan ke Arabia, diajarkan oleh para ulama dari Persia dan Gujarat. Ini membentuk dan menghasilkan ulama-cendekiawan Islam yang dapat mengembangkan ajaran Islam di

seluruh Aceh (Thahiry & dkk, 2007, p. 24). Adalah kesalahan besar untuk membatasi peran ulama pada masalah agama, fatwa dan moralitas, dan karena peran ulama dalam sejarah begitu luas, seluas ajaran Islam yang menyeluruh, ini adalah sejarah yang dianggap sebagai hal. Diagram ini menunjukkan bahwa jalan hidup seorang ilmuwan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan

Ulama telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh sepanjang sejarah. Kualitas dan kecakapan akademik para sarjana kami telah membawa mereka untuk secara aktif memimpin komunitas mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Rumusan konseptual sistem ekonomi Islam, termasuk sistem perbankan syariah, merupakan hasil upaya ijtihad Ulama dan para cendekiawan. Apalagi kepribadiannya yang tinggi menjadikan Ulama sebagai panutan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk lebih giat melakukan berbagai aktivitas kehidupan, terutama yang bersifat pendidikan.

Secara sosiologis, menurut Darwis Sulaiman (2016) masyarakat Aceh menganggap ulama sebagai orang yang jujur, rendah hati, lemah lembut, berilmu tinggi, dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak banyak bicara. Kepribadian yang tinggi menempatkan ulama pada posisi yang tinggi sebagai *uswah* (panutan) bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat Aceh yang memperhatikan hal ini dan berharap agar anak-anaknya dapat mewarisi ilmu dan kepribadian dari para ulama yang mengetahui kehidupan

Ulama menempati posisi penting dan berperan penting dalam transformasi pendidikan Islam di Aceh. Secara psikologis, hubungan ulama dengan masyarakat lebih kuat, permasalahan yang dihadapi umat menjadi lebih mudah, dan persoalan pendidikan Islam yang lebih mengedepankan pengembangan dan kualitas peran ulama di masyarakat lebih cepat terselesaikan.

6. Peran Ulama Dalam Pendidikan

Sebagai agen pembaruan Islam melalui lembaga pendidikan, Ulama juga berperan dalam kemajuan kolektif masyarakat Aceh. Ulama hadir untuk memperkuat pendidikan Islam melalui madrasah yang didirikan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Kehadiran sekolah ala Barat yang diperkenalkan semakin mengasingkan nuansa Islam di Aceh, semakin memperparah peran ulama dalam menjaga sistem pendidikan madrasah (Amiruddin, 2011, p. 108). Besarnya peranan ulama dalam pendidikan karena mereka sebagai kelompok dominan dalam sistem sosial masyarakat Aceh yang ditandai oleh nilai-nilai sosial keagamaan.

Pendirian madrasah diberbagai pelosok Aceh dengan ide-ide pembaruan yang diusung oleh pendirinya masing-masing merupakan gerakan pembaruan karena perkembangan pemikiran para pendirinya dan pengaruh dunia luar. Namun yang tidak bisa dipungkiri adalah peran Ulama dalam memasukkan ide-ide reformasi ke dalam kurikulum madrasah tersebut. Sejak Islam pertama kali masuk ke Aceh, unsur-unsur Islam telah menyatu dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kontrol Ulama dengan menguasai lembaga pendidikan digaris depan dan Ulama bertanggung jawab memberikan penerangan kepada masyarakat (Amiruddin, 2013, p. 15).

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam di Aceh memegang peranan yang cukup penting bagi para Ulama di dalamnya. Ulama telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan dan pendefinisian kurikulum bagi lembaga pendidikan di Aceh. Sesuai dengan kebijakan penerapan ajaran Islam secara *Kaffah*. Peran terbesar ulama dalam pendidikan adalah membekali lembaga pendidikan dengan penghapusan dualisme kelembagaan dan dikotomi akademik. Peran ini akan terus dilakukan untuk memastikan diterapkannya kurikulum yang mengarah pada Islamisasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peran ulama sebagai kelompok intelektual dalam bidang pendidikan,

lembaga dan sistem pendidikan akan membawa perubahan dalam bidang pendidikan Islam.

7. Peran Ulama Dalam Pemerintah

Dalam berbagai situasi sosial yang terjadi di Aceh, Ulama akan selalu berperan penting dan menentukan jalannya sejarah. Ulama, sebagai seorang yang dihormati sekaligus diikuti atas perbuatannya, kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh yang religius. Ulama adalah pusat pembangunan, bahkan di beberapa tempat (Republik Indonesia, 2003).

Dalam perkembangan politik, Ulama telah berperan dalam struktur pemerintahan sejak Kesultanan Aceh. Keterlibatan ulama dalam politik Aceh merupakan posisi strategis yang mereka ambil. Sejak awal keberadaan Islam di Nusantara, keberadaan ulama telah menjadi penasihat Kesultanan dan dalam memutuskan berbagai kebijakan pemerintahan (Kesultanan), di samping melakukan dakwah bagi seluruh masyarakat. peran strategis. Di Aceh masyarakat masih menghormati Ulama (Amiruddin, 2003, p. 14). Dengan demikian, Ulama memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. Seperti Ayah Hamid, seorang Ulama Aceh yang tidak puas membantu bangsanya dengan mengajar saja. Namun beliau masih mencari organisasi yang dapat menggerakkan masyarakat untuk sebuah kesadaran terhadap situasi negara yang sedang dijajah (Amiruddin, 2003, p. 111).

Sepanjang abad ke-20, di samping perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan meningkatnya nasionalisme, peran Ulama juga menarik potensi komunitas yang menggembar-gemborkan peran ulama dalam sistem politik Indonesia melalui partai politik. Ulama gerakan kemerdekaan mendirikan Partai Syura Majlis Islam Indonesia (Masyumi) sebagai partai politik yang berjuang untuk menegakkan hukum Islam di Republik Indonesia. Perjuangan ini sebagian besar diperjuangkan dalam sistem parlementer Indonesia

Perjuangan panjang para Ulama memberi peluang bagi mereka untuk terjun ke dunia politik yang nyata dan menjadi wadah memperjuangkan aspirasi umat Islam terkait implementasi kebijakan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di Aceh, memungkinkan masyarakat Aceh memiliki kemajuan dan cita-cita yang ideal.

BAB IV

TRANSFORMASI PENDIDIKAN DI ACEH TAHUN 1966-1998

1. Transformasi Sistem Pendidikan Islam

Sistem pendidikan Islam yang ada di Aceh merupakan produk sejarah yang penuh dengan perjuangan sejak masa kerajaan Aceh, pendidikan di Aceh dilaksanakan pada *rangkang*, *madrrasah* dan *dayah* mulai dari tingkat dasar sampai tingkat Tinggi, sebagai rekonstruksi sejarah panjang dan penuh gejolak, pendidikan di Aceh telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis, namun perubahan itu masih berlanjut karena bentuk lembaga dan sistem pendidikan yang sudah ada dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat Aceh (Idris, 2002, p. 2).

Rekonstruksi sistem pendidikan Islam menuju ke sistem pendidikan modern meliputi perubahan pada beberapa aspek, seperti manajemen, rekrutmen pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana maupun proses pembelajarannya.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam adalah implementasi nilai-nilai ajaran Islam yang dirumuskan menjadi tujuan pendidikan yang jelas dan konkret agar arah pendidikan tercapai baik secara pedagogis maupun filosofis (Kartono, 1992, p. 204).

Tujuan pendidikan Islam tidak secara eksplisit diuraikan di dalam Al-Quran, namun dapat ditemukan pada beberapa ayat atau hadist yang membicarakan tentang kehendak Allah SWT menciptakan manusia. Ayat-ayat tersebut menggambarkan tentang tujuan hidup manusia, yaitu tujuan yang sejalan dengan pendidikan Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran/3: 138-139, al-Fath/35: 29, al-Hajj/22: 41, az-Zariyat/51: 56. Ayat-ayat

tersebut menguraikan tentang arah dan tujuan pendidikan Islam yang menjadi perspektif pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai lembaga pendidikan Islam.

Tujuan pendidikan adalah menghasilkan perubahan perilaku berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari individu yang mengikuti pendidikan (Rivai & Murnil, 2000, p. 5). Tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tujuan pendidikan sementara dan tujuan pendidikan akhir. Tujuan pendidikan sementara untuk mencapai kecakapan jasmaniah, pengetahuan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan jasmani-rohani dan sebagainya, Sedangkan tujuan pendidikan akhir adalah terbentuknya kepribadian muslim (untuk menjadi hamba Allah SWT) (Marimba, 1989, p. 47). Tujuan pendidikan Islam tidak sekadar *transfer of knowledge* namun juga *transfer of value*, sehingga mampu melahirkan manusia yang bertaqwa, manusia yang mampu mencapai al-Falah, juga mampu menggapai kesuksesan hidup abadi dunia dan akhirat (*muflihun*) (Sierato, 1991, p. 43).

3. Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan Nasional pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Bab II pasal 3 dan pasal 4 menyebutkan bahwa

Pasal 3 menyebutkan "Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat dan tanah air".

Pasal 4 menyatakan: "Pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia".

Melalui Kementerian Agama (Kemenag), Pemerintah ingin mencapai tujuan khusus bidang pendidikan agama. Sehingga kewenangan Kemenag tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah agama saja (Pesantren/Dayah dan Madrasah) namun juga pendidikan agama pada sekolah umum (Daulay, 2009, p. 85).

M. Hasbi Amiruddin dalam wawancara menyatakan bahwa ada kaitan antara tujuan pendidikan Nasional sebelum tahun 1966 dengan tujuan pendidikan Islam di Aceh, hal ini menunjukkan bahwa, pendidikan di Aceh dimulai dengan pendidikan Agama Islam yang terintegrasi dengan pendidikan umum seperti ilmu geografi, ilmu hisab, ilmu falak, ilmu alam, ilmu mantik dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada masanya hasil pikiran pakar melahirkan suatu *filosofi* hidup masyarakat Aceh, dengan semboyan "*Adat Bak Po Teumeurhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Puro Phang, Resam Bak Laksamana*". *Filosofi* ini menjadi pedoman hidup masyarakat Aceh dalam mengatur ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan atas dasar keadilan dan kemakmuran. Termasuk dijadikan sebagai landasan pendidikan. Wawasan dan pola pikir demikian melahirkan suatu pandangan dalam masyarakat Aceh, bahwa "*Agama ngon Adat, lage zat ngon sifeut*".

4. Tujuan Institusional

Setiap lembaga pendidikan mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut digambarkan dalam bentuk kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh lulusan lembaga pendidikan.

- **Tujuan Institusional Dayah**

Tujuan dasar dari lembaga pendidikan dayah di Aceh adalah mencetak santri yang *tafaqquh fi ad-din* (mendalami ilmu agama) serta menghayati dan mengamalkan dengan penuh keiklasan serta ditujukan semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Serta menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain dengan ikhlas (Amiruddin & dkk, 2007, p. 78).

Menurut Muhammad Thalal, dkk., Pengajian yang dikembangkan oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kalee adalah sebagai usaha pemantapan aqidah para santri untuk dapat mengenal Allah SWT. Serta mengetahui fungsi dan tanggung jawabnya sebagai makhluk dan khalifah Allah Swt. di bumi" (Thala & dkk, 2010, p. 130).

Para Ulama menyadari kekuatan yang tersimpan dalam pendidikan, karena pendidikan itu merupakan wahana yang paling ampuh guna menggalang persatuan melalui ajaran Islam. Juga sebagai media yang sangat efektif bagi pembentukan generasi penerus agama.

Teungku Daud Zamzami (2017) menuturkan bahwa pendidikan *dayah* adalah salah satu usaha masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai dengan berubahnya tujuan hidup dengan tuntutan zaman. Pada masa kesultanan Aceh, materi pendidikan di *dayah* tidak sekadar menyajikan ilmu agama saja namun meluas mencakup filsafat, politik, sejarah, kesehatan dan pertanian (Amiruddin, 2008, p. 413).

- **Tujuan Institusional Madrasah**

Sejak tahun 1950, Madrasah secara resmi diakui sebagai lembaga penyelenggara pendidikan Islam formal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Madrasah pada dasarnya menitikberatkan pada materi pelajaran keislaman, kemudian mengalami perkembangan signifikan kemudian ditambah dengan materi pelajaran umum. Maka untuk mendapat pengakuan sebagai mata pelajaran pokok agama, sedikitnya alokasi waktu diatur enam jam/minggu di samping mata pelajaran umum.

Madrasah muncul sebagai jembatan yang menghubungkan antara lembaga pendidikan umum (sekolah-sekolah Belanda) dan lembaga pendidikan tradisional *dayah/pesantren* untuk menawarkan sistem pendidikan modern, sehingga gerakan modernisasi madrasah berlangsung dalam konteks yang berbeda dengan gerakan reformasi Islam (*Islamic reform*) (Subhan, 2012, p. 133).

Secara mendasar, madrasah mempunyai fungsi teologis sebagai karakternya, namun juga berfungsi memberikan bimbingan hidup kepada masyarakat, demikian penuturan Tengku Ziaudin Ahmad dalam petikan wawancara yang dilakukan pada tanggal 10

desember 2016. Oleh karena itu madrasah adalah milik masyarakat dan menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang di dalam kebudayaan sebagai milik masyarakat (Saleh, 2005, p. 20).

Pada masa kerajaan Aceh, lembaga pendidikan madrasah yang dalam bahasa Aceh dikenal *meunasah*, berfungsi tempat ibadah yang sekaligus untuk balai pengajian anak-anak, khususnya belajar membaca Al-Quran dan ajaran dasar Islam (Hanapih, 2010, p. 63). Hal ini dikuatkan oleh pendapat Abdul Rachman Saleh yang menjelaskan tujuan madrasah adalah memberikan pelajaran agama Islam tingkat rendah dan menengah (Saleh, 2005, p. 17).

Jadi pendidikan madrasah dirancang dan diarahkan untuk membantu, membimbing, melatih serta mengajar peserta didik menjadi manusia muslim yang berkualitas. Arti muslim berkualitas adalah mempunyai sifat-sifat manusia yang selaras (jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi), manusia moralitas (sebagai individu dan sosial), manusia *nadhar dan i'tibar* (kritis, berijtihad, dinamis, bersikap ilmiah dan berwawasan ke depan), serta manusia yang memakmurkan bumi (Muhaimin, 2004, p. 179).

- **Tujuan Institusional Perguruan Tinggi Agama Islam**

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) di Aceh dimulai pada tahun 1960 dengan dibukanya Fakultas Agama sebagai Fakultas Syariah cabang Darussalam. Tahun 1961, bertambah Fakultas Tarbiyah, setahun kemudian (tahun 1962) diresmikannya Fakultas Ushuluddin. Sehingga pada awal tumbuhnya Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry memiliki tiga Fakultas, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin. Tahun 1968 Fakultas dakwah diresmikan, yang pada kemudian hari menjadi Fakultas Adab di tahun 1983.

Proses pengembangan Fakultas tersebut memberikan variasi kajian keilmuan yang dikembangkan. Sepanjang sejarah Islam, baik madrasah maupun *al-jamiah* diabdikan terutama kepada *al-'ulum al-Islamiyah* atau tepatnya *al-'ulum al-diniyah*-ilmu-ilmu agama,

dengan penekanan khusus pada bidang fiqih, tafsir, dan hadis (Stanton, 1994, p. 7).

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berada di Aceh yang melekat dengan keistimewaan bidang pendidikan agama, maka semua lembaga pendidikan yang berorientasi pada ajaran Islam, harus merumuskan tujuan pendidikannya selaras dengan nilai-nilai Keislaman, demikian petikan interviu yang dilakukan bersama Zainal Abidin Alwi pada tanggal 26 Desember 2017. Dasar perumusan tujuan pendidikan pada PTAI di Aceh adalah semangat pembentukan KOPELMA (Kota Pelajar Mahasiswa) Darussalam. Melalui KOPELMA inilah muncul berbagai ide yang berkembang tentang konsep pendidikan Darussalam, termasuk dalam mencetus konsep dan tujuan perguruan tinggi agama Islam (Hasjmy, 1977, p. 268).

Al-Abrasyi (1975, p.2) merumuskan tujuan pendidikan dalam satu kata, yaitu *fadhilat* (keutamaan) yakni menanamkan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan peserta didik untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. Dengan usaha-usaha yang intensif yang didukung oleh berbagai lembaga, maka pembangunan dan konsep pendidikan Darussalam mulai dilaksanakan secara nyata.

Dalam peresmian KOPELMA Darussalam, Ali Hasjmy, selaku Ketua KOPELMA Darussalam, menguraikan:

Kami yakin seyakinnya, kemahsyuran Aceh di zaman gemilangnya, bukanlah semata-mata karena angkatan perangnya yang kuat dengan rakyatnya yang gagah berani dan bukan pula melulu lantaran kerajaan dengan pemerintahnya yang teratur, tetapi di samping itu yang terutama sekali ialah karena Aceh ketika itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dan para sarjana yang terkenal dengan berbagi Benua. Kerajaan dengan ilmu pengetahuan kala itu berbimbangan tangan dengan seteguh-tegunya seperti dilambangkan oleh kalimat berhikmat yang menjadi sembonyan di masa itu dan kita pergunakan untuk semboyan "Darussalam" masa ini, yakni "*Adat bak po Teumeureuhom, hukum bak Syiah Kuala*", Didorong oleh rasa kesadaran yang hendak menjadikan Aceh kembali jaya dan berbahagia, sebagai suatu bagian yang penting dari Negara

Republik Indonesia, maka diusahakanlah pembangunan kota pelajar/mahasiswa Darussalam ini, yang diharapkan kelak di kemudian hari ia akan menjadi mata air ilmu pengetahuan, yang dapat mendharma baktikan diri kepada bangsa dan Negara serta menjelma menjadi cermin dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial (Hasjmy, 1995, p. 270).

Tujuan tersebut merupakan harapan untuk mewujudkan Aceh yang gemilang dibidang ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan jenjang pendidikan tinggi Agama Islam bagi masyarakat. Darussalam yang telah menjadikan dirinya sebagai sumber cita-cita masyarakat adil dan makmur, menginsafi bahwa untuk mencapai suatu cita-cita yang besar, tidak akan mungkin tanpa adanya ilmu pengetahuan, tanpa adanya manusia yang berilmu, oleh karena itu, Darussalam menyematkan dirinya sebagai "Kampus Ilmu", pusat segala macam kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan (Hasjmy, 1995, p. 71).

5. Transformasi Sistem Pendidikan Islam

Transformasi sistem pendidikan Islam di Aceh mengganti dan menyesuaikan dengan keadaan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat (Mansur, 2004, p. 9). Sistem pendidikan Islam yang ada di Aceh sekarang ini merupakan produk sejarah yang penuh dengan perjuangan sejak masa kerajaan Aceh. Pelaksanaan pendidikan di Aceh dimulai dari *dayah*, madrasah sampai tingkat Perguruan Tinggi. Namun perubahan itu masih berlanjut karena bentuk dan sistem pendidikan yang sudah ada dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat Aceh (Idris & dkk, 2002, p. 2).

Rekonstruksi terhadap sejarah pendidikan Islam hendaknya dapat mendukung umat Islam untuk berkompetisi di dunia modern, selain mempertahankan kelangsungan modal dasar dari tradisi tersebut. Namun disebabkan oleh faktor interen, maka masih banyak lembaga pendidikan Islam yang berpola pikir tradisional, yaitu hanya mementingkan akhirat saja. Hal ini terlihat dari bangunan/gedung yang tidak mencerminkan sebagai lembaga pendidikan

yang mampu mencetak generasi berkualitas. Jadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah perubahan simbol dari tradisi yang telah usang meliputi sarana-prasarana, gedung, manajemen, guru, sistem rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan maupun proses belajar mengajar. Meskipun agak sulit diubah, namun menjadi keniscayaan yang harus dilakukan agar mewujudkan lembaga pendidikan Islam modern (Kementerian Agama, 2008, p. 126).

Penataan sistem pendidikan sangat penting dan berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Dengan sistem pendidikan yang modern, diharapkan dapat mengembangkan pendidikan agama yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Sistem pendidikan yang diterapkan sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kehidupan masyarakat Aceh, karena produk dari lembaga pendidikan Islam berkiprah dalam masyarakat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Transformasi Tujuan Pendidikan

Tahun 1966 terjadi pergantian sistem pemerintahan dan adanya upaya menciptakan aparatur pemerintah kapabel dan bermoral yang dirumuskan dalam tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mencapai cita-cita tersebut di antaranya dilakukan transformasi pada tujuan pendidikan.

Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, Bab II Pasal 3 menyebutkan tentang tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dalam Pasal 4 TAP MPRS, disebutkan bahwa untuk mencapai dasar dan tujuan nasional pendidikan, dilakukan dengan cara (a) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; (b) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan; dan (c) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat (Republik Indonesia, 1966). Maka upaya untuk membentuk manusia pancasila sangat diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang telah mendapat indoktrinasi pada masa ode lama, maka pemurnian

semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan untuk tegaknya orde baru.

Kemudian MPR hasil pemilu 1973, mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (1973) yang merumuskan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pembangunan dibidang pendidikan didasarkan atas falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki kemampuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyerukan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dari tujuan ini diketahui, bahwa agama merupakan unsur mutlak dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

7. Transformasi Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam mengacu pada Q.S. an-Nur: 55-56, Q.S. Ali Imran/3: 110, Q.S. Ali Imran/3: 104 dan an-Nahl/16: 125,

Q. S. an-Nisa'/4: 74-74 dan ash- Shaf/61: 10, 12 (Hasjmy, 1978, p. 53). Maka Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, A. Hasjmy menetapkan KOPELMA Darussalam berperan dalam tugas dan tanggung jawab pada bidang ilmu pengetahuan dan cabang ilmu lainnya, karena Allah SWT-lah yang menjadi tujuan tumpuan pengabdianya. Ditambahkan A. Hasjmy maka pada hakikatnya, memperdalam ilmu agama berarti mempelajari secara mendalam segala bidang ilmu, karena semua ilmu berasal dari Islam sehingga perlu dipelajari sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Perumusan tujuan pendidikan di Aceh, telah memenuhi enam elemen penting agar menjadi insan yang berkualitas. Ke-enam elemen tersebut meliputi (1) aqidah dan akhlak (budi pekerti); (2) pengetahuan; (3) keterampilan; (4) kesehatan (jasmani dan rohani); (5) bertanggung jawab kepada Allah, masyarakat dan negara, serta (6) mampu menjawab berbagai tantangan global (Syah, 2001, p. 43).

Azra (2001, p. 93) menegaskan bahwa Aceh perlu membangun kembali pendidikan agama yang bertujuan untuk membangkitkan tradisi kependidikan Islam, lebih jauh lagi untuk memperkuat landasan sosio-kultural keagamaan bagi penerapan syariah Islam dalam masyarakat. Jadi sudah jelas bahwa, pembangunan pendidikan agama di Aceh merupakan kebutuhan mendesak untuk dihidupkan kembali agar intelektualisme membudaya dan mengakar seperti pada masa lampau. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikannya, mulai dari tujuan pendidikan prasekolah, tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan luar sekolah, dan tujuan pendidikan menengah (A. R, 2010, p. 63).

Pembangunan pendidikan agama di Aceh bertolak dari lembaga pendidikan yang telah ada, seperti *dayah*, pesantren, dan madrasah. Dimana madrasah lebih berkonsentrasi pada *tafaqquh fi ad-din* namun tetap mengacu pada standar dasar (minimal) sekolah umum demikian ditegaskan oleh Badruzzaman dalam kesempatan wawancara di Banda Aceh tanggal 6 Juni 2016.

Pembangunan pendidikan agama yang berpijak pada landasan tersebut telah menempatkan wawasan dan pola pikir masyarakat Aceh demikian luas sehingga mampu melakukan hubungan-hubungan internasional, antar bangsa, antar negara dan bahkan berlainan agama.

8. Transformasi Tujuan Institusional Setelah Tahun 1966

Transformasi tujuan institusional lembaga pendidikan Islam di Aceh setelah tahun 1966 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Transformasi Tujuan Institusional *Dayah***

Proses pendidikan di *Dayah* menekankan pada kewajiban dan semangat pengabdian santri kepada Allah SWT. Mastuhu, secara rinci menjelaskan tujuan pendidikan *dayah*/pesantren, yaitu:

Menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. (mengikuti sunnah Nabi). Mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian. Menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (*'Izul Islam wal muslimin*) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah muhsin bukan sekedar muslim (Mastuhu, 1994, p. 62).

Amiruddin mengatakan bahwa *dayah* merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah melakukan transformasi dalam bentuk tradisional, modern dan terpadu tentang cara belajar, kurikulum dan metodologi tujuan pendidikan yang diselenggarakan telah dilakukan transformasi sesuai dengan tipologi *dayah*.

Teungku Daud Zamzami menuturkan tentang tipologi *dayah*, pertama, *dayah* tradisional yang bertujuan untuk mendalami ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari

atau disebut dengan *tafaqquh fi ad-din*. Kedua, *dayah* modern yang mempertahankan *tafaqquh fi ad-din* (mendalami ilmu agama Islam) guna untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, tapi dengan tidak mengesampingkan kebahagiaan hidup di dunia, sehingga santri harus menguasai ilmu pengetahuan umum (*'aqliyah: secular sciences*) maka dalam rangka merealisasikan salah satu tujuan penciptaan hidup manusia yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Mempertahankan *tafaqquh fi ad-din* adalah menitikberatkan pada fungsi *dayah* sebagai media penyampai pengetahuan agama Islam (*transfer of Islamic*). Ketiga, *dayah* terpadu, yang dilaksanakan tidak berhenti pada satu titik tujuan, yaitu tujuan pendidikan Islam hanyalah untuk beribadah dan mempelajari ilmu agama (*tafaqquh fi ad-din*) serta untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, *dayah* ini memadukan tujuan pendidikan yang meliputi kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup akhirat, mendalami ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum (*'aqliyah: secular sciences*) dan teknologi.

- **Tujuan Institusional Madrasah**

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berakar dari tradisi Islam sehingga tidak mungkin ditangani secara sekuler. Tetapi Pemerintah juga memahami bahwa umat Islam menuntut hak dan status yang lebih baik bagi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya dan orientasinya sama dengan sekolah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam walaupun mempunyai tujuan khusus, namun pendidikan yang dilaksanakan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam arti bahwa pendidikan pada madrasah harus dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia khususnya dari awal sampai proses menamatkan peserta didik telah diatur oleh Kementerian (pusat) sebagai pemegang kebijakan, maka perlu ada

upaya restrukturisasi ataupun reformasi dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum berbasis sekolah merupakan langkah awal dalam menata ulang sistem pendidikan yang sudah berlaku untuk kemajuan suatu lembaga pendidikan yang akan datang (Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Agama, n.d., p. 99).

Pendidikan Islam di madrasah selain memiliki wewenang sentral sesuai dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, juga didukung oleh pengembangan desentralisasi dengan keistimewaan Aceh pada bidang pendidikan dan agama. Jadi pendidikan di madrasah selain transfer ilmu agama juga pembentukan watak serta pembinaan keterampilan yang saat ini populer dikenal sebagai *life skill* juga bertujuan *tafaqquh fi ad-din* menurut jenjang madrasah mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Oleh karena itu, perumusan tujuan pendidikan madrasah di Aceh harus memenuhi standar pendidikan nasional dengan penekanan pada kurikulum madrasah *tafaqquh fi ad-din* maupun madrasah umum (Azra, 2001, p. 95).

Azra (2001, p. 93) kembali menjelaskan bahwa madrasah di Aceh memiliki tiga fungsi pokok pendidikan, *pertama*, Pemindahan dan penerusan keilmuan Islam (*transfer of Islamic learning*); *kedua*, Pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*), dan *ketiga*, Penciptaan (kader-kader) Ulama (*reproduction of Ulama*). Jadi dapat dipahami bahwa terdapat tiga aspek transformasi tujuan pendidikan madrasah yang merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi pembangunan pendidikan Islam di Aceh, yaitu (1) Madrasah Aliyah Model (MAM) bertujuan mendidik siswa-siswa yang paripurna (*insan kamil*) agar mandiri, mempunyai keterampilan sebagai modal dalam perjuangan dan senantiasa mempunyai kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi serta berwawasan luas; (2) Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) bertujuan mendidik siswa-siswa agar menjadi kader Ulama yang berakhlak mulia (*al-Akhlaq al-Karimah*) dan tidak mendikotomi ilmu; (3) Madrasah Aliyah Ketrampilan (MAK) bertujuan mendidik siswa yang beriman dan

bertaqwa kepada Allah SWT, mandiri, terampil, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan yang luas.

- **Tujuan Institusional Perguruan Tinggi Agama Islam**

Kehadiran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tidak terlepas dari cita-cita umat Islam Indonesia untuk memajukan ajaran-ajaran Islam. Setelah mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, umat Islam Indonesia mengalami keterbelakangan dan disintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Azra, 2001, p. 159).

Kehadiran PTAI berfungsi sebagai arah atau petunjuk dalam pelaksanaan pendidikan, juga sebagai pengontrol maupun mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan. Pada dasarnya tujuan didirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami'ah Ar-Raniry adalah untuk mengembalikan Aceh pada kejayaan dahulu kala dan guna mengejar ketinggalan rakyat Aceh dalam lapangan pendidikan. Pemimpin-pemimpin Aceh mempertegas cita-cita pembangunan PTAI ke dalam cita-cita pembangunan KOPELMA Darussalam (Hasjmy, 1969, p. 228).

Sedangkan maksud dan tujuan dari pengajaran pada IAIN Jami'ah Ar-Raniry adalah (1) Membentuk sarjana muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa serta negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; (2) Mencetak sarjana muslim dan atau pejabat agama Islam yang ahli untuk kepentingan Kementerian Agama maupun untuk instansi lain yang memerlukan keahlian di bidang agama serta untuk memenuhi keperluan umum (Suhandang, 1988, p. 15).

Menurut Daulay (2014, p. 14) terdapat dua istilah yang sering dikaitkan antara manusia dengan pendidikan seperti yang tercantum pada Undang-undang nomor 2 tahun 1989, yaitu mencetak "manusia seutuhnya", dan "Insan Kamil". Artinya bahwa pada diri manusia terdapat berbagai aspek dan untuk itu mestilah dididik secara berkeseimbangan agar melahirkan manusia seutuhnya atau insan kamil.

Ditambahkan Dauly (2014, p. 39) bahwa pendidikan Islam memiliki tiga sasaran pendidikan, yaitu (1) sasaran pengisian otak (*transfer of knowledge*). Guru dapat mengisi kognitif siswa dengan hal yang sederhana seperti menghafal sampai analisis; (2) mengisi hati untuk melahirkan sikap positif (*transfer of value*), sasarannya menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan membenci kejahatan; (3) perbuatan (*transfer of activity*) untuk menimbulkan keinginan melakukan yang baik dan menjauhi perilaku jelek.

Sebagai lembaga yang terus berkembang dan menjadi dambaan umat, maka IAIN Ar-Raniry melakukan transformasi tujuan pendidikan kepada kemampuan membaca ayat-ayat *qawliyah* (Al-Quran) secara tekstual dan kontekstual, juga mampu membaca ayat-ayat *kawniyah* (*cosmos*) di bawah lentara Illahi dan sebagai pendidikan tinggi mampu menjadikan *menjadi* sebuah proses intelektual yang merekonstruksikan paradigma (pola) pikir peserta didik melalui interpretasi secara kontinu dengan berbagai disiplin ilmu sesuai perkembangan zaman.

Menurut Muhaimin (2004, p. 262) pada perkembangan selanjutnya terdapat kecenderungan-kecenderungan baru untuk merespon berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang dalam masyarakat yaitu (1) tuntutan akan studi keislaman yang mengarah pada pendekatan *non mazhabi*, sehingga menghasilkan pemudaran *sektarianisme* dan (2) menyangkut pergeseran dari studi keislaman yang bersifat normatif ke arah yang lebih *historis, sosiologis* dan *empiris*; (3) menyangkut orientasi keilmuan yang lebih luas.

PTAI Aceh sejak tahun 1966, melakukan transformasi tujuan pendidikan untuk memberikan pengajaran tinggi dan menjadikan pusat pengembangan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam, untuk tujuan peletakkan azas membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai keinsafan, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, dan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjadikan ahli dalam bidang agama Islam.

9. Transformasi Pendidik

Pendidik merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Tanggung jawab besar ada di pundak pendidik dalam upaya membimbing siswa menuju tujuan pendidikan yang diinginkan. Karena pendidikan merupakan transisi budaya yang dinamis menuju perubahan yang berkesinambungan sebagai wahana penting bagi perkembangan budaya dan peradaban manusia. Dalam hal ini, pendidik bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, baik spiritual, intelektual, moral, estetika maupun fisik. Dalam konteks pendidikan Islam, Pendidik sering disebut dengan *Murabbi*, *mu'alim*, *mu'addib* Ketiga term tersebut mempunyai penggunaan tersendiri menurut peristilahan yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam. Di samping itu, istilah pendidik kadang kala disebut melalui gelarnya, seperti, *al-ustadz dan syaikh* (Wehr, 1976, pp. 11, 279, 637).

Pendidik atau ustadz merupakan faktor utama keberhasilan belajar siswa. Kehadiran pendidik dalam proses belajar mengajar sangat penting karena kemampuan guru dalam menggunakan metode, menguasai materi dan menggunakan teknik penyajian yang tepat dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar, serta menentukan mutu dan hasil belajar pada lembaga pendidikan.

Perkembangan dan kemajuan suatu negara tergantung pada kualitas pendidikannya. Karena pendidikan memandu cara orang hidup. Pendidikan berkelanjutan tidak terlepas dari peran pendidik sebagai kunci keberhasilan. Pendidik bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik, rencana yang membuat siswa senang untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan mendorong siswa agar termotivasi dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pendidik yang berkualitas memiliki keterampilan khusus dan strategi pembelajaran yang baik dalam hal memberikan pengetahuan kepada siswa, sedangkan pendidik Islam bersifat holistik.

- **Pendidik Dayah**

Rasul adalah pendidik yang mengayomi umat dan menjadi pengaruh serta teladan bagi manusia. dalam sejarah Islam, guru dan Ulama selalu berjalan beriringan, atau bahwa Ulama juga seorang guru. Nabi, sebagai penerima wahyu, mengajarkan wahyu kepada orang-orang yang beriman. Pertama di rumah al-Arqam bin al-Arqam, dan setelah pindah ke Madinah, beliau mengajarkan wahyu di sebuah masjid. Masjid adalah lembaga sosial yang meliputi berbagai fungsi, ibadah, pendidikan, pengadilan, tempat latihan militer, dll. Fungsi masjid (Langgulung, 1994, p. 195). Demikian pentingnya seorang pendidik dalam menyukseskan tujuan pendidikan, kiranya dituntut menggali konsep dasar tentang pendidik yang sesuai dengan apa yang telah disabdakan Rasullah SAW dalam pendidikan Islam.

Pendidik pada lembaga pendidikan *dayah* disebut dengan *Teungku*. secara berstruktur *Teungku* dikategorikan kepada empat tingkatan. *Pertama, Teungku Meunasah*, yang mengajarkan anak-anak tingkat dasar (*Ibtidaiyah*). *Kedua, Teungku Rangkang*, yang mengajarkan murid-murid tingkat menengah (*Tsanawiyah*). *Ketiga, Teungku Balee*, yang mengajarkan murid-murid tingkat menengah atas (*Aliyah*). *Keempat, Teungku Chik* merupakan guru besar. *Teungku Chik* tidak lagi mengajar pada semua kelas, tetapi mengajar hanya pada kelas tinggi untuk *teungku balee* (Amiruddin, 2003, p. 2).

Jadi jelaslah bahwa pendidik di *dayah* tersusun secara bertingkat sesuai jenjang pendidikan. Namun pendidik *dayah* tidak diatur dalam satu peraturan yang khusus, baik sistem pengangkatan, kompetensi, persyaratan ijazah, dan persyaratan lain-lainnya. Proses pengangkatan pendidik *dayah* ditentukan oleh pimpinan *dayah* (*Teungku Chik*) dan sesuai dengan tradisi yang diterapkan dalam lingkungan sosial *dayah*, hal ini berdasarkan penuturan Teungku Daud Zamzani.

Ada beberapa faktor yang diperhitungkan untuk menetapkan *Teungku dayah*. *Pertama*, semua *Teungku dayah* adalah Santri, yang belajar setidaknya sampai kelas enam di *dayah*. *Kedua*, memiliki

akhlak yang baik dan tidak pernah terkutuk secara moral. Ketiga, adanya kepercayaan dari pemimpin *dayah* (*Teungku Chik*). Keempat, hidup di lingkungan *dayah*. Sedangkan batasan yang diberikan oleh Badruzzaman (2016) mengenai karakteristik pendidik *dayah* adalah: Pertama, tenaga pendidik *dayah* memiliki sifat *zhuhud*. Artinya, mereka hanya mencari dan mengajarkan keridhaan Allah SWT, bukan berdasarkan materi. Kedua, pendidik harus memiliki tubuh yang sehat, dibersihkan dari segala macam kotoran, dan dibersihkan dari segala macam sifat keji. Ketiga, pendidik melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Keempat, pendidik harus memiliki sikap toleran, ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, sabar, mampu mengendalikan amarah, selalu baik hati, dan membela kehormatan diri di depan umum. Keenam, pendidik selalu profesional di kelas dan menggunakan mata pelajaran yang diajarkannya dengan baik.

Beberapa persyaratan pendidik *dayah* tidak diatur dalam peraturan tetap, tetapi penerapannya tergantung pada evaluasi, kondisi sosial perkembangan daya, kebijakan yang diikuti oleh kepala *dayah*, dan sistem yang berlaku di *dayah* tersebut. berat pada Penunjukan penuh tanggung jawab pemimpin *dayah* setempat.

- **Pendidik Madrasah**

Pendidik merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan madrasah. Oleh karena itu, kompetensi dan dedikasi sangat diutamakan bagi seorang pendidik. Sebagai contoh, pada mulanya pendidik MI di Aceh adalah orang-orang yang mau menerima pendidikan dan pelatihan tentang pengajaran, hal ini disebabkan pada masa itu lembaga-lembaga pendidikan masih sangat terbatas. Sehingga ijazah bukanlah menjadi syarat utama untuk lulus sebagai pendidik, melainkan cukup surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala madrasah dapat digunakan untuk pengurusan serta penetapan angka kreditnya. Contohnya, lulusan sekolah Al Muslim Matang Gelumpang Dua Kabupaten Aceh Utara, yang banyak diangkat menjadi guru SRI (transformasi dari MI) (Syamsuddin, 2002, p. 207).

Lebih lanjut Syamsuddin (2002, p. 208) juga menjelaskan bahwa sebelum tahun 50-an, mayoritas pendidik madrasah adalah lulusan pendidikan setingkat madrasah atau lulusan *dayah*. Namun mereka memiliki kapasitas sebagai pengajar. Sejak tahun 1950-an, dikeluarkan regulasi mengenai syarat pendidik. Maka untuk menjadi guru agama, harus lulus seleksi "Ujian Guru Agama (UGA)". Berikutnya Kementerian Agama mengeluarkan surat ketentuan bahwa untuk menjadi guru MI wajib memiliki ijazah serendah-rendahnya berijazah Pendidikan Guru Agama (PGA) selama enam tahun. Maka guru yang beridentitas UGA kemudian disetarakan melalui sistem "Kursus Persamaan Pendidikan Guru Agama (KPPGA) selama enam bulan.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1951, ditetapkan alih fungsi dari Sekolah Menengah Islam tingkat Atas (SMIA) Banda Aceh menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA). SGHA dan PGA merupakan sekolah Dinas Kementerian Agama, siswa sekolah tersebut mendapat biaya ikatan Dinas, untuk mempersiapkan calon-calon guru pada madrasah.

SGHA mempunyai empat jurusan, yaitu jurusan A menghasilkan calon guru IPS di MI dan MTs, jurusan B menjadi guru IPA, jurusan C menghasilkan guru agama di SD dan SMP, serta jurusan D mempersiapkan Hakim Agama (Syamsuddin, 2002, p. 209). Oleh karena itu, pendidik madrasah semuanya disyaratkan mengikuti sekolah dinas keguruan, selain melalui pendidikan formal, berakhlak mulia, sehat jasmani, memiliki kesiapan mental, dan menguasai materi.

- **Pendidik Perguruan Tinggi Agama Islam**

Zainal Abidin Alwi menuturkan bahwa hanya pendidik profesional saja yang mampu mengantarkan anak didiknya mencapai tujuan pendidikan. Sehingga keberadaan pendidik pada PTAI dipandang krusial, sebab tugasnya tidak sekadar mentransfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) atau alih metode (*transfer of methodology*).

Namun harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai (*transfer of value*) kepada peserta didik.

Pendidik pada IAIN Jami'ah Ar-Raniry dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, di samping menjadi pengajar dan pengelola lembaga. Sementara dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bertugas pada IAIN Jami'ah Ar-Raniry, tapi ditugaskan atau diundang pada waktu-waktu tertentu untuk mengajar seperti Prof. M. Hasbi Ash-Shiddiqy Dari Yogyakarta, Prof. Mahmud Yunus dari Jakarta, H. A. Timur Djailani MA dari Jakarta, H. Abu Bakar Atjeh dari Jakarta, dan M. Said dari Medan (Hasjmy, 1969, p. 249).

Pada saat itu pendidik-pendidik pada Perguruan Tinggi disyaratkan memiliki jenjang pendidikan tingkat Sarjana lengkap (Drs) atau Strata Satu. Di samping itu, menguasai kemampuan dasar-dasar agama, kemampuan profesional sesuai dengan bidang mata kuliah yang diampu serta memiliki kemampuan berbahasa asing dan memiliki akhlak yang baik. Sistem rekrutmen diserahkan kepada PTAI sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan Kementerian Agama untuk PTAIN dan PTAIS.

10. Transformasi Pendidik Pada Lembaga Pendidikan Islam di Aceh Era 1966-1998

Transformasi pada pendidik dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV, Pasal 27 ayat yang menyatakan bahwa (2) Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar; ayat (4) Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Jelaslah bahwa terdapat perbedaan antara tenaga kependidikan dengan tenaga pengajar. Jika tenaga kependidikan berkonsentrasi pada bidang teknis, maka tenaga pengajar berfokus pada bidang pengajaran dan pembelajaran. Maka sejalan dengan hal tersebut, institusi pendidikan Islam terus melakukan perbaikan melalui program transformasi pendidik. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

11. Transformasi Pendidik Pada Dayah

Syarat utama untuk menjadi pendidik di *dayah* adalah memiliki kompetensi pada bidang yang diajarkan/keahlian, juga menguasai strategi dan metode penyampaiannya. Dalam perspektif Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, yaitu potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan ajaran Islam (Tafsir, 1992, p. 74). Meskipun masih banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pendidik, namun di sini diberi kemudahan khusus bagi pendidik *dayah* (Amiruddin, 2013, p. 65).

Sehingga syarat utama menguasai materi ajar berkaitan pula dengan sumber ajar. Dan mayoritas sumber ajar pendidik *dayah* adalah sama. Karena biasanya digunakan secara turun temurun. Hal urgen yang harus dimiliki oleh pendidik *dayah* adalah kemampuan menguasai uslub-uslub dan logika bahasa. Namun seiring dengan transformasi maka diberi batasan tentang kriteria pendidik *dayah*. Yakni memiliki tanggung jawab, menguasai metode mengajar, mampu mengelola kelas dan profesional, serta mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik sebagai khalifah *fil ardh* dan *'abd* sesuai dengan ajaran Islam, demikian yang diungkapkan oleh Hasbi Amiruddin dalam diskusi akademis bersama peneliti.

Beberapa waktu kemudian, maka untuk menjadi pendidik *dayah* disyaratkan harus berpendidikan sarjana (S-1). Selanjutnya sejalan dengan transformasi *dayah*, menjadi *dayah* modern dan terpadu memiliki pendidik yang berpendidikan sarjana (strata satu) ilmu

keguruan dengan kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Dan sebagian dari mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil Kemenag yang diperbantukan ke *dayah-dayah* yang diangkat oleh Yayasan sesuai kebutuhannya.

12. Transformasi Pendidik Pada Madrasah

Pada era 1966-an, madrasah memiliki ketentuan atau kriteria seorang pendidik, mulai dari proses rekrutmen, jenjang pendidikan, status, dan persyaratan administrasi. Menurut penuturan Ziauddin Ahmad pada september 1996, Transformasi pendidik pada madrasah di Aceh, diawali dengan hadirnya lembaga-lembaga pendidikan untuk menghasilkan guru-guru, seperti Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang memiliki beberapa jurusan pendidikan jenjang Sarjana Muda (BA) dan Sarjana lengkap (Drs) untuk menjadi calon pendidik pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah bidang studi keagamaan dan IKIP Universitas Syiahkuala untuk mendidik guru bidang studi umum. Selain itu, pemerintah melaksanakan pelatihan-pelatihan pendidik secara khusus dan terprogram yang materi pelatihannya sesuai dengan jenjang lembaga di mana guru tersebut ditugaskan. Tahun 1970-an pendidik-pendidik pada madrasah telah memiliki status pendidik yang jelas seperti pendidik PNS, pendidik honor dan pendidik bakti.

Rasio pendidik dan siswa madrasah pada saat itu relatif sudah memadai. Sedangkan pada Madrasah Aliyah Model, Madrasah Aliyah Program Keagamaan dan Madrasah Keterampilan, para pendidik dibekali dengan kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kursus dan pelatihan tersebut merupakan wadah latihan bagi guru untuk membawa perubahan dasar seperti pada tujuan dan perbaikan mutu pendidikan lainnya (Langgulung, 1994, p. 197).

13. Transformasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi Agama Islam

Pada tahun 1988 tepat di usia ke-25 tahun, IAIN Ar-Raniry memiliki tenaga pendidik sejumlah 116 orang. Para tenaga pendidik

tersebut merupakan lulusan IAIN Ar-Raniry maupun lulusan perguruan tinggi lainnya, baik dalam maupun luar negeri dengan standar akademik yang telah ditetapkan sebelumnya. Rekrutmen tenaga pendidik dilakukan melalui seleksi yang selektif. Jumlah dosen IAIN Ar-Raniry sampai tahun 1988 adalah sebanyak 116 dosen, sementara jumlah mahasiswa adalah 4.515 mahasiswa.

Transformasi dosen juga dilakukan melalui peningkatan karir kepangkatan, program pendidikan dan latihan baik dalam negeri maupun luar negeri. Program ini dilakukan melalui pertama, Program Studi Purna Ulama (SPU) yang telah melahirkan delapan angkatan dengan 76 (tujuh puluh enam) lulusan. Kedua, Program Pendidikan Master (S-2/setara) dalam negeri enam orang serta di luar negeri tiga orang. Ketiga, Program Pendidikan Doktor (S-3) dalam negeri sebanyak lima orang dan di luar negeri satu orang (Suhandang, 1988, p. 50). Berikut ditunjukkan data kepangkatan dosen IAIN Ar-Raniry sampai tahun 1988.

Tabel 1. Dosen Tetap IAIN Ar-Raniry Tahun 1988 Berdasarkan Kepangkatan

Fakultas	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
Syari'ah	-	20	7	27
Tarbiyah	-	42	5	47
Ushuluddin	-	18	4	22
Dakwah	1	17	2	20
Adab	-	-	-	-
Jumlah	1	97	18	116

Dari tabel 1. di atas diketahui, bahwa terdapat satu dosen dengan pangkat golongan II, 97 dosen dengan pangkat golongan III, dan 18 dosen dengan pangkat golongan IV. Sehingga total dosen IAIN Ar-Raniry yang telah memiliki pangkat golongan sebanyak 116 dosen.

IAIN Ar-Raniry sampai tahun 1988 telah memiliki tiga orang Guru Besar (Profesor), masing-masing dalam bidang dakwah (Prof. A. Hasjmy), bidang hukum (Prof. Dr. H. Ismuha, SH), dan bidang pendidikan (Prof. H. Ibrahim Husein, MA). Empat orang Doktor, masing-masing dalam bidang filsafat (Dr. Ahmad Daudy, MA), bidang pendidikan (Dr. Safwan Idris, MA), Bidang hukum Islam (Dr. H. Muslim Ibrahim, MA), dan bidang ilmu Agama Islam (Dr. M. Daud Remantan, MA). Enam orang Master/Setara, masing-masing dalam bidang pengajaran bahasa Arab (Drs. RA. Syaugas Rahmatillah, MA dan Drs. H. Zubir Raden, MA), bidang pengajaran bahasa Inggris (Zahlul Army, MA), bidang linguistik bahasa Arab (Drs. Azman Ismail, MA), bidang pelayanan masyarakat (Drs. Hasan Basry, MA) dan bidang komunikasi agama (Drs. Kustadi Suhandang).

Jadi transformasi tenaga pendidik (dosen) pada IAIN Ar-Raniry sampai tahun 1988 dilakukan melalui bentuk (1) sistem rekrutmen; (2) kualifikasi dan kualitas akademik; (3) peningkatan jumlah; (4) pembinaan melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan jenjang pendidikan Master (S-2) dan Doktor (S-3); (5) kepangkatan akademik menjadi Guru Besar (*Profesor*) dan (6) pembinaan-pembinaan professional untuk meningkatkan kualitas akademik sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan tugas perkuliahan mata kuliah yang diberikan pada Jurusan dan Fakultas yang ditempatkan (Suhandang, 1988, p. 50).

14. Transformasi Peserta Didik

Dalam perspektif Pendidikan Islam, peserta didik adalah anak yang tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui suatu lembaga pendidikan. Peserta didik memiliki perbedaan antara periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Peserta didik adalah subjek dan objek. Oleh karena itu, tidak ada kegiatan pendidikan yang berlangsung tanpa partisipasi siswa (Muhaimin, 1993, p. 177). Jadi peserta didik merupakan individu yang masih perlu bimbingan dan arahan dari orang yang sudah dewasa.

Sejalan dengan paradigma transformasi lembaga pendidikan Islam, peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan terhadap potensi yang dimilikinya, serta bimbingan menuju kedewaan, maka pada era tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam melakukan transformasi peserta didik.

Istilah murid diperkenalkan oleh kalangan sufi. Dalam ilmu tasawuf, murid berarti orang yang sedang belajar, mensucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Menurut Tafsir (1992, p. 165) sebutan anak didik mengandung pengertian bahwa guru sangat menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Kasih sayang guru terhadap anak didiknya merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan.

Penggunaan istilah anak didik memberi kesan bahwa proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. Berbeda halnya dengan istilah peserta didik yang terkesan ada partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran.

Rasyidin (2008, p. 149) menjelaskan penyebutan peserta didik adalah seluruh *al-Insan, al-Basyar* atau *bani Adam* yang sedang berada dalam proses perkembangan menuju kepada kesempurnaan atau suatu kondisi yang dipandang sempurna (*al-Insan al-Kamil*). Jadi terma *al-Insan, atau Bani Adam* dalam definisi ini memberi makna bahwa peserta didik itu tersusun dari unsur-unsur jasmani, ruhani, dan memiliki kesamaan universal, yakni sebagai makhluk yang diturunkan atau dikembangkan dari Adam AS. Dilanjutkannya bahwa perkembangan diri peserta didik berkaitan dengan proses mengarahkan peserta didik baik dari fisik (*jismiyah*) maupun dari psikhis (ruhaniyah), *'aqal, nafs, qalb* agar mampu menjalankan fungsi secara sempurna.

Secara *'aqal*, ketika dilahirkan dari rahim ibunya, manusia belum dapat memfungsikannya untuk menalar baik dan buruk atau benar-salah, sedangkan melalui proses *ta'lim, tarbiyah* atau *ta'dib*, maka secara bertahap *'aqal* manusia diasah, dilatih dan dibimbing melakukan penalaran yang logis atau rasional, sehingga manusia dapat menyimpulkan baik-buruk atau benar-salah.

Demikian juga dengan *nafs*, pada saat manusia dilahirkan pada rahim ibunya, kebutuhan manusia cenderung pada pemenuhan jismiyah saja yaitu makan minum. Sedangkan proses *ta'lim*, *tarbiyah* atau *ta'dib*, *nafs* manusia dilatih dan dibimbing untuk melakukan pengendalian, pemeliharaan, dan pensucian diri.

Sedangkan *qalbu*, pada saat manusia dilahirkan, hanya sebatas potensi laten yang belum mampu menangkap cahaya dan memahami kebenaran, maka peserta didik dalam pendidikan Islam individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik fisik, psikologis, sosial dan *relegious* dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi (kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. Peserta didik merupakan makhluk Allah memiliki fitrah jasmani dan rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaniah, ia memiliki bakat, kehendak, perasaan dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan.

Melalui paradigma tersebut, menjelaskan bahwa peserta didik merupakan subyek dan objek pendidikan yang memerlukan bimbingan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya menuju kedewasaan. Potensi suatu kemampuan dasar yang dimiliki tidak akan tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa bimbingan pendidik (Marimba, Ahmad., 1989, p. 32).

Peserta didik juga merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan, di samping faktor tujuan, tenaga pendidik, materi, metode dan evaluasi dan sarana. Peserta didik akan hadir aktif tidak sekadar dengan bentuk jasmaniahnya yang besar, tapi dia juga membawa dimensi rohaniah dengan segala potensi yang diferensial. Maka peserta didik harus dipandang sebagai manusia yang memiliki kemampuan sekaligus kemerdekaan mengembangkan dirinya. Dengan demikian akan tercipta praktik pendidikan yang benar-benar humanistik (Baharuddin, 2007, p. 187).

15. Transformasi Santri *Dayah*

Pada awalnya pendidikan *dayah* di Aceh merupakan lanjutan dari pendidikan di rumah-rumah dan *meunasah* yang dilaksanakan oleh *teungku-teungku*. Murid-murid pada setiap *dayah* pada saat itu tidak tercatat secara baik dan statusnya pun tidak begitu terikat. Sekalipun demikian, pendidikan *dayah* pada masa tersebut telah banyak mendidik Ulama, seperti *Dayah Kreung Kalee* berkembang sejak zaman Belanda dan merupakan *dayah* yang sangat menonjol pada saat itu.

Pemimpin *dayah* yang lahir sebagai kader-kader dari *Dayah Krueng Kalee* di antaranya, *Dayah Indra puri*, *Dayah Tanoh Mirah*, *Darussalam Labuhan Haji*, dan lain-lain (Idris & dkk, 2002, p. 83). Dengan demikian, peserta didik *dayah* adalah orang-orang yang pernah mendapatkan pendidikan *dayah* dalam berbagai tingkatan *dayah*, dari berbagai usia serta dalam berbagai materi, sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan tersebut telah memiliki kompetensi keagamaan tertentu. Sedangkan peserta didik *dayah* modern dan terpadu adalah lulusan siswa-siswa SLTP yang telah memiliki ijazah, kemampuan dasar agama, kemampuan dasar Al-Qur'an, yang proses penerimaannya melalui seleksi masuk siswa baru pada awal tahun ajaran.

Secara statistik gambaran kuantitas *dayah* yang akurat sebelum tahun 1966 masih sukar diperoleh. Menurut catatan Hasjmy (1969) dalam bukunya yang berjudul *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan*, pada tahun 1966 Aceh memiliki sekitar 455 lembaga *dayah* dengan jumlah santri sekitar 20.715 orang. Sementara menurut data statistik Kantor Kementerian Agama Aceh pada saat itu terdapat sekitar 424 lembaga *dayah* di Aceh. Tahun 1991, Bappeda Aceh mencatatkan 488 lembaga *dayah* di Aceh dengan jumlah murid sekitar 81.472 orang dan tenaga pengajar atau *teungku* sebanyak 2.137 orang. Data tersebut dapat dilihat memang jumlah *dayah* tidak banyak perkembangan, tetapi dilihat dari segi perkembangan muridnya (20.715 orang tahun 1966 menjadi 81.472 orang pada tahun 1991), jadi selama kurun waktu 25 tahun

ada sekitar peningkatan 60.757 santri dayah, di tahun berikutnya motivasi untuk pendidikan *dayah* terus berkembang.

Dalam hubungan dengan peningkatan kualitas santri, *dayah* di Aceh melakukan perubahan-perubahan dalam upaya meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan. Hal ini dilakukan mulai dalam bentuk seleksi dilakukan dengan cara penerimaan yang teratur serta terjadwal pada setiap tahun, pengelompokan dalam belajar sesuai dengan kemampuan awal, bukan pada usianya, kemudian ujian kenaikan kelas sampai pada standar persyaratan tamat belajar untuk pemberian ijazah pada tingkat akhir (kelas VII dayah).

Penataan proses tersebut dilakukan pada *dayah-dayah* di Aceh telah telaksana secara teratur dan tertib sehingga semua dokumen santri tertata secara baik dalam bentuk manajemen yang *modern*. Sedangkan peserta didik *Dayah Modern* dan *Dayah Terpadu* adalah lulusan siswa-siswa SLTP yang telah memiliki ijazah, kemampuan dasar agama, kemampuan membaca Al-Quran, yang proses penerimaannya melalui seleksi masuk siswa baru pada setiap awal tahun ajaran.

16. Transformasi Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah

Sejak tahun 1960, madrasah sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan, maka seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut masyarakat sudah mulai meningkat motivasinya untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah, mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah.

Pada saat itu untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah dalam berbagai tingkatan belum memiliki ketentuan yang selektif, baik persyaratan kompetensi peserta didik maupun syarat administrasi lainnya. Untuk mengetahui tingkat motivasi dan perkembangannya peserta didik madrasah, di antaranya dapat dilihat pada jumlah siswa Madrasah Ibtidaiyah di Aceh tahun 1960-1965 sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Peserta Didik MI di Aceh Tahun 1960-1965

Tahun	Jumlah MI	Jumlah Siswa	Jumlah Lokal
1960	200	70.000	1.200
1961	200	80.000	1.201
1962	206	90.221	1.201
1963	206	91.000	1.204
1964	206	92.402	1.208
1965	206	93.043	1.209

Sumber: Data Statistik Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Aceh.

Tabel 2 di atas menunjukkan perkembangan siswa Madrasah Ibtidaiyah relatif rendah, masyarakat belum memiliki animo yang tinggi untuk menyelolahkan anaknya pada Madrasah Ibtidaiyah. Setelah adanya kejelasan aturan tentang perjenjangan madrasah, maka penyelenggaraan madrasah di Aceh terus menampakkan perkembangan. Sejalan adanya kebijakan pemerintah tentang memperkuat pendidikan agama, dan perhatian pemberian bantuan kepada madrasa, serta kejelasan kedudukan madrasah, maka madrasah mengalami transformasi dalam berbagai aspek, diantaranya transformasi peserta didik. Untuk lebih jelas tentang jumlah murid madrasah Ibtidaiyah di Aceh sejak tahun 1970 sampai tahun 1978 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perkembangan Peserta Didik MI di Aceh Tahun 1970-1978

Tahun	Jumlah MI	Jumlah Siswa	Jumlah Lokal (kelas)
1970	206	93.500	1.210
1971	206	94.402	1.208
1972	206	95.043	1.209
1973	206	95.334	1.210
1974	206	96.419	1.213
1975	207	96.608	1.276

Tahun	Jumlah MI	Jumlah Siswa	Jumlah Lokal (kelas)
1976	207	96.884	1.276
1977	207	97.884	1.279
1978	209	98.150	1.282

Sumber data: Statistik Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Aceh, dikutip dari "Buku Sejarah Pendidikan Aceh"

Dilihat dari perkembangan murid pada awal sangat menanjak. Hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah sangat tinggi, terlebih kehadiran madrasah telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dalam hal memberikan pengetahuan agama dan umum secara bersamaan. Ada dua alasan yang melatarbekalangi masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah, yaitu: Pertama, jumlah madrasah Ibtidaiyah telah mampu menampung peserta didik dari berbagai daerah, Kedua, keberadaan madrasah mudah dijangkau oleh masyarakat yang belum memiliki transportasi pada saat itu. Pada umumnya madrasah didirikan pada pemukiman penduduk yang padat.

Begitu juga dengan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, ketika itu dikenal dengan MTSAIN dan MAAIN. Pada awal masa perubahan kedua madrasah tersebut mempunyai murid yang banyak. Pada tahun 1962, Madrasah Tsanawiyah mempunyai murid sebanyak 3870 orang, yang tersebar di 44 unit Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah kelas 145 ruang. Tahun 1966 jumlah Madrasah Tsanawiyah bertambah menjadi 56 unit dengan jumlah murid menjadi 6.668 orang. Demikian pula halnya dengan Madrasah Aliyah yang awalnya berjumlah 7 unit memiliki 7 ruang kelas dan jumlah muridnya sebanyak 190 orang. Pada tahun 1966, Madrasah Aliyah bertambah menjadi 9 unit dengan jumlah muridnya 370 orang. Jumlah tersebut pada tahun-tahun selanjut terus berkurang karena pembatasan lulusan madrasah dalam melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (Hasjmy, 1969, p. 410).

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah meleburkan Madrasah dalam sistem pendidikan nasional di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, kemudian diperkuat oleh Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Namun seiring berjalannya waktu, Kepres dan Inpres tersebut dianggap bukan menyetarakan madrasah, malah mendiskriminasikannya. Kebijakan pemerintah tersebut kemudian memunculkan reaksi keras dari umat Islam menolak kedua peraturan tersebut. Untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan umat Islam dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai kongkurensi Kepres dan Inpres.

Setelah itu, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975. Setelah adanya SKB tiga menteri tersebut, Madrasah mengalami perkembangan yang sangat signifikan terkait jumlah siswa karena status siswa di Madrasah dan sekolah dianggap sama, bahkan siswa Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum atau pindah ke Sekolah Umum yang sejenjang tanpa harus memiliki SKKB dari Sekolah Umum. Perubahan ini merupakan transformasi yang sangat baik dalam penyelenggaraan madrasah, khususnya terhadap posisi siswa yang sebelumnya dianggap "tertinggal" (Yuningsih, 2015, p. 185).

17. Transformasi Mahasiswa Perguruan Agama Islam.

Pada saat IAIN Ar-Raniry didirikan di tahun 1960, ada semacam kekhawatiran akan sulitnya mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi syarat. Kekhawatiran itu sangat beralasan, mengingat Madrasah Aliyah yang ada di Aceh begitu terbatas. Karena calon-calon mahasiswa yang dapat diterima pada IAIN Ar-Raniry adalah lulusan Madrasah Aliyah, di samping sebagiannya adalah sekolah kejuruan agama seperti PGA yang khusus diperuntukan untuk calon guru demikian yang dituturkan Zainal Abidin Alwi pada desember 2016.

Maka untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, muncullah keinginan untuk mendirikan sekolah persiapan guna mempersiapkan calon mahasiswa dalam jumlah yang memadai. Dengan dibukanya sekolah persiapan IAIN yang jumlahnya mencapai 12 sekolah di seluruh Aceh maka problema kekurangan mahasiswa dapat tertanggulangi sehingga proses belajar mengajar pada IAIN Ar-Raniry tidak terkendala dengan kekurangan mahasiswa.

Sekolah persiapan IAIN mula-mula dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon mahasiswa bagi Fakultas Tarbiyah yang akan di buka pada tahun 1963. Fungsi sekolah persiapan adalah mempersiapkan calon-calon mahasiswa bagi berbagai Fakultas pada IAIN Ar-Raniry. Lama belajar pada sekolah persiapan adalah 2 tahun. Pelajar-pelajar dapat diterima langsung pada tingkat II, atau menurut tingkatan pengetahuan masing-masing pelajar (Hasjmy, 1969, p. 229).

Keadaan ini berjalan lama. Pada tahun 1964/1965 jumlah mahasiswa IAIN Ar-Raniry keseluruhannya 1.193 orang, namun tenaga pengajar yang ada sangat terbatas, namun hal ini tidak menjadi masalah sebab sarjana atau alumni IAIN langsung diangkat menjadi pengajar, selain lulusan dari IAIN Yogyakarta, IAIN Jakarta dan Timur Tengah.

Setelah eksistensi Perguruan Tinggi Agama Islam semakin terlihat dan dikenal oleh masyarakat Aceh lewat sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai media sosial dan massa, ditambah dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), pengabdian dosen dalam masyarakat dan kiprah alumni dalam berbagai institusi pemerintah dan masyarakat. maka perubahan-perubahan tersebut berdampak pada transformasi peserta didik (mahasiswa).

Jumlah mahasiswa yang mendaftar ke IAIN Ar-Raniry semakin meningkat mulai awal tahun 1980-an. Pada saat itu, IAIN Ar-Raniry dapat menerima calon mahasiswa tamatan SLTA umum dan lulusan *dayah-dayah* di Aceh. Berdasarkan data yang dirilis oleh Suhandang

(1988, p. 45), Pada tahun akademi 1978-1979, calon mahasiswa baru yang mendaftar untuk masuk ke IAIN Ar-Raniry berjumlah 380 orang dan meningkat sangat signifikan di tahun 1988 dengan jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar masuk IAIN Ar-Raniry sebanyak 1500 orang, pada tahun 1988/1989 menjadi 4.515 orang sehingga setiap tahunnya IAIN Ar-Raniry terus mengalami peningkatan jumlah pendaftar dan mahasiswa yang diterima.

18. Transformasi Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang sangat penting dan memungkinkan untuk direviu dalam jangka waktu tertentu (Rasyidin & Nizar, 1994, p. 7). Kurikulum juga diartikan sebagai *the subjects those are included in a course of study or thought in a school*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *Manhaj* atau jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan orang-orang yang didik/dilatih mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka (Ramayulis, 2004, p. 128). Ditambahkan oleh Saylor & Alexander (1966, p. 56) bahwa kurikulum adalah segala usaha lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan atau menimbulkan hasil-hasil belajar yang dikehendaki, apakah di dalam situasi-situasi sekolah ataupun di luar sekolah/ perguruan Tinggi.

Transformasi kurikulum pada lembaga pendidikan Islam di Aceh dilandasai dengan nilai-nilai religiusitas di kehidupan masyarakat dan sebagai daerah Istimewa. Sehingga kedua aspek ini tercermin pada kurikulum pendidikan di Aceh yang berbeda dengan daerah lain di nusantara.

Jadi secara umum, kurikulum diartikan sebagai seluruh kegiatan yang dilaksanakan di bawah bimbingan sekolah/perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan sebab kualitas pendidikan sangat tergantung pada pelaksana kurikulumnya. Dilihat dari segi hirarkinya, tujuan pendidikan terdiri dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. Keseluruhan tujuan ini saling berinteraksi dan saling berpengaruh,

sehingga akan menghasilkan warga negara yang dicita-citakan oleh agama, yaitu warga negara yang memiliki iman dan taqwa serta berilmu pengetahuan dan terampil dalam teknologi serta dapat mengamalkan ilmu bagi dirinya, keluarga dan masyarakat.

Menurut Hamalik (2014, p. 56) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, dan teknis yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Praktisnya, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang member pedoman tentang jenis, lingkup, serta proses pendidikan. Sederhananya, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa yang terdiri dari rangkaian pengalaman belajar dan di dalamnya terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan pelajari oleh siswa dalam waktu tertentu untuk memperoleh sejumlah pengetahuan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu.

Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia muslim seutuhnya, perkembangan ilmu dan teknologi.

Secara substansial, Kurikulum pendidikan Islam berbeda-beda isinya menurut kondisi perkembangan Agama Islam karena kaum muslimin berada dalam lingkungan dan negeri yang berbeda-beda, walaupun mereka sepakat bahwa kitab suci Al-Quran dijadikan sumber pokok ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, tetapi Al-Quran tetap sumber pedoman pendidikan di seluruh negara yang menganut Agama Islam (Arifin, 2000, p. 85).

Dengan demikian kurikulum pendidikan Islam tidak hanya merupakan penjabaran mengenai rangkaian ilmu pengetahuan yang harus dijabarkan, tetapi juga kegiatan yang bersifat pendidikan yang dianggap perlu karena memiliki pengaruh terhadap anak didik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga pendidikan agama Islam di Aceh didirikan oleh pihak-pihak swasta, yaitu Ulama-Ulama yang berpikiran maju, yang ingin memperbaiki untuk kebangkitan dan kejayaan Islam. Sesuai dengan tuntutan zaman dalam mengembangkan pendidikan Islam, tentu saja masing-masing dengan kemampuan leadership dan manajerialnya. Dengan kemampuan tersebut, maka pengaruh tersebar pada masyarakat. Selain kemampuan masyarakat dalam berinfaq. Berinfaq merupakan faktor yang diperhitungkan dalam pengembangan pendidikan Islam, hal ini juga berpengaruh kepada pemberlakuan kurikulum yang bervariasi menurut jenis dan tingkatan pendidikan pada setiap lembaga pendidikan Islam di Aceh, demikian disampaikan oleh Tengku Zamzami.

19. Transformasi Kurikulum Dayah

Perkembangan *dayah* di Aceh telah memberi andil besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di nusantara. *Dayah* sebagai lembaga pendidikan di Asia Tenggara telah menjadi model awal bagi perkembangan lembaga pendidikan Islam lainnya. Lembaga pendidikan tertua dalam sejarah pendidikan di Aceh adalah *dayah*. Berkaitan dengan kurikulum, maka tujuan pendidikan *dayah* merujuk pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. *Dayah* juga memerhatikan aspirasi masyarakat sekitar, sehingga aspirasi ini diakomodir dalam kurikulum *dayah*.

Dayah Cot Kala merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di Aceh yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Islam Peureulak. Setelah itu lahir *Dayah* Serele di bawah pimpinan Teungku Syekh Sirajuddin (1012-1059 M), *Dayah* Blang Priya yang dipimpin oleh Teungku Ja'kob (1155-1233 M), *Dayah* Batu Karang di bawah pimpinan Teungku Ampon Tuan, *Dayah* Lam Keuneuen di bawah pimpinan Teungku Syekh Abdullah Kan'an (1196-1225 M) (Pazzan, 2010, p. 4).

Perkembangan kurikulum *dayah* di Aceh pada masa-masa awal, secara kongkrit sulit untuk dideskripsikan karena keterbatasan penelitian terhadap *dayah*. Maka melalui tulisan Duhri (2016, p.

155) tentang kurikulum pembelajaran yang diajarkan pada *dayah* Cot Kala menggunakan kitab-kitab Bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang diajarkan antara lain adalah fiqh muamalat, tauhid, tasawuf/akhlak, geografi (ilmu bumi), ilmu tata negara dan Bahasa.

Menurut Hasjmy (1980, p. 20), *dayah-dayah* di Aceh pada masa Kerajaan Islam setingkat dengan Fakultas pada Perguruan Tinggi. Dilanjutkannya bahwa masyarakat Aceh pada masa tersebut telah unggul, karena telah mendapatkan pendidikan pada tingkat Fakultas dan Perguruan Tinggi. Kota Banda Aceh adalah pusat kegiatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan digelar dengan “Kota Universitas”, sebab pada abad ke 16-17 telah ada pusat kegiatan ilmu pengetahuan setingkat Fakultas.

Hal ini dapat ditelusuri lewat, *Pertama*, Masjid Baiturrahim didirikan oleh Sultan Iskandar Muda tahun 1607 M dalam kompleks Keraton Darud Dunia. Materi pelajaran yang diajarkan mencakup ilmu politik dan hukum tata negara. *Kedua*, Masjid Musyahadah yang didirikan oleh Sultan Mughayat Syah dan kompleks Keraton Kuta Alam tahun 1637 M, materi pelajaran yang diajarkan ilmu kebudayaan. *Ketiga*, Masjid Jami’ Baiturrahman yang dibangun oleh Sultan Alaidin Mahmud Syah I tahun 1692 M. Masjid ini di samping sebagai pusat peribadatan juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan guru yang didatangkan dai luar kerajaan Aceh seperti Turki, Arab, Parsia dan India. Penuntut ilmu di Masjid ini bukan hanya orang Aceh tetapi juga berasal dari luar Aceh seperti Syekh Muhammad Yusuf al-Makasari berasal dari Sulawesi.

Dayah sejak masa penjajahan sampai dengan tahun 1966 memfokuskan pada materi-materi Islam saja, seperti tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, bahasa Arab dan memahami teks-teks kita yang ada di *dayah* yang merupakan karya Imam Syafi’i. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, Ulama-Ulama Aceh mulai memperbaiki dan membangkitkan kejayaan Islam, serta melakukan penyesuaian dengan tuntutan zaman dalam mengembangkan pendidikan Islam.

Dalam perkembangan pendidikan Islam, *dayah-dayah* di Aceh memiliki variasi dalam aspek kurikulum, sistem pendidikan dan

materi pelajaran, serta sumber belajar yang digunakan. Tidak ada kesamaan antara satu *dayah* dengan lainnya, walaupun tujuan pendidikan pada semua *dayah* sama, yaitu untuk mencetak calon Ulama. Kemudian pengaruh ilmu modern mulai masuk ke dalam lingkungan *dayah*, maka ada usaha-usaha pembaharuan dan penyatuan sistem dan kurikulum *dayah*, seperti pada *Dayah* Inshafuddin telah menerapkan tingkatan pendidikan *dayah* dan susunan kurikulum.

Amiruddin (2013, p. 57) menjelaskan tentang muatan-muatan yang terkandung dalam kurikulum *dayah*, sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dengan pendidikan dan dibahas dalam salah satu aspek falsafah yang disebut wujud.

b. Materi

Materi yaitu bahan pelajaran yang akan diberikan dalam pendidikan, kendatipun sebenarnya materi banyak, tetapi intinya adalah ilmu yang dibahas dalam falsafah ilmu.

c. Metode

Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut kepada anak didik.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah cara mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai terpenuhi atau tidak.

Transformasi kurikulum *dayah* di Aceh, diawali dengan pengelompokan mata pelajaran secara terperinci untuk mencapai kemampuan yang ingin dicapai pada setiap tingkatan *dayah*.

Tabel 8. Kurikulum Dayah Tradisional di Aceh Tahun 1990

Tingkat/ Kelas	Bidang Studi	Nama Kitab Wajib
I	1. Fikih	1. Matan Taghrib
	2. Nahu	2. Jurumiyah
	3. Sharaf	3. Matan Bina
	4. Tasawuf	4. Taisirul Kallaq
	5. Tauhid	5. Aqidah Islamiyah
	6. Tarikh	6. Khulasah I
	7. Al-Qur'an	7. Tajwid
	8. Insya	8. Imla'
	9. Hadist	9. Matan Arba'in
	10. Amal Ibadah	
II	1. Fikih	1. Matan Taghrib
	2. Nahu	2. Matammimah
	3. Sharaf	3. Kailani
	4. Tasawuf	4. Hadist Matan Arba'in
	5. Tauhid	5. Ta'lim Muta'allim
	6. Tarikh	6. Khamsatun Mutun
	7. Al-Qur'an	7. Khulasah Jilid II
	8. Insya	8. Tajwid
	9. Hadist	9. Insya'
	10. Amal Ibadah	
III	1. Fikih	1. Fathul Qarib
	2. Nahu	2. Matammimah
	3. Sharaf	3. Kifayatul Awam
	4. Tasawuf	4. Kailani
	5. Tauhid	5. Tangkihul Qaulil Hadist
	6. Tarikh	6. Ta'lim Muta'allim
	7. Al-Qur'an	7. Khulasah II
	8. Insya	8. Tajwid
	9. Hadist	9. Imla'
	10. Amal Ibadah	

Tingkat/ Kelas	Bidang Studi	Nama Kitab Wajib
IV	1. Tauhid	1. Hudhudi
	2. Fikih	2. I'anutul Tahlabin (3&4)
	3. Nahu	3. Alfiyah
	4. Sharaf	4. Salsul Madkhal
	5. Tasawuf	5. Muraqi Ubudiyah
	6. Mantiq	6. Idhahul Mubham
	7. Ushul Fiqh	7. Lathaiful Isyarah
	8. Bayan	8. Sawi Dardir
	9. Hadist	9. Majalisu Tsaniah
	10. Al-Qur'an	10. Tajwid
	11. Isnaya'	11. Imla'
	12. Amal Ibadah	

Sumber data: Dayah Darussa'dah Idi Cut Aceh Timur.

Tabel 9. Kurikulum Dayah Modern di Aceh Tahun 1990

No	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
Pendidikan Agama:				
1	Akidah Akhlah	2	2	2
2	Fiqh	4	4	4
3	Quran Hadist	5	5	5
4	Ilmu Hadist	2	2	2
5	Ilmu Tafsir	2	2	2
6	Ushul Fiqh	4	4	4
7	Bahasa Arab	5	5	5
8	SKI	2	2	2
9	Tauhid	2	2	2
10	Tasawuf	2	2	2
11	Nahwu	4	4	4
12	Sharaf	4	4	4

No	Mata Pelajaran	Kelas		
		I	II	III
13	Mantiq	2	2	2
14	Balaghah	2	2	2
15	Muthala'ah	2	2	2
16	Hadist	2	2	2
17	Tahfidzul Quran	2	2	2
18	Tafsir	1	1	1
Jumlah		49	49	49
Pendidikan Umum				
1	PPKN	2	2	2
2	Bahasa Indonesia	4	4	4
3	Sejarah Nasional/Umum	2	2	2
4	Bahasa Inggris	4	4	4
5	Matematika	2	2	2
6	Sosiologi/Antropologi	-	-	2
7	Penjaskes	2	2	-
8	Pendidikan Seni	-	-	-
9	Fisika	-	-	-
10	Biologi	-	-	-
11	Kimia	-	-	-
12	Ekonomi	-	-	-
13	Geografi	-	-	-
14	Sejarah Budaya	-	-	-
15	Tata Negara	-	-	-
Jumlah		16	16	16
Jumlah Total		65	65	65

Sumber data: Dayah Modern Bustanul Ulum Langsa, Aceh.

Kurikulum *dayah* tersebut, telah dimasukan mata pelajaran pengetahuan umum, seperti mata pelajaran pada kurikulum madrasah formal, kemudian telah terperinci menurut masing-

masing kelompok mata pelajaran serta kitab-kitab yang digunakan sebagai tersebut dalam tabel 10. di bawah ini:

Tabel 10. Kurikulum *Dayah* Terpadu di Aceh Tahun 1990

No	Tingkat	Kitab yang digunakan
1	Tingkat Pertama	
	Al-Qur'an	
	Tauhid	Aqidatul Awam atau sederajat
	Fiqih	Safinatussalihah atau sederajat
2	Tingkat Kedua	
	Tajwid	Hidaya tussibyan atau sederajat
	Fiqih	Matan Taqrib atau sederajat
	Tauhid	Kifayatul Awam atau sederajat
	Nahwu	al- Ajjurumiah atau sederajat al- Mutammimah atau sederajat
3	Tingkat Ketiga	
	Tafsir	Tafsir Jalalain atau sederajat
	Hadis	Bulughul Maram atau sederajat
	Tauhid	Tuhfatul Murid atau sederajat
	Fiqih	Fathul Mu'in atau sederajat
	Nahwu/Saraf	Alfiah ibnu Malik atau sederajat
4	Tingkat Keempat	
	Tafsir	Tafsir Munir dan yang sederajat
	Ilmu Tafsir	Itmamuddirayah dan yang sederajat
	Hadis	Attajridussarihah dan yang sederajat
	Musthalah	Syarah Al Baiqunyah dan yang sederajat
		Alfiah Suyuti dan yang sederajat
	Fiqih	Kifayatul Ahyar dan yang sederajat
		Lathaiful Isyarah dan yang sederajat
Usul Fiqh	Al Nawahibussaniyah dan yang sederajat	
Qawaid Fiqih	Al jauharul Makmun dan yang sederajat	

No	Tingkat	Kitab yang digunakan
	Balaghah	Sullamul Manauraq dan yang sederajat
		Hidayatul Azdkiya dan yang sederajat
	Manthiq	Ihya Ulumuddin dan yang sederajat
	Tasawuf	

Sumber Data: Buku "Peranan Dayah Pembangunan Pendidikan di Aceh Dalam Rangka Mengsuksekan pelita IV Tahun 1985.

Transformasi kurikulum pada *dayah-dayah*, memuat mata pelajaran yang berbeda pada tiap tingkat/kelas, pembagian komponen mata pelajaran, memiliki kitab utama/pegangan, dan terdapat materi-materi keterampilan serta materi penunjang untuk kemandirian santri, maka kurikulum dayah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

20. Transformasi Kurikulum Madrasah

Melalui penetapan Menteri Agama Republik Indonesia No. 43 tanggal 24 Desember 1952, maka diatur mengenai proporsi kurikulum pada madrasah-madrasah yang bertransformasi menjadi Sekolah Rendah Islam (SRI). Rasio materi pelajaran agama dengan pelajaran umum adalah 34 : 66. Selain itu SRI mulai mendapat bantuan/subsidi, biaya, alat-alat, mobiler dan buku-buku pelajaran. Selanjutnya di tahun 1959, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959 yakni mengalihkan status SRI menjadi SRIN (Sekolah Rendah Islam Negeri). Secara otomatis, SRIN berada di bawah dan diasuh oleh Kementerian Agama. Dengan keputusan Menteri Agama Nomor 104 tahun 1962 diatur kembali tentang proporsi mata pelajaran agama dan umum, terdapat perubahan dari sebelumnya, yakni menjadi 32 : 68 (pelajaran agama 85 jp, sementara pelajaran umum 166 jp). Berdasarkan surat keputusan ini, maka SRIN berubah lagi menjadi MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) dengan lama belajar 6 tahun.

Tabel 4. Kurikulum MI di Aceh Tahun 1962

No	Pembagian Mata Pelajaran	Jenis Mata Pelajaran
1	Agama	a. Qur'an b. Ibadah/Fiqh c. Tauhid d. Tafsir/Hadits e. Tahzib/Akhlak f. Tarikh Islam
2	Bahasa Arab	a. Muhadasah b. Muthalaah c. Qawaid d. Insyak e. Imlak
3	Umum	a. Bahasa Indonesia b. Berhitung c. Menulis d. Menggambar e. Seni Suara f. Bersenam/Pekerjaan Tangan g. Ilmu Bumi h. Ilmu Alam i. Ilmu Hayat j. Sejarah

Sumber Data; Buku Perkembangan Pendidikan di Naggroe Aceh Darussalam tahun 2002.

Kurikulum MTsN sebelum tahun 1966, proporsi materi pelajaran umum dengan pelajaran agama adalah 45 : 55. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Kurikulum Madrasah Tsnowiyah di Aceh Tahun 1966

No	Bidang Studi	Kelas/Jam			Ket
		I	II	III	
1	Agama	14	16	16	Agama: 55%
	Al-Qur'an/Hadis	5	5	5	
	Hadis/Mustalah Hadis	2	3	3	
	Fiqh/Ushul Fiqh	3	4	4	
	Tauhid	2	2	2	
	Tarikh Islam	2	2	2	
2	Bahasa Arab	10	10	10	
	Muthala'ah/Muhadasah	2	2	2	
	Nahwu/Sharaf	4	4	4	
	Insya'/Tarjamah	2	2	2	
	Mahfudhat	1	1	1	
	Imlak/Khat	1	1	1	
3	Umum	20	20	22	Umum: 45%
	Bahasa Indonesi	3	3	3	
	Bahasa Inggris	3	3	3	
	Ilmu Bumi	2	2	2	
	Sejarah	1	1	1	
	Ilmu Hayat/Ilmu Kesehatan	2	2	2	
	Ilmu Alam	1	1	1	
	Aljabar/Ilmu Ukur	3	3	3	
	Seni Suara/Menggambar/ Pekerjaan Tangan	1	1	1	
	Pendidikan Jasmani	2	2	2	
	Tata Negara/Civic	1	1	1	
	Administrasi	1	1	1	
	Ilmu Pendidikan Jiwa	-	-	2	
Jumlah Total		44	46	48	

Sumber data: Buku Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darusslam Tahun 2002.

Tabel 6: Kurikulum Madrasah Aliyah di Aceh Tahun 1966

No	Bidang Studi	Kelas/Jam			Ket
		I	II	III	
1	Agama	18	18	19	Agama: 63%
	Tafsir Quran	3	3	3	
	Hadist	3	3	3	
	Musthalah	1	1	1	
	Fiqh	5	5	5	
	Ushul Fiqh	2	2	2	
	Tauhid	2	2	2	
	Mantiq	1	1	1	
	Perbandingan Agama	-	-	1	
	Tarikh Islam/Kebudayaan Islam	1	1	1	
2	Bahasa Arab	12	12	12	
	Musthalah	4	4	4	
	Qawa'id	2	2	2	
	Insyak	2	2	2	
	Muhadatsah	2	2	2	
	Balaghah	1	1	1	
	Khath/Mahfudat	1	1	1	
3	Umum	18	18	18	Umum: 37%
	Bahasa Indonesia	3	3	3	
	Bahasa Inggris	3	3	3	
	Ilmu Hayat/Kesehatan	1	1	1	
	Ilmu Bumi	1	1	1	
	Ilmu Alam/Ilmu Kimia	1	1	-	
	Ilmu Pasti (Berhitung, Aljabar, Ilmu Ukur)	3	3	3	
	Sejarah/Ilmu Kebudayaan	1	1	1	
	Ekonomi/Koperasi	1	1	1	
	Tata Negara/Tata Hukum	1	1	1	
	Administrasi	1	1	-	

No	Bidang Studi	Kelas/Jam			Ket
		I	II	III	
	Seni-Suara/Menggambar	1	1	1	
	Pendidikan Jasmani	1	1	1	
	Ilmu Mendidik	-	-	2	
Jumlah Total		48	48	49	

Sumber data: Buku Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002.

Setelah lahirnya SKB Tiga Menteri, madrasah menjadi sub bagian dari pendidikan nasional yang memiliki peranan penting dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif serta mencapai cita-cita agama, maka perlu dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan di madrasah yang dimulai dari tingkat ibtidaiyah. Upaya peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah agar setingkat dan standar dengan pengetahuan umum di Sekolah Dasar di antaranya melalui transformasi kurikulum.

Tabel 11. Kurikulum MI di Aceh Tahun 1976

No	Bidang Studi	Kelas						Jlh
		I	II	III	IV	V	VI	
1	2	3						4
1	Aqidah – Akhlak	3	3	2	2	2	2	14
2	Al-Qur'an – Hadits	2	2	2	3	3	3	15
3	Ibadah – Syari'ah	3	3	3	3	3	3	18
4	Sejarah Islam	-	-	2	2	2	2	8
5	Bahasa Arab	-	-	2	4	4	4	14
6	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
7	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	36
8	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	2	2	2	2	8
9	Matematika	6	6	6	6	6	6	36
10	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	3	4	4	4	19

No	Bidang Studi	Kelas						Jlh
		I	II	III	IV	V	VI	
11	Olah Raga Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
12	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	2	2	12
13	Pendidikan Keterampilan	-	-	2	2	2	2	8
Jumlah		28	28	36	40	40	40	212

Kurikulum tersebut telah terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran seperti mata pelajaran aqidah akhlak, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jumlah jam pelajaran telah diatur secara rinci dengan alokasi waktu yang memadai untuk setiap mata pelajaran.

Sistem Pendidikan Nasional mencakup ketentuan tentang semua jalur dan pendidikan, yang secara implisit mengatur tentang kurikulum Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Dalam kaitan dengan transformasi kurikulum madrasah ini, setidaknya memiliki sistem integrasi dan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum dan diharapkan lulusan memiliki kualitas iman yang baik dan bertaqwa kepada Allah SWT. serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 12. Kurikulum MTs di Aceh Tahun 1976

No	Bidang Studi	Kelas						Jlh
		I		II		III		
		1	2	1	2	1	2	
Umum:								
1	Akidah – Akhlak	2	2	2	2	2	2	12
2	Al-Qur'an – Hadits	3	3	2	2	2	2	14
3	Syari'ah	2	2	3	3	3	3	16
4	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	12
5	Pendidikan Olah Raga Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
6	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	2	2	12

No	Bidang Studi	Kelas						Jlh
		I		II		III		
		1	2	1	2	1	2	
Jumlah		13	13	13	13	13	13	78
Akademis:								
7	Sejarah Islam	2	2	2	2	2	2	12
8	Bahasa Arab	4	4	4	4	4	4	24
9	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24
10	Bahasa Daerah	-2	-2	-2	-2	-	-	8
11	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	24
12	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4	4	4	4	24
13	Matematika	5	5	5	5	5	5	30
14	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4	4	4	4	24
Jumlah		25	25	25	25	27	27	170
Keterampilan:								
15	Pilihan Terikat	3	-	3	-	3	-	9
16	Pilihan Bebas	-	3	-	3	-	3	9
Jumlah		3	3	3	3	3	3	18
Jumlah Total		41	41	41	41	43	43	266

Tabel 13. Kurikulum MA di Aceh Tahun 1976

No	Bidang Studi	Kelas						Jumlah
		I		II		III		
		1	2	1	2	1	2	
Dasar:								
1	Akhlak/Ilmu Tauhid	2	2	2	2	2	2	12
2	Al-Quran – Hadits	2	-	-	-	-	-	
3	Syari'ah	3	-	-	-	-	-	2
4	Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2	3
5	Pend. Olahraga Kesehatan	2	2	2	2	2	2	12
6	Pendidikan Kesenian	2	2	2	2	-	-	12

No	Bidang Studi	Kelas						Jumlah
		I		II		III		
		1	2	1	2	1	2	
Jumlah		13	8	8	8	6	6	41
Akademis:								
7	Sejarah Keb. Islam	2	2	2	2	-	-	8
8	Bahasa Arab	4	3	3	3	3	3	19
9	Matematika	6	2	2	2	3	3	18
10	Bahasa Indonesia	3	3	3	3	3	3	18
11	Bahasa Inggris	4	3	3	3	3	3	19
12	Ilmu Pengetahuan Alam	6	-	-	-	-	-	6
13	Ilmu Pengetahuan Sosial	6	-	-	-	-	-	6
14	Tata Buku Hitung Dagang	-	2	2	2	5	5	16
15	Ekonomi/Koperasi	-	2	2	2	2	2	10
16	Sejarah	-	3	3	3	-	-	9
17	Geografi	-	-	-	-	3	3	6
18	Tafsir	-	3	3	3	3	3	15
19	Hadits	-	3	3	3	3	3	15
20	Fiqh	-	3	3	3	3	3	15
21	Tarikh Tasyri'	-	2	2	2	2	2	10
22	Menggambar/IPA/ Bahasa Asing	-	2	2	2	2	2	10
Jumlah		31	33	33	33	35	35	200
Keterampilan:								
23	Pilihan Terikat	-	3	-	3	-	3	9
24	Pilihan Bebas	-	-	3	-	3	-	6
Jumlah		0	3	3	3	3	3	15
Jumlah Total		44	44	44	44	44	44	256

Keseluruhan program pengajaran diatur dan disusun secara berturut-turut menurut semester dan kelas, baik program akademik maupun program keterampilan. Program akademik adalah kelompok mata pelajaran pada jurusan masing-masing, yang terdiri

dari kelompok mata pelajaran mayor yang diikuti oleh siswa pada jurusan tertentu dan minor yang diikuti jurusan tertentu yang diberi hak kepada siswa untuk memilih salah satu studi yang telah ditentukan. Sedangkan program pendidikan keterampilan diberikan kepada siswa agar memiliki sesuatu kemampuan untuk bekerja. Di samping itu program keterampilan ini dapat menunjang siswa dalam program akademik dan ketrampilan keagamaan.

21. Transformasi Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam

Program pendidikan yang diselenggarakan pada IAIN Ar-Raniry disebut program konvensional yang berlangsung selama lima tahun kuliah efektif, dibagi dalam dua program, yaitu program Sarjana Muda yang harus diselesaikan selama tiga tahun dan program Sarjana lengkap selama dua tahun.

Lulusan Sarjana Muda diberi gelar *BA (Bachelor of Art)* dan lulusan Sarjana lengkap untuk laki-laki diberi gelar *Drs. (Doctorandus)* dan untuk perempuan diberi gelar *Dra. (Doctoranda)*. Pada tingkatan selanjutnya, setelah program sarjana, dikembangkan program pascasarjana (*post Graduate*) bagi para sarjana yang memenuhi syarat. Selanjutnya bagi lulusan program pascasarjana yang memiliki kemampuan yang baik dapat diberi kesempatan untuk menempuh program *Doktor* dengan gelar *Doktor* atau *Ph.D.*

Tabel 7. Kurikulum F.I.A.D. TINGKAT SM Dan DOKTORAL TAHUN 1968

NO	MATA KULIAH	TINGKAT				
		I	II	III	IV	V
I. POKOK:						
1	Sedjarah Dakwah	2	-	-	-	-
2	Ilmu Dakwah	-	2	2	2	2
3	Publisistik Umum	-	2	2	-	-
4	Tauhid	2	2	-	-	-
5	Tafsir	2	2	2	2	2

NO	MATA KULIAH	TINGKAT				
		I	II	III	IV	V
6	Hadist	2	2	2	2	2
7	Ilmu Djiwa Sosial	-	-	2	-	-
Jumlah		8	10	10	6	6
II. PENTING:						
1	Bahasa Arab					
	a.Muthalaah	2	2	2	2	2
	b.Qawaid	2	2	2	2	2
2	Fiqh	2	2	2	2	2
3	Ilmu Djiwa Umum	-	2	-	-	-
4	Sosiologi	2	-	-	-	-
5	Filsafat Umum	-	2	-	-	-
6	Filsafat Islam	-	-	2	-	-
7	Kristologi	-	-	-	2	-
8	Perbandingan Agama	-	-	2	-	-
9	Islamic Studies	-	-	-	-	2
10	Bahasa Indonesia	2	2	-	-	-
11	Rethorika	-	-	2	-	-
12	Tasawuf / Akhlak	-	-	-	2	-
13	Sedjarah Kebudayaan Islam	2	-	2	-	-
Jumlah		12	12	14	10	8
III. LENGKAP:						
1	Bahasa Inggeris	2	2	-	-	-
2	Pantjasila/Tata Negara	2	-	-	-	-
3	Dasar-Dasar Pendidikan	-	2	-	-	-
4	Antropologi Budaja	2	-	-	-	-
5	Management	-	-	-	2	-
6	Bahasa Atjeh	-	-	2	2	-
Jumlah		6	4	2	4	0

NO	MATA KULIAH	TINGKAT				
		I	II	III	IV	V
IV. STADIUM GENERAL:						
1	Kemuhammadijahan	2	2	2	2	2
2	Praktek Dakwah	-	-	4	-	-
Jumlah		8	6	10	10	2
Jumlah Total SKS		34	32	36	30	16

Pada mulanya kurikulum yang diterapkan pada IAIN Ar-Raniry dikelompokkan menjadi empat kelompok mata kuliah, yaitu mata kuliah pokok, penting, pelengkap dan stadium (aplikasi). Masing-masing fakultas diberi wewenang untuk menyusun kurikulum sendiri kemudian Rektor mengusulkan kepada Menteri Agama (Suhandang, 1988, p. 34).

Maka sejak tahun 1977, melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D/VI/2/75 tanggal 11 Januari 1975, IAIN Ar-Raniry menggunakan kurikulum dan silabus yang sudah terstandar. Kurikulum tersebut disusun dengan cara pengelompokan mata kuliah ke dalam tiga komponen:

a. Komponen Institut

Mata kuliah dalam komponen institur merupakan mata kuliah dasar yang menunjukkan identitas IAIN Ar-Raniry dalam mengkaji ilmu agama Islam pada umumnya. Mata kuliah dalam komponen ini wajib dikukuti oleh semua mahasiswa dari setiap Fakultas dan Jurusan di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

b. Komponen Fakultas

Mata kuliah dalam komponen Fakultas merupakan ilmu pengetahuan dasar dalam bidang kajian masing-masing Fakultas. Mata kuliah tersebut khusus diberikan kepada para mahasiswa dari masing-masing Fakultas atau Jurusan yang bersangkutan.

c. Komponen Jurusan

Mata kuliah komponen Jurusan merupakan pengetahuan spesialisasi menurut Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas yang bersangkutan. Mata kuliah tersebut hanya wajib dipelajari oleh para mahasiswa dari jurusan yang bersangkutan saja.

Penyeragaman kurikulum pada IAIN Ar-Raniry mulai dilaksanakan pada tahun 1978, setelah muncul petunjuk tambahan dan terperinci mengenai sistem semester hasil lokakarya pada bulan Maret 1977, yang diikuti oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Alauddin Ujung Pandang dan IAIN Imam Bonjol Padang. Pada waktu itu IAIN mencoba menerapkan dua sistem, yakni sistem kredit semester dan sistem non kredit semester.

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan sistem kredit semester (SKS), sementara IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sunan Ampel Surabaya menerapkan sistem semester non kredit. IAIN Ar-Raniry sendiri sesuai dengan kondisi yang pada waktu itu menerapkan sistem semester non kredit. Dengan sistem ini program pendidikan dibagi dua, yaitu program Sarjana Muda selama enam semester, dan program Sarjana Lengkap empat semester. Dalam hal ini setiap tahun akademik memiliki dua semester (Suhandang, 1988, p. 35).

Sejak tahun akademik 1982/1983, IAIN Ar-Raniry menerapkan sistem perkuliahan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Penerapan sistem kredit semester ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian studi mahasiswa, juga sesuai dengan tuntutan perkembangan dan pembaharuan pendidikan tinggi.

SKS diberlakukan bagi mahasiswa yang masuk tahun akademik 1982/1983 dan tahun-tahun selanjutnya, sedangkan bagi mahasiswa yang masuk sebelumnya tetap melanjutkan studi dengan sistem konvensional sesuai ketentuan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 1988. Terhadap mereka yang tidak dapat menyelesaikan

program sarjananya sampai batas waktu tersebut, akan dikenakan ketentuan program SKS S1 (Suhandang, 1988, p. 31).

Melalui sistem SKS ini, kurikulum IAIN Ar-Raniry disusun dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Total beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa berkisar 150-160 SKS, meliputi Mata Kuliah Dasar Institut (MKDI) sebanyak 32 sks (20%), Mata Kuliah Dasar Fakultas (MKDF) berkisar 28-32 sks (20%), dan Mata Kuliah Kejuruan/ Professional (MKKP) antara 90-96 sks (60%).
- b. Selain pengelompokan mata kuliah menurut tiga komponen tersebut, keseluruhan mata kuliah dibedakan pula dalam dua macam, yaitu:
 - 1) Mata kuliah biasa, yaitu semua mata kuliah yang berlaku secara umum tanpa syarat dan pengecualian, baik komponen institut, fakultas maupun jurusan.
 - 2) Mata kuliah bersyarat, yaitu mata kuliah yang harus diikuti, baik kuliah maupun ujiannya, sebelum mengikuti mata kuliah tertentu. Demikian pula sebaliknya, mata kuliah yang bersyarat tidak dapat diikuti sebelum mata kuliah prasyarat tersebut diselesaikan.

Dengan sistem SKS tersebut, terbuka peluang bagi mahasiswa akan kemungkinan penyajian program pendidikan lebih terarah, bervariasi dan fleksibel. Dengan demikian memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk lebih bebas dan mudah memilih rencana studi yang sesuai dengan keahlian dan atau bakat yang dimilikinya.

22. Transformasi Metode Pendidikan

Sebagai suatu ilmu, metode (*method of instruction*) merupakan bagian dari perangkat disiplin keilmuan yang menjadi induknya. Secara literal, metode berasal dari bahasa Latin, yang terdiri yang terdiri dari dua kosa kata yaitu *meta* yang berarti melalui dan *hodos* yang berarti jalan. Jadi metode bermakna sebagai jalan yang dilalui

(Arifin, 2000, p. 97). Runes menyatakan bahwa metode merupakan (a) suatu prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan. (b) sesuatu teknik yang dipakai dalam proses mencari ilmu pengetahuan dari suatu materi tertentu, dan (c) suatu ilmu yang merumuskan aturan-aturan dari suatu prosedur (Syam, 1986, p. 24). Sebagai satu disiplin ilmu pendidikan, maka metode merupakan pemberi cara bagi pelaksana operasional pendidikan.

Sedangkan dalam pengertian lain, metode merupakan sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan. Dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena menjadi sarana yang memberi makna akan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya.

Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan pendidikan. Metode pendidikan yang tidak tepat akan menghalang kelancaran jalannya proses belajar mengajar sehingga tidak akan tercapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, metode yang diterapkan oleh seorang guru dapat berdaya guna dan berhasil jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Perlu dicatat bahwa kemajuan metodologi yang pernah dicapai di zaman klasik itulah yang membuat periode tersebut dikenal sebagai periode kemajuan Muslim dalam bidang intelektual pada umumnya, dan bidang pemikiran Muslim pada khususnya (Mukti, 2016, p. 242). Dalam proses pendidikan Islam, metode dapat dikatakan tepat guna, bila mengandung nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam.

Metode dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik (Jamaluddin & Said, 1996, p. 52). Sedangkan Al-Syaibany (1979, p. 551) mengemukakan bahwa metode adalah rencana yang dibuat untuk diri sendiri sebelum memasuki kelas dan menerapkannya di kelas selama proses belajar mengajar berlangsung.

Mengacu kepada pengertian tersebut, maka pemilihan metode harus disesuaikan dengan materi, kondisi dan keadaan anak didik, karena itu metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak didik dan lingkungan. Namun demikian yang menjadi pertimbangan pokok adalah sumber pendidikan tidak bisa dilepaskan dari nilai pendidikan Islam, karena harus disusun atas dasar pertimbangan sumber pendidikan itu sendiri yaitu Al-Quran dan al-Hadis.

23. Transformasi Metode Pendidikan *Dayah*

Pertumbuhan *dayah* pada masa kesultanan Aceh Darussalam menawarkan tiga tingkatan pembelajaran, yakni *rangkang* untuk tingkat dasar, *balee* untuk tingkat menengah, *dayah* untuk tingkat perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi seorang santri yang belajar pada *dayah*, sudah mampu membaca Al-Quran. Kemampuan membaca Al-Quran, mereka dapatkan dari rumah atau dari *teungku* di *meunasah* (Idris & dkk, 2002, p. 69).

Amiruddin (2013b, p. 46) menuturkan bahwa metode pembelajaran di *dayah* saat itu didominasi metode oral dan metode hafalan. Metode oral merupakan nama lain dari metode *halaqah*. Metode *halaqah* biasanya guru dan murid duduk dalam sebuah majlis secara melingkar, guru menjelaskan sedangkan murid-muridnya menyimak sambil memperhatikan kitab. Guru menerangkan teks-teks (kitab) dan murid yang duduk di sekitar atau di depannya mendengar serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selain metode tersebut para guru juga menggunakan metode *copy teks* (*sorogan*). Metode *sorogan* adalah sistem belajar yang dilakukan siswa dengan membaca teks yang

diberikan guru dan kemudian dipelajari untuk dipresentasikan atau dijelaskan kembali (Amiruddin, 2013b, p. 47).

Metode-metode yang lazim dipergunakan *dayah* antara lain metode tarjamah, metode ceramah; metode hafalan, metode tanya jawab, dan metode diskusi (Amiruddin, 2013b, p. 60). Pada kelas-kelas tinggi, metode diskusi lebih dianjurkan dalam segala aktivitas proses pembelajaran untuk menumbuhkembangkan rasa percaya diri serta berani bertanya terhadap hal-hal yang sudah dan belum mereka ketahui secara mendalam.

Seiring dengan perkembangan *dayah*, maka transformasi pada metode pembelajaran dilakukan namun tidak meninggalkan tradisi yang lama. Pertama, transformasi metode pembelajaran *dayah* meliputi metode diskusi dan metode debat. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang Guru pada *Dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga* yang menyatakan bahwa metode pembelajaran *dayah* pada mulanya menggunakan metode *halaqah*. Proses ini dilakukan oleh *Teungku* dan santrinya dengan formasi duduk melingkar di lantai *balee*, kemudian *Teungku* menyampaikan materi (di-barisin) kemudian dilanjutkan dengan curah pendapat (di-syarah) serta diterjemahkan.

Dalam proses membaca, di-barisin dan di-syarah diikuti diskusi dan tanya jawab antara *Teungku* dengan santri. Pada saat itu *Teungku* memberikan permasalahan selanjutnya santri diminta memberikan argumentasi. Proses pembelajaran berjalan dengan tertib, penuh semangat dan memperoleh simpulan yang baik dari masalah yang didiskusikan. Kemudian metode pembelajaran terus berkembang dan diinovasikan untuk meningkatkan kualitas lulusan *dayah* agar lebih profesional. Contoh metode pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah metode debat, *problem solving*, dan melakukan *muzakarah wal muhadharah*.

Program ini biasanya disusun untuk dilaksanakan pada malam Jumat yang diikuti oleh seluruh santri yang ada. Khusus pada program *muzakarah* dibentuk kelompok diskusi dengan lembaga

khusus yang disebut *Lajnah Bahsul Masail* yang dikelola oleh guru senior. Lembaga tersebut juga berfungsi sebagai tempat kajian untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat. *Dayah Darussa'adah* Idi Cut Aceh Timur telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat Aceh. *Dayah* ini juga telah banyak menghasilkan alumni yang turut andil terhadap upaya pengembangan pendidikan Islam di Aceh.

Pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh *Dayah Darussa'adah* Idi Cut Aceh Timur banyak dipengaruhi oleh sistem dan metode pendidikan *dayah* yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Kontribusi *dayah* tersebut terhadap pengembangan pendidikan Islam didukung oleh pembelajaran yang dilakukan dengan baik.

Pembelajaran yang dilakukan pada dasarnya menggunakan metode tradisional yaitu metode *halaqah*. Proses pembelajara kitab kuning diawali dengan membaca teks kitab, dilanjutkan dengan penjelasan dan diakhiri dengan Tanya jawab. Pada pengembangan berikutnya, metode *halaqah* dikombinasikan dengan metode *drill* (penugasan) dan metode *kooperatif* (kelompok).

Pada pembahasan tertentu, *Teungku* memberikan tugas kepada para santrinya dengan jeda waktu tertentu, setelah batas waktu yang ditetapkan tersebut tiba, maka secara bergiliran santri diminta untuk menyampaikan tugas yang telah diselesaikan kepada *teungku*.

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode *kooperatif*, biasanya *Teungku* mengelompokkan santri dengan materi bahasan tertentu yang kemudian secara bersama-sama santri diminta untuk mempertanggungjawabkan tugas mereka, demikian penuturan *Teungku Zamzami*.

Transformasi metode pembelajaran pada *dayah* modern, dilakukan dengan sistem klasikal atau tingkatan-tingkatan pendidikan. Sementara metode pembelajaran pada *dayah* terpadu dilakukan dengan mengkombinasikan metode pembelajaran *dayah* tradisional dan *dayah* modern.

24. Transformasi Metode Pendidikan Madrasah

Metode pembelajaran (*method of instruction*) yang diterapkan pada suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh sistem dan kurikulum yang digunakan pada lembaga pendidikan tersebut, oleh karena itu metode pembelajaran yang diterapkan pada madrasah di Aceh adalah metode yang selama ini diterapkan pada lembaga pendidikan Islam seperti metode ceramah, diskusi kelompok, Tanya jawab, pemberian tugas dan latihan.

Dengan memperkenalkan sistem klasikal, maka madrasah-madrasah Nizhamiyah sebagai sebuah Perguruan Tinggi Islam, telah menggunakan beberapa metode baru dalam menyampaikan kuliah-kuliah kepada para pelajarnya, seperti metode ceramah, diskusi dan seminar (Mukti, 2007b, p. 243). Penerapan metode-metode tersebut masih bersifat sederhana belum diinovasikan dengan perkembangan sesuai dengan materi pembelajaran.

Perkembangan sistem pendidikan dan kurikulum madrasah diharuskan melakukan transformasi khususnya pada metode pendidikan. Maka sekalipun metodenya sama apabila diinovasikan maka menghasilkan output yang dinamis dan variatif. *Pertama*, metode diskusi, dapat diterapkan guru dalam rangka mendorong siswa berpikir kritis dan mengekspresikan pendapat secara bebas dalam memecahkan masalah. Metode diskusi mampu mengembangkan pikiran peserta didik untuk memiliki sikap toleransi kepada sesama siswa meskipun mereka berbeda pendapat tentang topik yang didiskusikan.

Kedua, metode demonstrasi, biasanya digunakan guru pada materi pembelajaran keterampilan, seperti praktek shalat berjamaah, pelaksanaan fardhu kifayah, membaca Al-Quran, tayamum, pelaksanaan ibadah haji dan umroh. *Ketiga*, metode Resitasi, yaitu teknik pembelajaran dengan pemberian tugas untuk menyelesaikan sejumlah soal dengan tujuan untuk melahirkan kecakapan dan keterampilan tertentu bagi siswa.

Keempat, metode karya wisata, diterapkan pada pembelajaran ekstrakurikuler dan pada pembelajaran sejarah untuk mengunjungi tempat wisata tertentu yang bernilai sejarah. *Kelima*, metode latihan, digunakan pada pembelajaran seni, upacara dan kepramukaan. *Keenam*, metode kerja kelompok, penerapan metode ini pada pembelajaran dalam bentuk tugas yang diberikan guru untuk melatih siswa kerja dalam satu tim yang baik. Di samping itu dalam proses kegiatan belajar mengajar pada madrasah di Aceh pada umumnya setiap pembelajaran selalu menggunakan metode ceramah, sekalipun metode ini tergolong klasik tetapi masih cukup efektif dalam pembelajaran pada madrasah karena sifatnya komunikatif, demikian disampaikan oleh Muhammad Nasir Budiman dalam sesi diskusi bersama penulis.

25. Transformasi Metode Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam

Metode pendidikan yang diterapkan pada Perguruan Tinggi Agama Islam bersifat fleksibel, di antaranya adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi yang dilakukan dengan sistem klasikal untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode-metode tersebut telah mulai berkembang sejalan dengan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam, dan faktor inilah yang mendorong para pemimpin dan pendidik Muslim di zaman klasik berusaha terus menerus dengan penuh gairah memperbaiki dan menyempurnakan metode pendidikan Islam pada umumnya dan pendidikan tinggi pada khususnya, sebagaimana yang terlihat pada masa Pemerintahan Dinasti Saljuq.

Dalam kaitan ini, metode pembelajaran pada Pendidikan Tinggi Agama Islam bukanlah suatu hal yang statis, tetapi juga selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan masyarakat, sebagaimana yang tercermin dalam metode pengajaran pada Madrasah Nizhamiyah (Mukti, 2007b, p. 244).

Sudah menjadi keharusan bahwa sistem pendidikan pada IAIN Ar-Raniry mesti melakukan transformasi pada metode pembelajaran. Diharapkan metode-metode yang diterapkan dapat efektif dan dapat dikombinasikan juga dengan berbagai metode pembelajaran lain yang sesuai dengan materi perkuliahan.

Warul Walidin mengatakan bahwa transformasi metode pembelajaran pada IAIN Ar-Raniry meliputi metode ceramah yang merupakan metode yang paling klasik dalam perkuliahan. Metode ceramah dilaksanakan dalam bentuk penuturan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa. Sehingga komunikasi yang terbangun merupakan komunikasi satu arah (*one way traffic*). Media yang digunakan berupa papan tulis, gambar dan *overhead projector* (OHP). Metode ceramah digunakan untuk menyajikan materi berupa fakta dan opini yang bersifat uraian.

Metode tanya jawab, metode perkuliahan dengan menggunakan komunikasi dua arah (*two way traffic*). Dosen bertanya kepada mahasiswa atau sebaliknya, sehingga terjadi dialog antara kedua belak pihak. Metode tanya jawab digunakan untuk membangkitkan motivasi belajar mahasiswa, seyogyanya jumlah mahasiswa dalam kelas tidak terlalu besar, dan juga dapat diselingi dengan metode lain. Metode tanya jawab ini dapat merangsang ingatan, juga dapat mendorong berpikir kritis dengan berbagai argumentasi yang rasional dan dikuatkan dengan referensi (sumber-sumber bacaan).

Berikutnya adalah metode diskusi, metode ini digunakan dengan jalan saling memberi dan menerima informasi, pendapat dan pengalaman mahasiswa. Dalam berdiskusi maka sikap saling menghargai pendapat orang lain dapat ditumbuhkan. Metode diskusi dapat diterapkan pada materi perkuliahan yang bersifat problematik dan merangsang berpikir untuk memecahkan masalah.

Selanjutnya, metode pemberian tugas. Perkuliahan dengan memberikan tugas penyusunan makalah, baik bersifat individu maupun kelompok. Metode ini melatih kemampuan berpikir, keterampilan, dan sikap ilmiah mahasiswa. Metode seminar kelas. Perkuliahan dengan metode seminar kelas dilaksanakan dengan

memberikan topik-topik tertentu kepada mahasiswa untuk menyusun makalah, kemudian diseminarkan dalam unit perkuliahan.

26. Transformasi Sarana dan Prasarana

Perkembangan lembaga pendidikan Islam yang signifikan tentu mengakibatkan transformasi pada sarana dan prasarana yang berkualitas, representatif, memadai dan lengkap agar memberikan eksistensi pada lembaga. Sehingga nantinya lembaga tersebut berhasil dengan sukses melahirkan generasi yang memiliki keilmuan Islam dan professional dalam bidangnya masing-masing.

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya proses, baik itu usaha maupun bangunan, proyek dan sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang digunakan sebagai perangkat, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk memotivasi belajar siswa dan dapat memperjelas, mempermudah dan memperlancar pemberian pembelajaran.

Faktor lain yang sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan pengajaran adalah sarana dan fasilitas pendidikan (Mukti, 2007b, p. 255). Oleh sebab itu berhasil tidaknya tujuan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan kepada sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Dalam proses pembelajaran, kelengkapan sarana dan kualitas fasilitas penunjang pendidikan sangat penting. Kelengkapan fasilitas ini akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan sebuah lembaga pendidikan.

Proses pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai terlaksananya pembelajaran yang baik dan terpenuhinya secara maksimal tujuan pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaksanaan proses pendidikan Islam harus didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam yang lengkap.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang merupakan perangkat memperlancar, mempermudah dan memaksimalkan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap lembaga pendidikan, sehingga diharapkan mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Jika sistem dan kurikulum pendidikan merupakan ruh, jantung dan paru-parunya, maka sarana dan prasarana pendidikan raga dan anggota tubuhnya, tetapi bukan segalanya.

Eksistensi sarana dan prasana secara maksimal akan dapat memperlancar kegiatan pendidikan dan pengajaran secara professional dan berkualitas. Maka dalam sebuah lembaga pendidikan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai akan memberi makna dan arti pentingnya bagi pelaksanaan pembelajaran yang sesungguhnya. Proses belajar mengajar pada Madrasah Nizhamiyah boleh dikatakan berjalan dengan baik dan lancar daripada tempat-tempat belajar yang lainnya. Umpamanya di Masjid-Masjid, di rumah-rumah para Ulama, di kedai-kedai kitab dan lain-lainnya.

Gedung madrasah memiliki ruangan-ruangan belajar tersendiri yang disebut *iwana*, yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang mencukupi seperti podium tempat guru besar memberi kuliah, kursi staf pengajar menerima kuliah-kuliah dari dosennya (Mukti, 2007b, p. 256). Proses tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam di Aceh didukung dengan sarana dan prasara yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sekalipun pada awal-awal perkembangan lembaga pendidikan tersebut, sarana dan prasarana relatif kurang memadai.

27. Sarana dan Prasarana Dayah

Aceh merupakan daerah yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah” dan pernah mencapai puncak kemajuan peradaban. Hal ini merupakan apresiasi masyarakat muslim nusantara. Karena aceh, dengan semangat jihad mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. Kultur dan kehidupan masyarakat Aceh dalam berbagai

tatanan sosial sangat identik dengan ajaran Islam. Aspek adat-istiadat, sosial, hukum selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.

Aceh mengalami puncak kejayaan, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637 M). Selama itu 30 tahun pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan dibidang pendidikan. Pendidikan di Aceh mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis dan perubahan tersebut terus berlanjut untuk memenuhi harapan dan kemajuan masyarakat Aceh.

Bentuk dan sistem pendidikan yang dulunya berkembang di Aceh adalah sistem *dayah* yang telah banyak memberi kontribusi terhadap kemajuan pendidikan Aceh pada masa kejayaan kerajaan Islam. Hal ini ditegaskan oleh Idris & dkk (2002, p. 2) bahwa sistem pendidikan tradisional yang ada (pola pendidikan *dayah*) tetap dipertahankan dan mampu beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru.

Kemajuan pendidikan di Aceh dibarengi dengan pertumbuhan *dayah-dayah* mulai dari tingkat dasar, *meunasah*, sekolah menengah, rangkang, serta perguruan tinggi, *Ma'had 'Aly* dan *Dayah Teungku Chiek* (Dhuhri, 2014, p. 27). Jejak lembaga pendidikan *dayah* di Aceh dapat dilihat pada berbagai situs peninggalan sejarah. Situs-situs *dayah* terdiri dari berbagai macam bentuk sesuai dengan sarana lembaga pendidikan *dayah* yang pernah dibangun pada saat itu. Ada tempat-tempat yang sampai sekarang masih dipelihara dengan baik, seperti *dayah Teungku Awee Geutah* Peusangan Aceh Utara, *dayah Teungku Syik Tanoh Abee* di Seulimum Aceh Besar, *dayah Teungku Di Anjong* Planggahan Banda Aceh dan tempat-tempat lainnya di seluruh Aceh (Idris & dkk, 2002, p. 74).

Pendidikan *dayah* di Aceh pada masa tersebut belum memiliki sarana dan prasana yang lengkap, hal ini tergambar dari corak pendidikan pada *dayah* di *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam. Berdasarkan tanda-tanda yang masih ada di *gampong* tersebut, di sana banyak terdapat *dayah* tidak hanya satu *dayah*. tetapi beberapa *dayah* yang tersebar mulai dai *Gampong* Keubok di

ujung sebelah barat *Gampong Siem* (sekarang) sampai ke perbatasan *Gampong Krueng Kalee* dengan daerah persawahan di sebelah timur. Dari informasi dari sejumlah sumber, seluruh *Gampong Krueng kale* merupakan *gampong* santri yang datang dari berbagai daerah di Aceh (Idris & dkk, 2002, p. 75).

Dayah yang dibangun pada masa-masa awal kerajaan Aceh, telah melahirkan Ulama-Ulama besar seperti *Syamsuddin Ad-Sumatrani*, *Hamzah Fansuri*, *Nuruddin Ar-Raniry*, dan beberapa Ulama lainnya. Demikian pula dengan lembaga pendidikan Jami'ah Baiturrahman yang bercorak dengan sistem *dayah*, memiliki berbagai fakultas (Idris & dkk, 2002, p. 76).

28. Transformasi Sarana dan Prasarana Madrasah

Semangat pembaruan pendidikan di Aceh, dimobilisasi oleh putra-putri Aceh yang belajar di berbagai kota bahkan negara seperti Minang Kabau, Pulau Pinang dan Timur Tengah. Mereka menerima pengaruh modernisasi dalam berbagai bidang pendidikan Islam. Para Ulama berkeinginan mendirikan lembaga pendidikan Islam yang telah porak-poranda akibat peperangan Aceh dengan Belanda sebelum abad 20. Maka untuk pertama kalinya didirikanlah madrasah di Banda Aceh (dulu Kutaraja) pada awal tahun 1916.

Pembangunan madrasah ini menambah variasi lembaga pendidikan di Aceh, selain sekolah rakyat (SR) dan *dayah*, pendidikan madrasah berbentuk klasikal (Ismail, 2002, p. 157). Pembangunan madrasah tidak mengutamakan kelengkapan sarana dan prasarana, namun hal terpenting adalah bagaimana madrasah berperan dalam mewujudkan Aceh yang baru, dan masyarakat Aceh telah mendermabaktikan harta bendanya kepada agama, nusa dan bangsa sesuai dengan kondisi zamannya (Ibrahimy, 2002, p. 98).

Tahun 1916, secara resmi madrasah Al-Khairiyah didirikan dengan beberapa syarat. Syarat-syarat untuk mendirikan madrasah yang ditentukan oleh Gubernur. Izin pertama diberikan kepada Tuanku Raja Keumala yang tinggal di Kampung Keudah Kutaraja

sebagai tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda. Kedua, mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid dan ilmu fiqh. Ketiga, diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar murid-murid sebagaimana dimaksud Staatblad tahun 1905 No. 50 dengan ketentuan syarat-syarat Bijblad No. 6363. Keempat, murid-murid yang datang dari luar Kutaraja haruslah membawa keterangan dari pemerintah setempat. Kelima, setiap tanggal 2 Januari, 2 April, 2 Juli dan 2 Oktober setiap tahun harus memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja, melalui komisi yang diangkat untuk itu. Keenam, untuk mengawasi madrasah tersebut dibentuk sebuah komisi yang terdiri dari *Teungku* Syekh Ibrahim Beurawe sebagai ketua, Hoofd Jaksa dan kepala penghulu pada Landraad Kutaraja sebagai anggota. Ketujuh, apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan dilanggar maka Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup (Ismail, 2002, p. 157).

Dengan mengambil tempat di halaman belakang Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, ditunjuklah *Teungku* Muhammad Saman Tiro, seorang Ulama lulusan Makkah yang memiliki pikiran maju untuk memimpin madrasah yang pertama tersebut. Pada saat itu sarana dan prasarana belajar hanya menggunakan bangku, papan tulis dan peralatan lain (Ismail, 2002, p. 158).

Berikutnya, Pada tahun 1927, di Lhoksemawe didirikan sebuah kelompok yang bernama *Jamiah Al-Islam Wal Irsyad Al Arabia* (suatu perkumpulan yang bergerak dibidang pendidikan) dipimpin oleh seorang Arab yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Salim Ash Kalaly, mendirikan madrasah *Al-Irsyad* sebagai cabang *Al-Irsyad* Surabaya Jawa Timur. Sebagai pimpinan ditunjuklah *Teungku* Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi. Pada tahun yang sama, didirikan pula madrasah di Idi, Kabupaten Aceh Timur yang diberi nama madrasah *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* yang dipimpin oleh Said Husien, kemudian menjadi madrasah *Nahdatul Islam* yang lebih populer disebut dengan MADNI (Ismail, 2002, p. 159).

Awal Pendirian dan perkembangan madrasah-madrasah di Aceh secara khusus tidak menyiapkan sarana dan prasana sebagai persyaratan pendirian madrasah atau menyediakan fasilitas pembelajaran. Namun hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap masyarakat terhadap pendidikan. Hal ini langsung mendapat dukungan dari pemerintah daerah/wilayah maupun dari berbagai lapisan masyarakat.

Madrasah-madrasah tersebut memiliki peran yang sangat penting terhadap pembinaan pendidikan masyarakat dalam mengisi ketertinggalan pendidikan akibat dari penjajahan, di antara alumni madrasah generasi awal adalah Amelz (pernah menjadi anggota parlemen DPR-RI), Teungku Usman Yahya Tiba yang melanjutkan pendidikan ke Mesir, Teungku H. Zaini Bakri (Pernah menjadi Bupati Aceh Besar) (Ismail, 2002, p. 159).

29. Sarana dan Prsarana Perguruan Tinggi Agama Islam

Pada awal pendirian IAIN Ar-Raniry di tahun 1963, hanya memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin serta satu unit sekolah persiapan IAIN di Darussalam. Lama belajar pada tiap-tiap Fakultas adalah lima tahun (10 semester). Tahun pertama, disebut Propandeuise, tahun kedua Kandidat, tahun ketiga Bakaloriat, tahun keempat dan kelima disebut Doktoral yang dibagi kepada Doktoral I dan Doktoral II.

Fakultas Syariah mempunyai tiga jurusan, yaitu Jurusan Tafsir/Hadis, Jurusan Fiqh (Ilmu Hukum Islam) dan Jurusan Qadha' (peradilan). Fakultas Tarbiyah memiliki Jurusan Ilmu Pendidikan, seperti Jurusan Bahasa Arab dan Jurusan Bahasa Inggris. Fakultas Ushuluddin memiliki empat Jurusan yaitu, Jurusan Dakwah (penyiaran), Jurusan Tasawuf, Jurusan Filsafat, dan Jurusan Perbandingan Agama (Hasjmy, 1969, p. 233).

Pada masa-masa awal pembangunan, keadaan sarana dan prasana pada IAIN A-Raniry belum memadai, baik dalam bentuk gedung, perkontaran dan pendukung-pendukung pembelajaran lainnya, juga dalam bentuk sarana non fisik seperti jumlah Fakultas,

Jurusan dan wadah-wadah pengembangan ilmiah lainnya bagi sivitas akademika IAIN Ar-Raniry. Jadi sarana dan prasarana yang tersedia hanya sebatas dapat terlaksana rutinitas akademik.

30. Transformasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam di Aceh Tahun 1966-1998

Kemajuan pendidikan Islam dilengkapi dengan kesempurnaan semua elemen yang ada dalam sistem pendidikan, termasuk di dalamnya unsur sarana dan prasana. Upaya peningkatan kualitas lulusan pada lembaga pendidikan Islam di Aceh sesudah tahun 1966 didukung dengan adanya transformasi sarana dan prasana pendidikan yang sesuai dengan tingkatan dan jenis lembaga pendidikan, ruang lingkup pembelajaran dan tingkat kebutuhan lembaga itu sendiri dalam melaksanakan proses pembelajaran.

31. Transformasi Sarana dan Prasarana *dayah*

Proses transformasi sarana parasana *dayah* di Aceh setelah tahun 1966 mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, hal ini terlihat pada perkembangan bangunan fisik *dayah*, perkembangan jumlah asrama santri, perluasan Masjid dan *balee-balee* pengajian dan fasilitas lainnya, dilihat dari struktur dan seni bangunan, juga jumlah yang cukup memadai, didukung dengan perluasan areal lahan.

Perkembangan tersebut dapat dilihat pada *dayah-dayah*, seperti *dayah Ibrahimiyah* Seulimum Aceh Besar, *dayah Darul Munawarh Krueng Kalee* Pidie, *dayah Baitussabri* Simpang Ulim Aceh Timur, *dayah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* Meulaboh, *dayah Darussa'adah* Kuta Fajar Aceh Selatan, kesemuanya merupakan *dayah-dayah* tradisional yang sangat berkembang (Idris & dkk, 2002, p. 88).

Dayah-dayah tersebut setiap tahunnya memenuhi kebutuhan sarana para santri. Sekalipun transformasi sarana dan prasana tidak begitu signifikan setiap tahunnya, namun tetap kontinu dalam penambahan sarana dan prasarana. Transformasi sarana prasarana tersebut mendukung pendidikan santri.

Dayah sebagai lembaga pendidikan tradisional telah memiliki beberapa fasilitas modern seperti ruang belajar, papan tulis, mesin ketik, asrama yang dilengkapi dengan tempat tidur, surat tanda tamat belajar (ijazah) dan berbagai sarana prasarana lainnya, sehingga *dayah-dayah* di Aceh tetap eksis dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengikuti perkembangan pengetahuan *modern*. Betapapun sederhana sebuah *dayah*, tentu memiliki areal (kampus) minimal terdiri dari Masjid, asrama, kelas, peralatan, kitab-kitab dan tanah wakaf, baik berupa sawah, kebun dan harta-harta lainnya (Mukti, 2016, p. 9).

32. Transformasi Sarana dan Prasarana Madrasah

Transformasi sarana dan prasana madrasah dimulai dengan rancang bangun gedung-gedung besar permanen dan sangat menarik dengan ketersediaan ruangan yang memadai untuk proses belajar mengajar, tersedianya ruang kepala madrasah, ruang guru, laboratorium, mushalla untuk melatih anak-anak shalat dan berbagai keterampilan agama, lapangan olah raga, kelengkapan mobiler madrasah dan berbagai pendukung fasilitas lainnya merupakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran yang berkualitas pada madrasah di Aceh. Agar madrasah dapat melaksanakan fungsi-fungsinya maka harus dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, bahan-bahan pelajaran, buku pustaka, alat peraga, dan lain-lainnya (Saleh, 2006, p. 41).

Kelengkapan sarana dan prasarana pada madrasah di Aceh, dapat dilihat pada beberapa madrasah seperti pada MAN Model Banda Aceh, MTsN Idi, MAN Langsa, MAN Kota Lhoksemawe. Madrasah-madrasah tersebut memiliki bentuk bangunan yang berkualitas dan tata ruangan yang menarik, memberikan motivasi dan kenyamanan bagi guru dan siswa terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar agar kondusif.

33. Transformasi Sarana dan Prasarana perguruan Tinggi Agama Islam

Seiring dengan perkembangan Pendidikan Tinggi dalam menyahuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka IAIN Ar-Raniry melakukan transformasi sarana kelembagaan, sejak 19 Juli 1968. Pengembangan Fakultas Ushuluddin, melahirkan Fakultas Dakwah yang berdiri sendiri yang disebut dengan Fakultas Dakwah dan Publisistik. Pada fakultas ini mempunyai satu jurusan yaitu jurusan Publisistik Dakwah. Kemudian mereka yang berminat tetapi belum memenuhi syarat-syarat untuk diterima menjadi mahasiswa disalah satu Fakultas pada lingkungan IAIN Ar-Raniry, diarahkan untuk masuk Sekolah Persiapan IAIN yang diatur dalam PMA Nomor 4 tahun 1967.

Pada mulanya, IAIN Ar-Raniry hanya memiliki sebuah Sekolah Persiapan IAIN di Darussalam, kemudian bertambah satu unit Sekolah Persiapan IAIN di Bireuen (Aceh Utara), Takengon (Aceh Tengah), Montasik dan Sibreh (Aceh Besar). Tahun 1988, IAIN Ar-Raniry membuka program Pascasarjana yang merupakan fasilitas yang paling urgen untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh. Seiring dengan bertambahnya Jurusan-Jurusan pada setiap Fakultas, maka bertambah pula sarana dan prasarana yang signifikan baik gedung-gedung perkuliahan, perkantoran, mobiler, serta sarana-prasarana lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Kemudian dilengkapi dengan lembaga-lembaga peningkatan kualitas akademik seperti Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat (LP2M), Lembaga penjaminan Mutu (LPM), Perpustakaan, Laboratorium, dan lain-lainnya yang dilengkapi dengan alat-alat penunjang kegiatan sesuai dengan lembaga sehingga produk pendidikan yang dihasilkan berkualitas.

BAB V

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendidikan agama Islam (PAI) adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik agar meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pendidikan, dengan memerhatikan kebutuhan agama lain dalam kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat yang dihormati untuk mencapai cita-cita kebangsaan.

Pemahaman PAI di sekolah/universitas dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *Pertama*, Pendidikan Agama Islam sebagai suatu kegiatan berarti suatu usaha yang secara sadar ditujukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang untuk mengembangkan pemahaman hidup, sikap hidup dan kecakapan hidup, baik yang bersifat manual maupun spiritual dan sosial, yang berkaitan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam; *Kedua*, Pendidikan Agama Islam sebagai fenomena yaitu perjumpaan antara dua orang dan/atau terciptanya suasana yang menimbulkan pandangan hidup yang bernafaskan dengan ajaran dan nilai Islami, yang mewujudkan sikap dan nilai kehidupan (Muhaimin, 2010, p. 15).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan tugas PAI di sekolah-sekolah mulai dari SD hingga SMA. Tugas tersebut dapat dirumuskan sebagai pembentukan sikap dan perilaku peserta didik agar dapat mengamalkan pendidikan agama dalam kehidupannya secara utuh. Sejak Indonesia merdeka, terdapat tiga model pendidikan Islam, yaitu pesantren dan pesantren. Ketika UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, pemerintah Republik Indonesia mengakui dan mulai menyelenggarakan pelajaran agama.

Pendidikan agama sama sekali tidak diajarkan di sekolah-sekolah pada masa penjajahan Belanda, namun pendidikan agama baru dimulai setelah kedaulatan Republik Indonesia. Kaidah pertama konstitusi adalah pembentukan sikap hidup yang religius, dan salah satu pokok pikiran pembukaan konstitusi (UUD 1945, 1945) adalah bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar itu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, yaitu Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Butir Negara menjamin kebebasan setiap pemeluknya untuk memeluk agamanya sendiri dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk melaksanakan sikap hidup beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Kementerian Agama yang tugas utamanya mengurus hal-hal yang menyangkut kehidupan beragama seluruh rakyat Indonesia.

Secara yuridis, keberadaan pendidikan agama Islam pada masa pasca kemerdekaan dan orde lama baru bisa dimulai pada masa jabatan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Mr. Suwandi (2 Oktober 1946 – 27 Juni 1947), yang mendirikan Komisi Penyelidik Pendidikan di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara, hasil kerja komisi tersebut berkaitan dengan Pendidikan agama adalah:

- a. Pendidikan agama di semua sekolah pada jam sekolah;
- b. Pemerintah membayar para guru;
- c. Di sekolah negeri, pelajaran agama diberikan pada Kelas IV;
- d. Pendidikan agama dilaksanakan seminggu sekali pada waktu-waktu tertentu;
- e. Kementerian Agama mengangkat guru;
- f. Kualifikasi pendidikan umum juga diperlukan bagi guru agama;
- g. Pemerintah menyediakan buku-buku pelajaran agama;
- h. Menyelenggarakan pendidikan bagi guru agama;
- i. Mutu pesantren dan madrasah harus ditingkatkan; dan
- j. Pengajaran bahasa Arab tidak diperlukan.

Dasar pelaksanaan pendidikan agama yang direncanakan itu adalah surat keputusan bersama Mendiknas dan Mendikbud No.1285/K-7 (agama) dan Mendikbud No.1142/Bag-A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pasal 2 menyebutkan bahwa:

- (1) Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah agama dan pendidikan masyarakat.
- (2) Pendidikan dan Pengajaran Agama di sekolah-sekolah Agama dan Pendidikan Masyarakat masing-masing ditetapkan dalam Undang-undang lain.

Selanjutnya pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Apakah suatu jenis sekolah memberikan pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan muridnya.
- b. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
- c. Sifat pelajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya.
- d. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak didik.

Dengan demikian, menurut UU No. 4 Tahun 1950 keberadaan pendidikan agama Islam sangat lemah, hal ini dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*, dari segi kelembagaan, belum ada ketentuan hukum yang secara tegas menjamin eksistensi lembaga pendidikan Islam. *Kedua*, pendidikan agama Islam di sekolah masih merupakan bagian dari kurikulum yang sifatnya opsional, tidak wajib karena tidak mempengaruhi ketuntasan siswa. Seseorang bahkan dapat berbicara tentang keputusan pribadi (privasi), di mana siswa atau orang tuanya memutuskan apakah akan berpartisipasi dalam pendidikan agama atau tidak (Mahmud Yunus, 1990, p. 358). Namun, aturan tersebut diubah dengan mewajibkan siswa mengambil mata

kuliah agama, dan mata pelajaran agama Islam dimasukkan ke dalam sistem klasifikasi.

Meskipun pendidikan agama bukan merupakan mata pelajaran wajib di sekolah dalam peraturan tersebut, namun pendidikan agama di Aceh memiliki basis sosial yang kuat karena pentingnya pendidikan agama sebagai daerah yang bercirikan keagamaan. Sejak zaman Kesultanan Aceh, terdapat beberapa sistem pendidikan agama di Aceh meliputi *Meunasah*, *Dayah*, dan *Rangkang*. *Meunasah* atau *Mushalla*, terus melakukan pengajian kepada anak-anak di bawah koordinasi *Imuem Gampong* setempat dan di bawah pengawasan tokoh masyarakat. Beberapa masjid menggunakan sistem yang sama, mengajarkan prinsip-prinsip agama, sholat dan ibadah selain membaca Al-Quran (Saby, 2001, p. 87).

Meskipun Pemerintah kolonial melarang pengajaran pendidikan agama Islam baik di sekolah-sekolah umum maupun diajarkan secara mandiri, namun masyarakat yang sudah tertanam nilai religius dijiwanya tetap melaksanakan pendidikan agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan lain, seperti di rumah-rumah, *meunasah* dan mesjid, di luar jam sekolah (siang dan sore), hal ini sudah menjadi kewajiban ulama Aceh dalam mengawal pendidikan agama bagi rakyat Aceh pasca kemerdekaan.

2. Eksistensi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Eksistensi pendidikan agama Islam (PAI) yang semakin mantap menjadi dasar dan modal utama peningkatan mutu pendidikan. Gerbang kemajuan Islam mulai terbuka. Paradigma Islam Indonesia yang secara kultural berbeda dengan Islam Timur Tengah telah menarik banyak kalangan, terutama di masyarakat Barat. Pendidikan Islam di Indonesia lahir melalui masa reformasi, para pembaharu pendidikan Islam menginginkan pendidikan Islam direformasi dalam banyak hal untuk menjawab tantangan zaman (Daulay, 2009b, p. 2).

Transformasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah (PAI) dimulai dengan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 1 yaitu

keinginan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki Pembukaan UUD 1945. Karena menurut Orde Baru banyak masyarakat yang telah menyeleweng dari Pancasila. Kemudian pasal 4 menentukan isi pendidikan adalah untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. Juga mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan di samping membina dan mengembangkan fisik yang kuat.

Selanjutnya dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1973 di kenal dengan GBHN yang merumuskan Tujuan Pendidikan Nasional yaitu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah berlangsung seumur hidup. Dengan demikian istilah membentuk manusia seutuhnya, jasmani dan rohani, dengan komponen pengetahuan, kreatif, demokratis, bertanggung jawab, berbudi luhur dan berlandaskan semangat sejati.

Selain itu, pendidikan agama Islam (PAI) yang diselenggarakan di sekolah, sesuai dengan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 semakin banyak, keberadaan PAI di sekolah semakin meningkat, tidak membeda-bedakan lembaga pendidikan agama dari lembaga pendidikan lainnya. Kelembagaan, artinya lembaga pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan dan pembangunan nasional, dan undang-undang mengakui pentingnya pendidikan agama, termasuk PAI, sebagai mata pelajaran penting di sekolah. Dengan demikian status hukum formalnya tidak jelas, namun tetap tidak menggembirakan dari segi kualitas hasil yang dihasilkannya (Daulay, 2009a, p. 3).

Pentingnya PAI sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional dan pembangunan, diatur dalam Bab II pasal 4 tentang tujuan Pendidikan Nasional, menyebutkan "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kebangsaan".

Sedangkan berkaitan dengan kurikulum PAI di sekolah disebutkan dalam Bab IX pasal 29 (2) menyebutkan "Isi setiap kurikulum, setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan". Penjelasan pasal 29 ayat 2 tersebut, "Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan PAI di sekolah sangat kuat. Selain dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin dan mewajibkan keberadaan PAI di semua jalur dan jenjang pendidikan, negara juga gencar mempromosikan PAI di sekolah. Selain itu, lembaga pendidikan Islam juga diakui setara dengan lembaga pendidikan lainnya dan berperan penting dalam mencapai pembangunan nasional. Perlu penguatan berbagai komponen antara lain guru, kurikulum, sarana dan prasarana. Politik, administrasi dan lain-lain (Daulay, 2009a, p. 11).

Selain itu, pelajaran PAI di sekolah semakin penting diperkuat dengan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, dengan demikian status hukum formalnya tidak jelas, namun tetap tidak menggembirakan dari segi kualitas hasil yang dihasilkannya (Daulay, 2009b, p. 3). Pentingnya PAI sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional dan pembangunan, diatur dalam Bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional, menyebutkan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemanusiaan dan kebangsaan". Sedangkan

berkaitan dengan kurikulum PAI di sekolah disebutkan dalam Bab IX pasal 29 (2) menyebutkan "Isi setiap kurikulum, setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikan Pancasila, (b) Pendidikan Agama, dan (c) Pendidikan Kewarganegaraan". Penjelasan pasal 29 (2) tersebut, "Pendidikan Agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan PAI di sekolah sangat kuat. Selain dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menjamin dan mewajibkan keberadaan PAI di semua jalur dan jenjang pendidikan, pemerintah juga gencar mempromosikan PAI di sekolah. Pendidikan Islam di Indonesia harus dikuatkan baik dari segi lembaga maupun departemen untuk mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapinya, yaitu *pertama* dari segi struktur, pendidikan Islam di Indonesia diimputasikan Kementerian Agama agar semakin kuat sebagai departemen perlindungan pendidikan Islam. *Kedua*, budaya, agar umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat dapat ikut memperkuat pendidikan Islam (Daulay, 2009c, p. 11). Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam diakui setara dengan lembaga pendidikan lainnya dan berperan penting dalam mencapai pembangunan nasional. Ada kebutuhan untuk memperkuat berbagai komponen antara lain pelatih, kurikulum, sarana dan prasarana, kebijakan, administrasi dan lain-lain.

3. Transformasi Pendidikan Agama Islam pada sekolah di Aceh Tahun 1966-1998

Aceh yang merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia telah mengembangkan kerajaan-kerajaan Islam sepanjang sejarah hingga mencapai puncak kejayaannya. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah,

serta memperjuangkan penetapan Aceh sebagai “daerah istimewa”. Konsep keistimewaan Aceh yang diperkenalkan terdiri dari tiga bagian yaitu keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat. Untuk merepresentasikan otonomi dalam bidang keagamaan dan mengembangkan kehidupan beragama dalam masyarakat, maka pemerintah Aceh mendirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Propinsi Aceh, yang kemudian digunakan pemerintah untuk menyelenggarakan MUI secara nasional.

Pemerintah Aceh membentuk Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) untuk menggambarkan keistimewaan pada bidang adat. Selain itu, upaya untuk memahami bagaimana festival budaya diselenggarakan dan menghargai orang-orang yang berjasa dalam kegiatan adat Aceh. Pada tahun 1959, untuk menggambarkan keistimewaan bidang pendidikan, pemerintah Aceh mendirikan Kampus Kota Pelajar Darussalam (KOPELMA) dan mendirikan yayasan bernama “Yayasan Dana Sejahtera Aceh” (YDKA). Yayasan tersebut kemudian berganti nama menjadi Yayasan Pembina Darussalam (YPD), sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan peminatan pendidikan di Aceh. Yayasan tersebut menjadi badan pusat yang secara resmi melaksanakan pembangunan Darussalam sebagai kampus pendidikan sejak 2 September 1959. Tanggal tersebut kemudian menjadi Hari Pendidikan Daerah Aceh dan diperingati setiap tahun (Idris & dkk, 2002, p. 5).

Langkah selanjutnya adalah pengisian operasional bidang pendidikan di Aceh yang mensyaratkan sebuah lembaga di lingkungan pemerintahan Aceh untuk mendapat kewenangan mandiri merancang pendekatan pendidikan di Aceh yang Islami dan membuahkan hasil yang berkualitas, khususnya pendidikan Islam, dan menjadi mitra pemerintah daerah. Untuk itu, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 420/435/1990 tentang pembentukan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) yang menangani keistimewaan pendidikan Aceh. Lembaga ini diharapkan dapat menorehkan banyak keberhasilan untuk menuntaskan keistimewaan dunia pendidikan, sehingga semakin

mengembangkan integrasi pendidikan di Aceh. Salah satu program MPD yang dilaksanakan secara langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di Aceh yaitu:

- **Pendidikan Agama Islam di Sekolah**

Menanggapi kurangnya jam pengajaran di sekolah-sekolah di Aceh, MPD meluncurkan program untuk memperluas pengajaran di sekolah, terutama yang berkaitan dengan muatan keagamaan. Beberapa sekolah di Aceh ditutup hingga pukul 16.00 WIB. Karena siswa harus mempelajari materi agama sepulang sekolah. Kemudian Rekomendasi merevitalisasi lembaga informal yang khusus memajukan pendidikan anak, mulai dari peran keluarga dalam pendidikan agama anak, mengundang guru privat agama ke rumah bagi yang tidak mampu mendidik diri sendiri. Selain itu, banyak juga anak-anak yang mendapatkan pendidikan agama Islam, seperti Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Madrasah Diniyah (MD) dan Pesantren Kilat.

- **Muatan Lokal**

Kekayaan berbagai khazanah budaya, adat istiadat yang masih lestari, latar belakang sejarah yang menginspirasi, bahasa dan sastra daerah yang masih digunakan, berbagai kesenian yang masih berkembang dan kehidupan agama Islam yang sangat kuat berakar dari dalam kehidupan masyarakat. dari manusia. Semua kemungkinan tersebut didorong dan dikembangkan dengan membuat materi muatan lokal kurikulum dengan mempertimbangkan materi dalam aspeknya masing-masing, yaitu aspek lingkungan budaya, lingkungan sosial, lingkungan dan mata pencaharian.

Maka menurut penjelasan Badruzzaman (6 Juli 2016) di antara materi yang ditawarkan pada sekolah-sekolah Aceh dalam bidang kajian muatan lokal sebagai berikut: a), menulis dan membaca huruf Arab Melayu (huruf Al-Quran). b) bahasa dan sastra daerah. c). tata krama dan adat istiadat. d) keterampilan religius. e), lingkungan Islami. f) Seni Al-Qur'an.

Pada tahun yang sama, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 2 Tahun 1990 Tentang Wajib Baca Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar Propinsi Aceh. Kemudian diserahkan kepada MPD yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasionalnya. Dalam pelaksanaan program tersebut, seluruh sekolah dasar di Aceh diharapkan belajar mengaji di sekolah pada sore hari di luar jam pelajaran. Biasanya, siswa sekolah dasar di lingkungan perumahan dikoordinasikan oleh lingkungan setempat, dan orang tua siswa juga membawa guru ke rumahnya.

Secara sosiologis, konsep lain yang digunakan di Aceh dalam menanggapi UU No 2 Tahun 1989 adalah pendidikan Islam. Pendidikan yang landasan, fungsi dan tujuannya berbeda dengan filsafat Islam. Garis Besar Qanun menyebutkan bahwa sistem pendidikan Propinsi Aceh merupakan sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan secara Islami sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh.

Pendidikan Islam berarti pendidikan yang tidak hanya memuat muatan ajaran Islam, tetapi juga dilakukan sesuai dengan budaya Islam sedemikian rupa sehingga warna, karakter dan suasananya Islami. Ini tidak persis sama dengan pendidikan Islam karena belum tentu pendidikan Islam dilakukan dengan cara yang Islami. Di sisi lain, pendidikan Islam bukan hanya pendidikan yang berlandaskan Islam, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang termasuk dalam budaya Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berlandaskan Islam yang memiliki budaya Islam dan bernuansa Islam serta bertujuan agar sesuai dengan tujuan Islam.

Analisis terhadap uraian di atas menunjukkan bahwa perubahan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di wilayah Aceh berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu lahirnya Kota Pelajar Darussalam (KOPELMA), terbentuknya Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, instruksi Gubernur Aceh tentang wajib baca Al-Quran bagi siswa sekolah dasar, muatan lokal yang mencerminkan kearifan lokal, dan konsep pendidikan Islam.

4. Aktualisasi Transformasi Pendidikan Islam

Dinamika perubahan lembaga pendidikan Islam memberikan corak dan warna bagi kemajuan pendidikan Islam dan terlihat dalam konteks perkembangan kelembagaan, karakteristik kelembagaan, modernisasi kelembagaan, pertumbuhan kelembagaan, fungsi, peran, sistem dan kepemimpinan, tradisi dan spirit pembaharuan (Reformasi merupakan dasar pendirian lembaga pendidikan Islam). Lembaga pendidikan Islam di Aceh adalah sebagai berikut Dayah, madrasah, pendidikan tinggi Islam. Lembaga pendidikan Islam berkembang dengan berbagai cara, sehingga Aceh termasuk negara yang maju dalam pendidikan Islam.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menguatkan keberadaan pengajaran PAI di sekolah, tidak membedakan lembaga pendidikan agama dengan lembaga pendidikan lainnya, status hukum formalnya tidak dipersoalkan sebab pelajaran PAI merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam kaitannya dengan kurikulum PAI untuk sekolah, setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan harus memuat: (a) pendidikan pancasila, (b) pendidikan agama, dan (c) pendidikan kewarganegaraan.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam diakui setara dengan lembaga pendidikan lainnya dan berperan penting dalam mencapai pembangunan nasional. Ada kebutuhan untuk memperkuat berbagai komponen termasuk guru, kurikulum, fasilitas dan fasilitas, kebijakan, administrasi dan lain-lain.

Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah bertemu dengan konsep keistimewaan Aceh, yaitu keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat. Untuk menggambarkannya, pemerintah mendirikan Kampus Kota Pelajar Darussalam (KOPELMA) pada tahun 1959 dan mendirikan yayasan bernama "Yayasan Dana Sejahtera Aceh" (YDKA). kemudian berubah nama menjadi Yayasan Pembina Darussalam (YPD). Yayasan ini menjadi badan pusat yang secara resmi mengatur perkembangan Darussalam sebagai kampus pendidikan sejak 2 September 1959,

dan tanggal tersebut kemudian menjadi “Hari Pendidikan” Daerah Aceh yang diperingati setiap tahun.

Langkah selanjutnya adalah menuntaskan kegiatan sektor pendidikan di Aceh. Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 420/435/1990 tentang pembentukan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh. dalam pendidikan. MPD bertugas menyusun program peningkatan jam pelajaran di sekolah khususnya untuk materi keagamaan, kemudian peran lembaga non formal dalam memasyarakatkan pendidikan agama anak, seperti Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah dan Pesantren Kilat, kemudian penerapan kurikulum lokal yang mencerminkan ajaran Islam dan penerapan konsep pendidikan Islam di Aceh.

- **Transformasi *Dayah***

Lembaga pendidikan *dayah* mengalami kemajuan yang pesat. Ini dibuktikan dengan jumlah *dayah* di Aceh terus berkembang, demikian juga dengan jumlah Ulama yang mengajar. *Dayah* institusi sosial yang berjuang keras melakukan transformasi nilai-nilai transeden maupun imanen menjadi kompetensi masyarakat modern.

Dayah memiliki tiga fungsi pokok, adalah sebagai berikut (1) Transmisi ilmu pengetahuan Islam; (2) Pemeliharaan tradisi Islam; (3) Pembinaan calon-calon Ulama. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, *dayah* memiliki berbagai fungsi yakni sebagai tempat tinggal, sebagai tempat beribadah, sebagai tempat berzikir, sebagai tempat belajar agama Islam dan tempat penggemblengan kaum muslimin untuk melawan musuh Islam. Fungsi sebagai lembaga pendidikan dilihat pada kiprah menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan sehingga melahirkan Ulama yang mempunyai kapabilitas dalam bidang keagamaan. Institusi pendidikan sesungguhnya memiliki fungsi strategis untuk membentuk manusia yang bermoral dan bermartabat.

- **Transformasi Madrasah**

Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. Identitas pengaruh tokoh pembaharu Timur Tengah terhadap gerakan Islam Indonesia dimulai sejak pertengahan abad ke-19.

Upgrade yang ditawarkan adalah misalnya ide reformasi yang diajukan adalah pengembangan reformasi pendidikan Islam dalam bentuk madrasah modern, yang saat ini sedang dilaksanakan oleh para reformis di Timur Tengah. Itupun madrasah mengikuti sistem grading berupa sekolah modern, seperti Madrasah Ibtidaiyah untuk SD, Madrasah Tsanawiyah untuk SMP, dan juga ada kuliah mullimin (keguruan) yang disebut Islam Normal. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Aceh mengalami perubahan dalam tiga hal, yaitu (1) upaya pembenahan sistem pesantren; (2) adaptasi dengan sistem Barat; (3) integrasi sistem pendidikan pesantren tradisional (*dayah*) ke dalam sistem pendidikan modern. Sehubungan dengan konvergensi tersebut, Kemenag merekomendasikan pengembangan pesantren tradisional di madrasah-madrasah yang diselenggarakan secara klasikal dengan kurikulum tetap, yang selain mata pelajaran agama juga mencakup mata pelajaran umum. Pesantren merupakan model pendidikan yang diikuti oleh umat Islam reformis yang menerapkan prinsip-prinsip modernitas dalam sistem pembelajaran.

Sistem sekolah mempengaruhi transformasi madrasah Aceh berupa sistem halaqah menjadi sistem klasikal. Selain itu, gelar madrasah dapat memiliki nilai yang sama dengan ijazah umum yang sederajat, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah yang sederajat, siswa madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang sederajat. Kemudian perubahan kuantitas, ruang dan kontrol dengan manajemen modern.

- **Transformasi Perguruan Tinggi Agama Islam**

Perubahan pendidikan tinggi Islam berorientasi tegas dan integratif. Perubahan kelembagaan menjadi fokus pada kajian berbagai keterampilan untuk mengembangkan ahli-ahli ilmu agama Islam berdasarkan pilar aqidah, syariah dan akhlak. Pengembangan

Fakultas IAIN Ar-Raniry berfokus pada kajian bidang ilmunya masing-masing sebagai berikut awalnya, Fakultas Ushuluddin dikembangkan menjadi sekolah pengasuhan Humaniora dan landasan wahyu Islam. Fakultas Syariah dikembangkan menjadi sekolah pengasuhan fikih, lembaga sosial dan teknologi Islam. Fakultas Tarbiyah dikembangkan menjadi Sekolah Ilmu Sosial, Pendidikan dan MIPA. Pendidikan ilmu komunikasi dan akhlak dikembangkan dari Fakultas Dakwah. Fakultas Adab akan diperluas menjadi sekolah pengasuhan linguistik, antropologi, dan budaya Islam.

Klasifikasi dan orientasi Studi Islam di Fakultas didasarkan pada beberapa aspek. Pertama, dunia yang semakin mengglobal, persoalan budaya, bahasa, etnis merupakan fenomena multikultural yang harus dikembangkan Fakultas Adab agar ilmu Islam menjadi *Rahmatan Lil 'Alamin* dan *Khayran Ummah*. Kedua, sistem pendidikan yang sekuler dan materialistis, proses pendidikan tidak lain adalah menanamkan ilmu pengetahuan, sedangkan proses internalisasi nilai-nilai Islam (kepribadian) terabaikan, Fakultas Tarbiyah melakukan kajian keilmuan tentang muatan keislaman dalam sistem pendidikan. Ketiga, dinamika intelektual secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan pengetahuan. Keempat, landasan antologis, epistemologis, dan aksiologis terkait sejarah munculnya cabang-cabang ilmu sangat urgen untuk mengkaji model ilmu yang lahir di dunia modern ini. Kelima, dalam catatan sejarah dakwah Nabi Muhammad dakwah Islam awalnya dilakukan secara diam-diam, kemudian terang-terangan dan baru terasa hasilnya.

- **Transformasi Sistem Pendidikan**

Mentransformasikan sistem pendidikan Islam di Aceh menjadi sistem pendidikan dualistik agar sesuai dengan warisan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan sekuler, yaitu menerapkan kedua sistem pendidikan tersebut pada lembaga pendidikan Islam.

- Tujuan Pendidikan

Perubahan tujuan pendidikan tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi pendidikan Islam dan memperkuat basis sosial budaya keagamaan bagi penerapan syariat Islam di masyarakat. Lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam fokus pada *tafaqquh fi ad-din* tanpa mengabaikan standar dasar pengetahuan umum.

Perubahan sistem pendidikan Islam dilaksanakan setelah diperkenalkannya sistem madrasah. Karena sistem madrasah tidak hanya mampu mengatasi kelemahan lembaga pendidikan Islam, tetapi juga lebih lengkap, yang tercermin dari sistem pendidikan madrasah Nizhamiyah tetapi juga pelajarannya sudah resmi, berjalan menurut undang-undang dan peraturan, serupa yang kita kenal hari ini.

- Tujuan *Dayah*

Tujuan pendidikan *Dayah* adalah untuk menghasilkan murid-murid yang *tafaqquh fi ad-din* serta menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan kesejahteraan di akhirat, serta ikhlas membagi ilmunya kepada orang lain.

Dalam kaitan ini, *dayah* sebagai lembaga pendidikan Islam menekankan proses pendidikan sebagai kewajiban dan pengabdian kepada Allah SWT. Hal ini bertujuan untuk memperdalam dan mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari yang disebut *tafaqquh fi ad-din*, menekankan pentingnya kehidupan moral dalam masyarakat.

Tujuan tersebut juga dilandasi oleh pendidikan *dayah* di Aceh untuk mempertahankan *tafaqquh fi ad-din*, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kebahagiaan di akhirat namun tanpa meminggirkan kebahagiaan hidup di dunia sehingga para santri adalah pengetahuan umum yang

harus dikuasai (*Aqliyah*: ilmu sekuler) untuk memenuhi salah satu tujuan menciptakan kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. *Tafaqquh fi ad-din* menekankan pada fungsi dayah sebagai mediator ilmu agama Islam (transmisi ilmu Islam).

Madrasah pada dasarnya mengembangkan pembelajaran *tafaqquh fi ad-din* kemudian mengalami perkembangan yang signifikan di madrasah dan menjadi madrasah modern yang berkembang tidak hanya pembelajaran *tafaqquh fi ad-din* tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Gerakan modernisasi madrasah berlangsung dalam konteks yang berbeda dengan gerakan pembaruan Islam. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sangat dinamis. Interaksi madrasah dengan modernisasi dilakukan secara berkesinambungan untuk mendorong munculnya madrasah (madrasah modern). Mengubah madrasah bertujuan untuk mengajarkan ilmu agama dan mengembangkan akhlak serta keterampilan yang populer saat ini karena kecakapan hidup juga bertujuan *tafaqquh fi ad-din* menurut jenjang madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Rumusan tujuan pendidikan madrasah di Aceh yang dimaksud memiliki tiga fungsi utama, yaitu (1) transmisi dan transmisi keilmuan Islam (*transmission of Islamic learning*); (2) melestarikan tradisi Islam; dan (3) menciptakan kader Ulama (meningkatkan jumlah Ulama). Oleh karena itu, perubahan tujuan pendidikan madrasah di Aceh merupakan prasyarat dan keniscayaan bagi pengembangan pendidikan Islam di Aceh.

- Tujuan Madrasah

Perubahan tujuan pendidikan tinggi Islam tidak terlepas dari upaya umat Islam di Aceh untuk memajukan ajaran Islam. Setelah masa penjajahan yang sangat panjang, umat Islam Aceh mengalami kemunduran dan fragmentasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lembaga ini memiliki tujuan tidak

hanya berperan sebagai instruktur atau pembimbing dalam melakukan pelatihan, tetapi juga berperan sebagai instruktur dan evaluasi keberhasilan pelatihan.

Pada prinsipnya tujuan didirikannya Pendidikan Tinggi Islam di Aceh adalah untuk “mengembalikan Aceh pada kejayaannya dan menyamakan kedudukan dengan masyarakat Aceh dalam bidang pendidikan”, tokoh masyarakat Aceh menekankan cita-cita mengembangkan perguruan tinggi Islam. Pemimpin-pemimpin Aceh mempertegas cita-cita pembangunan Perguruan Tinggi Islam ke dalam cita-cita pembangunan “Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam” Sedangkan transformasi tujuan Pendidikan PTKI Aceh adalah (1) mendidik cendekiawan Islam berakhlak mulia yang berpengalaman dan kompeten serta mengetahui bahwa dirinya bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila; (2) mencetak sarjana muslim dan atau pejabat agama Islam yang ahli untuk kepentingan Kementerian Agama maupun untuk instansi lain yang memerlukan keahlian di bidang agama serta untu memenuhi keperluan umum. Transformasi tujuan tersebut dibaringi dengan kemampuan membaca ayat-ayat *qawliyah* (Al-Quran) secara tekstual dan kontekstual.

- **Transformasi Pendidik**

Keberadaan pendidik sangat penting dalam pendidikan karena mereka memiliki kewenangan untuk bertindak dan secara efektif melakukan semua kegiatan pembelajaran dalam mendewasakan peserta didik untuk menunaikan tugasnya sebagai makhluk Allah SWT dan khalifah di muka bumi. Melakukan tugas dengan benar membutuhkan pendidikan yang lebih profesional, seperti keinginan untuk menjaga kualitas kerja (*quality of work*), terpeliharanya harga diri dalam bekerja dan keinginan untuk melayani masyarakat melalui kerja profesional.

Guru sekolah *dayah* di Aceh disebut Teungku. Secara struktural, seorang guru yang mengajar agama *dayah* di Aceh diklasifikasikan sebagai *Teungku Meunasah*, *Teungku Rangkang*, *Teungku Balee*, *Teungku Chik* adalah guru besar. *Teungku Chik* tidak mengajar semua kelas, hanya pada kelas-kelas tinggi untuk *Teungku Balee*.

Transformasi pendidik *dayah* adalah perolehan kompetensi tertentu. Kompetensi minimal yang harus dikuasai adalah penguasaan ilmu yang akan diajarkan dan penguasaan metode dan cara penyampaianya. Pendidik *dayah* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dan berkomitmen terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Serta persyaratan lain untuk kesehatan fisik dan mental, bakat sebagai guru, minat pada profesi guru dan kemampuan mengarahkan kelas yang diajar.

Transformasi pendidik pada Madrasah di Aceh, diawali dengan ketersediaan lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik guru-guru untuk menjadi pendidik pada madrasah seperti (1) Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang memiliki beberapa jurusan dengan pendidikan jenjang sarjana untuk mendidik calon-calon guru pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah untuk bidang studi keagamaan; dan (2) IKIP Universitas Syiah Kuala untuk mendidik guru bidang studi umum, termasuk dalam berbagai pendidikan secara khusus dan terprogram yang sesuai dengan jenjang lembaga di mana guru tersebut ditugaskan.

Pada tahun 1970-an pendidik-pendidik pada madrasah elah memiliki status pendidik yang jelas seperti pendidik PNS, pendidik honor dan pendidik bakti. Kemudian jumlah pendidik pada saat itu relatif sudah memadai dengan perkembangan siswa pada madrasah. Tahun 1988 (usia ke-25 tahun) IAIN Ar-Raniry memiliki rasio perbandingan yang memadai antara dosen dan mahasiswa. Dosen telah memiliki kompetensi akademik yang standar, baik jenjang pendidikan, kepangkatan edukatif, pengalaman dan keprofesionalannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Proses transformasi tenaga edukatif dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari sistem rekrutmen, tentang kualifikasi dan kualitas akademik, peningkatan jumlah, pembinaan melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan jenjang pendidikan ke jenjang Master (S2) dan Doktor (S3), kepangkatan akademik, dan pembinaan professional lainnya yang mendukung peningkatan kompetensi tenaga edukatif.

- **Transformasi Peserta Didik**

Struktur kondisi fisiologis serta psikis, peserta didik memiliki dimensi-dimensi yang sama dengan manusia lainnya. Artinya, itu berarti kebutuhan biologis dan psikologis, serta guru. Peserta didik akan hadir aktif dengan bentuk jasmaniahnya dan dimensi ruhaniah dengan segala potensi yang diferensial. Peserta didik sebagai manusia yang memiliki kemampuan sekaligus kemerdekaan mengembangkan dirinya untuk menjadi insan kamil.

Pendidikan *dayah* di Aceh merupakan lanjutan dari pendidikan di rumah-rumah dan *meunasah* yang dilaksanakan oleh *Teungku-Teungku*. Dalam konstek ini, santri *dayah* adalah seluruh anak-anak yang melanjutkan pendidikan agama setelah mendapatkan di rumah dan *meunasah*. Santri *dayah* tidak tercatat secara baik dan statusnyapun tidak begitu terikat, sekalipun telah berhasil mendidik Ulama-ulama besar pada masanya. Kemudian sejalan dengan perkembangan yang ada, *dayah* di Aceh melakukan penataan administrasi yang modern sehingga santri-santri terdata dengan baik. Kemudian dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas penunjang, di samping keterampilan agama yang dimiliki.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat berminat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah, karena madrasah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan yang sekaligus menanamkan ilmu agama dan umum. Jumlah siswa di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah terus bertambah. Karena madrasah telah tergabung dalam sistem pendidikan nasional. Dengan adanya SKB Tiga Kementerian, dan

ditopang dengan perkembangan jumlah siswa madrasah yang sangat signifikan, karena status madrasah dan sekolah umum dianggap sama, bahkan siswa madrasah bisa tetap bersekolah di sekolah umum atau pindah ke sekolah umum. Perubahan ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan madrasah di Aceh.

Pada masa berdirinya PTAI, sulit untuk mencari mahasiswa yang memenuhi syarat karena mahasiswa yang diterima di PTAI adalah lulusan SMA dan beberapa PTA, yakni PGA yang dirancang khusus untuk calon guru, lulusannya tidak mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi Islam. Maka dengan dibukanya 12 sekolah persiapan IAIN di berbagai pelosok Aceh, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar ke IAIN berangsur-angsur meningkat setiap tahunnya. Jumlah calon mahasiswa meningkat pada awal tahun 1980-an setelah IAIN mampu menerima calon mahasiswa lulusan SMA Negeri dan Pesantren di Aceh.

- **Transformasi Kurikulum**

Perubahan kurikulum *dayah* di Aceh bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Kitab Klasik dan Kitab Modern, disusun berdasarkan jenjang kelas dan program pembelajaran yang ditetapkan, serta merespon berbagai topik yang berkembang pesat. Kurikulumnya tidak hanya berorientasi pada ilmu Fiqh (Fiqh oriented), tetapi berkembang sesuai dengan ilmunya, namun tetap didominasi oleh nilai-nilai Islam.

Sejak tahun 1980-an, lembaga pendidikan Islam berada pada era integrasi, yang disusul dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur semua jalur dan jenis pendidikan. Secara tidak langsung, undang-undang tersebut mengatur tentang pelajaran agama Islam secara khusus, mulai dari sekolah MI, MTs, dan MA yang bersifat religius dan masih diatur oleh Kementerian Agama. Berkaitan dengan hal tersebut, kurikulum Madrasah sekurang-kurangnya menunjukkan kejujuran dan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan

umum, lulusan diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik kepada Allah SWT yang diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Pengembangan kurikulum Perguruan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu (1) kelompok mata kuliah komponen institut, komponen fakultas dan komponen jurusan. Aktivitas perkuliahan menerapkan sistem semester nonkredit. Sejak tahun 1983 melakukan transformasi kurikulum menerapkan sistem perkuliahan dengan sebutan Sistem Kredit Semester (SKS). Program pendidikan dibagi dua, yaitu program Sarjana Muda VI semester, dan program Sarjana Lengkap IV semester.

Mata kuliah ini terbagi menjadi dua, yaitu mata kuliah matrikulasi VI semester dan program Sarjana Lengkap IV semester. Struktur mata kuliah dibagi menjadi (1) Mata Kuliah Dasar Institut (MKDI); (2) Mata Kuliah Dasar Fakultas (MDKF), dan (3) Mata Kuliah Keahlian Profesi (MKKP). Dalam kurikulum ini, tidak hanya mata kuliah yang dikelompokkan menurut ketiga komponen tersebut, tetapi semua mata kuliah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Mata kuliah reguler; Semua mata kuliah berlaku umum tanpa syarat dan pengecualian, baik institut, fakultas maupun jurusan.
- b. Mata kuliah bersyarat, yaitu mata kuliah yang harus diikuti oleh semua kegiatan pembelajaran. Kursus prasyarat wajib diselesaikan agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah syarat di atasnya.

• **Transformasi Metode Pembelajaran**

Transformasi metode pendidikan agar kegiatan belajar mengajar menuju pada tujuan pendidikan serta efektif dalam pencapaian tujuannya.

Perubahan metode pembelajaran *dayah* di Aceh meliputi metode diskusi dan metode diskusi. Pertama metode pembelajaran *dayah* menggunakan metode *Halaqah* yaitu duduk melingkar di lantai *balee*, membaca, mengaji dan menerjemahkan. Kemudian

metode pembelajarannya berkembang, antara lain Metode Diskusi, Pemecahan Masalah dan Manajemen *Muzakarah Wal Muhadharah*. Dibentuklah kelompok diskusi khusus untuk *Muzakarah* dengan lembaga khusus bernama *Lajnah Bahsul Masail* yang dikelola oleh guru-guru berpengalaman.

Transformasi metode pembelajaran dari pembelajaran dengan menggunakan metode tradisional (halaqah) menjadi pembelajaran dengan metode modern berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan seperti metode diskusi, metode kelompok, metode praktik, metode kooperatif dan metode lain yang dikembangkan sendiri oleh *dayah-dayah* di Aceh.

Metode pembelajaran di madrasah-madrasah Aceh terus diperbaharui, meskipun metodenya sama, namun sistem penerapannya bersifat dinamis dan serba guna. Penerapan berbagai metode pada madrasah di Aceh meliputi; Pertama, metode diskusi yang digunakan guru untuk mendorong siswa berpikir kritis dan bebas mengemukakan pendapatnya dalam memecahkan masalah. Kedua, metode penyajian/ceramah yang digunakan guru dalam materi keterampilan keagamaan. Ketiga, metode resitasi, pembelajaran dengan diberikan tugas oleh guru untuk menyelesaikan rangkaian soal/tugas. Keempat, metode *field trip* diterapkan pada pembelajaran ekstrakurikuler dan pembelajaran sejarah. Kelima, metode latihan yang digunakan untuk belajar kesenian, upacara dan kepramukaan. Keenam, metode teamwork, penerapan metode ini pada pembelajaran berupa tugas-tugas yang diberikan guru untuk mendidik siswa. Selain itu, metode ceramah selalu digunakan dalam pembelajaran yang walaupun tergolong klasikal, namun cukup efektif karena sifatnya yang komunikatif di madrasah.

Perubahan metode pembelajaran yang efektif itu adalah; Pertama, metode ceramah, meskipun merupakan metode yang paling klasik, namun metode ini dapat digunakan untuk menyajikan materi dalam bentuk deskriptif fakta dan opini. Metode ceramah menggunakan komunikasi dua arah (*two-way traffic*). Kedua,

metode tanya jawab, Ketiga, metode percakapan, pemberian dan penerimaan informasi, pendapat dan pengalaman, terutama untuk pemecahan masalah dan pemikiran. Keempat, memberikan tugas dan menyiapkan makalah. Kelima, metode seminar kelas, dimana mahasiswa terlebih dahulu diberikan topik-topik konkrit untuk pembuatan tulisan kemudian diajarkan dalam satuan-satuan perkuliahan.

- **Transformasi Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam, penyempurnaan sarana dan prasarana merupakan alat untuk mempercepat, memperlancar dan memaksimalkan proses pendidikan dan pembelajaran, yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Adanya sarana dan prasarana yang maksimal mengarah pada pembelajaran yang profesional dan berkualitas. Tersedianya sarana dan prasarana modern di lembaga pendidikan Islam memberi arti dan tujuan bagi terwujudnya pembelajaran yang benar.

Kemajuan pendidikan di Aceh dimulai dengan pertumbuhan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti *meunasah*, *rangkang*, perguruan tinggi; *Ma'had 'Ali* dan *Dayah Teungku Chiek*. Lembaga pendidikan tersebut menjadi situs sejarah, seperti *dayah Teungku Awee* Geutah Peusangan Aceh Utara, *dayah Teungku Syik* Tanoh Abee di Seulimum Aceh Besar, *dayah Teungku Di Anjong* Planggahan Banda Aceh dan tempat-tempat lainnya di seluruh Aceh.

Dayah di Aceh pada dulunya belum memiliki sarana dan prasana yang memadai apalagi modern. Transformasi sarana parasana *dayah* di Aceh mengalami pertumbuhan dan perkembangan, berupa bangunan fisik, penambahan jumlah asrama santri, perluasan masjid dan *balee-balee* pengajian dan fasilitas lainnya baik dilihat dari struktur dan seni bangunan dalam jumlah yang cukup memadai, kemudian perluasan areal lahan serta perkembangan prarana pembelajaran yang memadai.

Perubahan sarana prasarana madrasah di Aceh meningkat secara signifikan, yang mendukung efektifitas pembelajaran. Transformasi

sarana dan prasarana madrasah dimulai dengan pembangunan gedung permanen dengan ruang belajar yang memadai didukung oleh beberapa prasarana pendidikan. Siswa terdorong untuk belajar khususnya di madrasah-madrasah Aceh karena tersedianya fasilitas belajar yang murah didukung dengan lingkungan yang nyaman dan dinamis.

Dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Perguruan Tinggi Islam mengubah badan kelembagaan, mengembangkan Fakultas, membuka Program Pascasarjana dan mendirikan perguruan tinggi Islam swasta di berbagai daerah/kota untuk secara otomatis mengembangkan jurusan untuk memberi banyak pilihan keilmuan bagi yang mengikuti kuliah pada lembaga tersebut. Pengembangan kelembagaan yang didukung infrastruktur modern mengakibatkan peningkatan kualitas pembelajaran bagi lulusan kualifikasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. (1984). *Ilmu pendidikan: suatu pengantar*. Saudara Salatiga.
- Al-Attas, M. N. (1979). *Aims and objectives of Islamic education*. King Abdul Aziz University.
- Al-Ghalayani, M. (1949). *Idzdzatur al-Nahsyi'in*,. Maktabah Ashriyah.
- Al-Syaibany, M. A.-T. (1979). *Falsafah pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Amiruddin, M. H. (2013a). *Menatap Masa Depan Dayah*. Yayasan PeNA.
- Amiruddin, M. H. (2013b). *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh (Ketiga)*. Yayasan PeNA.
- Arifin. (1994). *Ilmu pendidikan Islam suatu tinjauan teoritsi dan praktis* (3rd ed.). Bumi Aksara.
- Arifin, M. (2000). *Filsafat pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Asari, H. (2007). *Menyikap zaman keemasan Islam*. Citapustaka Media.
- Ashraf, A. (1991). *Horizon baru pendidikan Islam*. Pustaka Firdaus.
- Ashraf, A. (1996). *Horizon baru pendidikan Islam*. Pustaka Firdaus.
- Asrobah, H. (1999). *Sejarah pendidikan Islam*,. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam tradisi dan modernisasi menuju melenium baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milinium III*. Kencana.
- Daradjat, Z. (1992). *Ilmu pendidikan islam* (1st ed., Vol. 4). PT. Bumi Aksara.
- Daradjat, Z. (1994). *Pendidikan Islam dalam keluarga dan sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Daulay, H. P. (2009a). *Pemberdayaan pendidikan islam di indonesia*. Rineka Cipta.
- Daulay, H. P. (2009b). *Pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia* (Rineka Cipta (ed.)).

- Daulay, H. P. (2009c). *Pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Duhuri, S. (2014). *Dayah Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Endatu Aceh*. Lhee Sagoe Press.
- Duhuri, S. (2016). The Text of Conservatism: The Role of Abbas' Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah in Underpinning Acehese Current Religious Violence. *Studia Islamika*, 23(1), 29–59. <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i1.2405>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1990). *Kamus Inggris-Indonesia* (18th ed.). Gramedia.
- Fadjar, M. (1998). *Visi pembaharuan pendidikan Islam*. Lembaga pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia.
- Furchan, A. (2004). *Transformasi pendidikan Islam di Indonesia, anatomi keberadaan madrasah dan PTAI*. Gama Media.
- Hamalik, O. (2014). *Perencanaan pengajaran berdasarkan pendekatan sistem*. Bumi Aksara.
- Hasjmy, A. (1980). *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan Islam*. Bhatara Aksara.
- Hasjmy, A. . dkk. (1969). *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan*. Yayasan Pembina Darussalam.
- Ibrahimy, M. N. El. (2002). *Sekitar pembaharuan sistem pendidikan agama di Aceh: dalam perkembangan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam* (2nd ed.). Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Idris, S., & dkk. (2002). *Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*. Majelis Pendidikan Daerah.
- UUD 1945, 105 129 (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Ismail, B. (2002). *Peranan dan perkembangan lembaga pendidikan agama di Aceh: dalam perkembangan pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam* (2nd ed.). Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Jalal, A. F. (1977). *Min al-Usuli at-Tarbiyah fi-Islam*. Darul Kutub Misriyah.

- Jamaluddin, & Said, U. (1996). *Filsafat pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- LAL, A. (2010). *Transformasi pendidikan Islam*. Gaung Persada Press.
- Langgulung, H. (1980). *Beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam*. Al-Ma'arif.
- Ma'arif, A. S., & dkk. (1991). *Pendidikan Islam di Indonesia*. Tiara Wacana.
- Mahmud Yunus. (1990). *Sejarah Pendidikan Islam*. Hidakarya Agung.
- Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). *Paradigma pendidikan universal dan post – modern: mencari "visi baru" atas realitas baru pendidikan kita*. IRCiSoD.
- Muhaimin. (2004). *Wacana pengembangan pendidikan Islam* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. (2006). *Nuansa baru pendidikan Islam, mengurai benang kusut dunia pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2010). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah dan perguruan tinggi*. Raja Grafindo Persada.
- Mukti, A. (2007a). *Konstruksi pendidikan islam, belajar dari kejayaan madrasah nizhamiyah dinasti saljuq*. Cita Pustaka Media.
- Mukti, A. (2007b). *Konstruksi pendidikan Islam: belajar dari kejayaan madrasah nizhâmiyah dinasti saljûg*. Citapustaka Media.
- Mukti, A. (2016). *Paradigma pendidikan Islam: Dalam teori dan praktek sejak periode klasik hingga modern*.
- Nakosteen, M. (1994). *Kontribusi Islam atas dunia intelktual barat: deskripsi analisis abad keemasan Islam* (J. S. Kahhar & Supryanto (eds.)). Risalah Gusti.
- Nasir, R. (2005). *Mencari tipologi format pendidikan ideal*. Pustaka Pelajar.
- Nata, A. (1997). *Konsep pendidikan Ibn Sina*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah.
- Pazzan. (2010). *Prospek dayah di Aceh*. Pancasarjana IAIN Ar-Raniry.
- Poerwadarminto. (1993). *Kamus besar bahasa Indonesia* (2nd ed.). Balai Pustaka.
- Ramayulis. (2004). *Ilmu pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Rasyidin, A., & Nizar, S. (1994). *Filsafat pendidikan Islam, pendekatan, historis, teoritis dan praktis*. Logos.

- Rembangy, M. (2010). *Pendidikan Tranformasi: Pergulatan Kritis Merumuskan Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi*. Teras.
- Ridha, M. R. (1973). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim, Tafsir al-Manar, Juz VII*. Daral-Fikri.
- Rosyidi, K. (2004). *Pendidikan profetik*. Pustaka Belajar.
- Saby, Y. (2001). *Pendidikan agama di Aceh landasan dan dukungan terhadap pelaksanaan syari'at Islam dalam pendidikan di Aceh: persiapan menyongsong hari depan*. International Republican Institute.
- Saleh, A. R. (2006). *Madrasah dan pendidikan anak bangsa, visi, misi dan aksi*. Raja Grafindo Persada.
- Sanaky, H. A. (2003). *Paradigma pendidikan Islam : membangun masyarakat madani Indonesia*. Safiria Insani a Press.
- Saylor, & Alexander. (1966). *Curikulum planning for modern school*. Halt Rinerchart and Winston.
- Subhan, A. (2012). *Lembaga pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Suhandang, K. (1988). *25 tahun IAIN ar-raniry*. IAIN Jami'ah Ar-Raniry.
- Syam, M. N. (1986). *Filsafat pendidikan pancasila*. Usaha Nasional.
- Tafsir, A. (1992). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaha Rodakarya.
- Tafsir, A. (1994). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Tholhah, I., & Barizi, A. (2004). *Membuka jendela pendidikan, mengurai akar tradisi dan integrasi keilmuan pendidikan Islam*. Gajah Grafindo Persada.
- Tholkah, I., & Barizi, A. (2004). *Membuka jendela pendidikan, mengurai akar tradisi dan integrasi keilmuan pendidikan Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan pendidikan Islam masa orde baru. *Jurnal Tarbiyah*, 1(1), 175–194. <http://coretan-rossi.blogspot.com/>
- Zainuddin. (2008). *Reformasi pendidikan, kritik kurikulum dan manajemen berbasis sekolah*. Pustaka Belajar.
- Ziemek, M. (1983). *Pesantren dalam perubahan sosial*. P3EM.
- Zuhairini. (1991). *Filsafat pendidikan Islam*. Bumi Aksara.

INDEKS

A

Acchera bata 30
Aceh 15, 16, 17, 18, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166
Aceh Besar 50, 132, 135, 136, 138, 161
Aceh Timur 107, 126, 134, 136
Aceh Utara 50, 86, 132, 138, 161
Adat bak Poeteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lamkseumana 35
Adat Meukuta Alam 35, 36
Adat Pomeureuhom 35
Agama 9, 12, 14, 16, 38, 57, 58, 59, 60, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82, 87, 88, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 110, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 128, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 151, 155, 158, 165
Akhlak 111, 114, 115, 116, 119
Al Ir-syad 43
Allah SWT 3, 5, 7, 9, 36, 43, 69, 70, 71, 78, 79, 82, 86, 115, 153, 154, 155, 159
al-Qur'an 4, 166

Amerika 29
Aqidah 106, 114
Arab 1, 8, 24, 29, 31, 32, 33, 38, 64, 92, 101, 104, 107, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 134, 135, 140, 147
Aru 30, 31
Asia Tenggara 26, 29, 38, 47, 103
As-Sunnah 6

B

Badan Pekerja Nasional Indonesia 58
Balai Gading 34
Balai Majlis Mahkamah Rakyat 34
Balai Rung Sari 34
Bali 29
Bandar Aceh Darussalam 31
Basman 30
Batak 31, 32
Batusangkar 11
Bayt al-Hikmat 41
Belanda 10, 27, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 72, 95, 104, 133, 140

Bimaristan 41

Buddha 25

Bugis 31

C

Cap Sikureng 34
Cina 29, 30, 32, 33

D

Daerah Istimewa 15, 16, 97, 98
Daerah Istimewa Aceh 15, 16, 97, 98
Daerah Modal 53

Dagroian 30
Daruddunia 31
Darul Islam 55, 56, 57, 61
Darussalam 32, 35, 36, 37, 38, 42, 73,
74, 75, 78, 82, 95, 111, 124, 132,
135, 138, 146, 148, 149, 155, 164
Daya 31
Dayah 40, 63, 64, 70, 71, 79, 85, 89, 95,
96, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 124, 125, 126, 131, 132,
133, 136, 137, 142, 149, 150, 153,
161, 163, 164
Devide et Impera 49
Diferensiasi 23
Dinasti 8, 29, 128
Dinasti Liang 29
Diniyah 11, 12, 50, 147, 150

E
Education 19
Eksekutif 36
Eropa 31, 45, 47

F
Fansur 30

G
Gampong 33, 34, 63, 132, 142
Gazi Djohansyah 31
Gereja 41
Gujarat 8, 37, 64

H
Habsyi 31
Hadist 44, 106, 107, 108, 113, 119
Hari Pendidikan 95, 146, 150, 164
Hikayat Prang Gompeuni 37
Hikayat Prang Sabi 37
Hindu 25, 32
Hinduism 32
Hukom Adat Blang 36
Hukom Adat Geumeubeu 36

Hukom Adat Glee 36
Hukom Adat Laut 36
Hukom Adat Seuneubok 36
*Hukom ngen adat hanjeut cree bue lagei
zat ngon sipheut* 35

I

Idi Cut 107, 126
Imeum 33, 34
India 8, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 64, 104
Indochina 30
Inggris 1, 45, 92, 108, 112, 113, 116,
117, 135, 164
Insan Kamil 82
Inshafuddin 105
Islam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 110, 111, 112,
113, 114, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 124, 126, 127, 128, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 158, 161, 162, 163,
164, 165, 166

Isolatif-Tradisional 26

J

Jawa 25, 30, 33, 43, 46, 47, 53, 62, 134
Jepang 43, 50, 51, 58
Jihad 44

K

Kaffah 66
Kalimantan Utara 29
Keeling 32

- Kementerian 9, 12, 14, 16, 57, 58, 59, 70, 76, 80, 82, 87, 88, 95, 97, 98, 99, 110, 139, 140, 145, 155, 157, 158
- Kepulauan Melayu 30
- Keuchik* 33
- Khanaqah* 41
- Kitab 5, 106, 109, 158
- Korte Verklaring* 52
- Kota Alam 30
- Kota Asan 54
- Kristen 56
- Krueng* 71, 95, 132, 136
- Krueng Kalee* 71, 95, 132, 136
- Kultur 131
- Kurikulum 13, 27, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 158
- Kuttab 24, 25
- L**
- Labuhan Haji 95
- Lambri* 29, 30
- Lamiri 30, 31
- Lamjampok 50
- Langkat 55
- Legislatif 36
- Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh 146
- life skill* 81
- M**
- Madinah 85
- Madras* 32
- Madrasah 10, 11, 12, 41, 50, 62, 63, 70, 72, 80, 81, 86, 90, 96, 97, 98, 99, 110, 112, 113, 115, 127, 128, 131, 133, 135, 137, 147, 150, 151, 154, 156, 157, 158, 166
- maintenance of Islamic tradition* 81
- Majelis Ulama Indonesia 146
- Majlis Mahkamah Rakyat 36
- Majlis Tarjih 44
- Malabar 32
- Malaya 33, 51
- Mantea 32
- Masjid 24, 25, 36, 46, 85, 104, 131, 134, 136, 137
- Masyumi 58, 59, 60, 67
- Medan 15, 54, 55, 61, 88
- Menteri 12, 25, 57, 87, 99, 110, 114, 120, 140
- Mesir 24, 25, 38, 45, 135
- Metode 27, 105, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 159, 160
- Meukota Alam* 30
- Meunasah* 10, 25, 33, 34, 36, 50, 62, 64, 85, 142, 156
- Minangkabau 25, 31, 46, 62
- Misi *Hardi* 56, 57
- Model 81, 90, 137
- Modernisasi 23
- Montasiek 50
- Mualaf* 32
- Muhammadiyah 43, 44
- Muhammad SAW 3, 8, 79
- Mukim 33, 34
- Muslim 3, 15, 44, 59, 86, 92, 123, 128
- N**
- Nabi 3, 5, 8, 20, 39, 79, 85, 152
- Nadhar* 73
- Nahdlatul Ulama 59
- Nanggroe* 112, 114, 164
- Nasakom 60
- Nasional-Agama-Komunis 60
- Nasionalis 59
- Negara Islam Indonesia 56, 57
- Nias 31
- Nizam Al Mulk 8
- Nizamul Muluk 8

Non mazhabi 83

Nusantara 8, 15, 39, 52, 64, 67

O

Observatorium 41

Orde lama 12

Ordo Imam 41

P

Padang Panjang 12

Panglima *sagoe* 43

Pantai Timur 45, 51

Parsi 30, 31, 37

Partai Muslimin Indonesia 60

Pegu 30

Penang 51

Pendidikan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 41, 52, 58, 59, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 81, 84, 87, 88, 91, 92, 98, 99, 101, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 122, 124, 127, 128, 132, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 157, 158, 163, 164, 165, 166

Perancis 45

Perang Cumbok 47, 48

Perlec (Perlak) 30

Persatuan Islam 43

Persatuan Ulama 50

Pesantren 12, 62, 70, 147, 150, 151, 158, 166

Pesantren Kilat 147, 150

Peureulak 15, 103

Peusjuk 32

Pidie 30, 31, 136

PKI 59, 60

PNI 58, 59

Ponorogo 13

PUSA 44, 50, 51

Q

Qadhi Malik al-Adil 43

Qanun 34, 36, 38, 71, 148

Qanun al-Asyi 36

Qias 36

R

Raja 31, 43, 133, 165, 166

Rasulullah 6

Reformasi 21, 43, 149, 166

Religious 164

Reproduction of Ulama 81

Republik Persatuan Indonesia 57

Reusam 36, 38

Ribath 41

Ritualistic-skriptural 39

S

Samalanga 43, 50, 51, 125

Samudera 30, 31, 64

Santri 45, 85, 95, 157

Sarekat Islam 43, 44

Sekolah Dasar 114, 148

Sektarianisme 83

Selat Malaka 8, 29

Serikat Pemuda Islam 50

Seulimeum 50, 63

Seuneubok Rambong 51

Siam 33

Sigli 54

Sintesis 26

Solo 49

Straits Settlements 45

Strategi 21

Sultan Iskandar Muda 15, 29, 32, 104, 132

Sumatera 29, 30, 33, 43, 50, 53, 54, 55, 61

Sumatera Thawalib 43

Sumatra 30

Surat Keputusan Bersama 12, 99
Syahid 52
Syair prang Aceh 37
Syariat 34
Syarikat Islam 49

T

Tafaqquh fi ad-din 71, 78, 80, 81, 153, 154
Tamaddun 31
Taman Pendidikan Al-Quran 147, 150
Tamiang 30
Tanah Karo 55
Tanoh Mirah 43, 95
Taqlid 10
Tarbiyah 2, 73, 90, 91, 100, 135, 152, 156, 164, 166
Tentara Islam Indonesia 56, 57, 61
Teungku 33, 37, 43, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 61, 71, 72, 79, 85, 103, 125, 126, 132, 134, 135, 156, 157, 161
Timur Tengah 10, 37, 38, 39, 56, 62, 63, 64, 100, 133, 142, 151
Tradisional 106
Transfer of Islamic 80, 81
Tuhan 7, 9, 11, 39, 57, 77, 79, 93, 143, 144
Turki 32, 33, 37, 104

U

Ulama 36, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 81, 85, 91, 95, 103, 104, 105, 131, 133, 134, 150, 154, 157
Uleebalang 34, 42, 43, 46, 48, 49
Umpung geumeutoe 46
Urdu 64

W

Wilde school ordonantie 42

Y

Yayasan Dana Sejahtera Aceh 146, 149
Yayasan Pembina Darussalam 146, 149, 164
Yudikatif 36